

34607  
Kam  
P e



# **PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN PADA USAHA KECIL**

## **TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**MADE KAMINI, SH.**  
**NIM. B 4A.099.103**

**Pembimbing:**

**PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO, S.H.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2005**

# **PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN PADA USAHA KECIL**

## **TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

Mengetahui Pembimbing,

Penulis,



Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H.  
NIP. 130368053

Made Kamini,SH  
NIM. B 4A.099.103

Mengetahui :

Ketua Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.  
NIP. 130350159

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2005**

## **ABSTRAK**

Usaha kecil mempunyai peran yang sangat strategis bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Namun kenyataan menunjukkan bahwa kondisi usaha kecil pada umumnya kurang menggembirakan bahkan sebagian besar masih mengalami kesulitan untuk memperoleh akses kepada sumber pembiayaan khususnya dari kredit perbankan. Hal ini berkaitan erat dengan belum adanya sistem dan mekanisme untuk menjembatani kesenjangan yang ada antara pendekatan dan kebijakan perbankan dengan kondisi dan karakteristik usaha kecil.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan dan pembiayaan Usaha Kecil memerlukan strategi yang komprehensif dan memadukan berbagai fungsi pokok dalam pengembangan dan pembiayaan Usaha Kecil dalam sebuah sistem dan mekanisme yang terintegrasi dengan baik. Fungsi-fungsi tersebut meliputi fungsi pembiayaan dan pemberian kredit, fungsi pejaminan kredit, serta fungsi pembinaan dan pemberian bantuan teknis.

Lembaga-lembaga atau instansi yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut pada umumnya didirikan atau mendapat dukungan yang kuat dari pemerintah serta dikelola secara profesional.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa untuk membangun dan mengoperasikan suatu sistem yang komprehensif, terpadu dan dikelola secara efisien dan profesional, diperlukan pembahasan yang mendasar dari sistem yang berlaku sekarang.

Unsur-unsur yang diperlukan pada dasarnya sudah tersedia namun diperlukan pengaturan baru atau penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha kecil dan perbankan. Dengan perubahan-perubahan tersebut diharapkan dapat diciptakan sistem dan mekanisme yang dapat mendukung pembiayaan Usaha Kecil melalui kredit perbankan yang sehat dan berkelanjutan, sehingga membantu mengangkat kesejahteraan masyarakat sejalan dengan keinginan masyarakat dan kehendak konstitusi.

***Keyword: Kredit Perbankan Usaha Kecil***

## ABSTRACT

Small businesses have strategic role to enhance the social welfare and prosperity of the community. The fact, shows, however, that the general condition of small businesses is not satisfactory, and even most of them have difficulties to get access to financial sources, particularly to banking credit. This is closely related to the lack of a system and mechanism that bridges the existing gap **between** the banking approach and policy **and** the condition and characteristics of small businesses.

This study reveals that to develop and to finance small businesses requires a comprehensive strategy and integration of various main functions for developing and financing small businesses into a well integrated system and mechanism. Those functions include the function of financing and credit extension, the function of credit guaranty, and the function of development and technical assistance. The institutions carrying out these functions are generally established by or get strong support from the government and are professionally managed. This study also reveals that to develop and operate a comprehensive, integrated system which is efficient and professionally managed requires a substantial change to the existing system.

The required elements are basically available, but new or revised regulations governing banking sector and small business are needed. These regulations are expected to create a system and mechanism that support the financing of small businesses through a sound and continuous banking credit extension so that it may help increasing the social welfare in accordance with the expectation of the community and the will of the Constitution.

*Keyword:* banking credit for small businesses

## Kata Pengantar

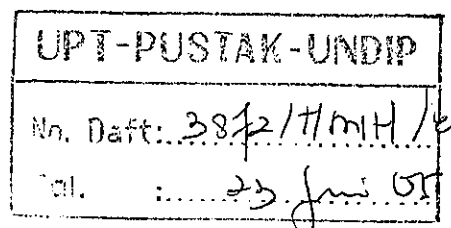
Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena berkat Rakhmatnya serta didorong oleh keinginan yang kuat, maka akhirnya saya dapat menyelesaikan tesis ini.

Selama saya mempersiapkan tesis ini banyak kesulitan-kesulitan yang saya hadapi terutama dalam mencari bahan-bahan atau literatur-literatur yang ada hubungannya dengan Kredit Usaha Kecil.

Namun demikian berkat bantuan dari semua pihak, akhirnya saya dapat menyusun tesis ini walaupun dengan tertatih-tatih hampir 5 tahun.

Melalui jalan ini dan dengan hati yang tulus saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, saya haturkan kepada :

1. Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH yang dengan tekun dan sabar membimbing saya dalam penulisan tesis ini. Saya selalu berdoa semoga Ibu selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, di beri kekuatan, kesehatan dan kebahagiaan lahir dan batin. Semoga Tuhan Yang Kuasa membalas budi baik Ibu.
2. Bapak Peter dan Bapak Eman dari BRI Pusat yang telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai sehingga kami dapat data yang akurat mengenai Kredit Usaha Kecil dari BRI.
3. Semua rekan-rekan dan seluruh Pegawai di Direktorat Kerjasama yang sangat mendorong saya sehingga tesis ini dapat terselesaikan.



4. Khusus kepada Nyoman Sukanadji yang telah membantu saya dalam pengetikan tesis ini mulai proposal sampai menjadi tesis. Semoga Sang Hyang Widhi Wasa membalas kebaikan Pak Nyoman.
5. Teman-teman Mahasiswa Pascasarjana Program Departemen Kehakiman di UNDIP yang telah memberikan dorongan, untuk menyelesaikan tesis ini.

Demikian pula saya tidak dapat melupakan peranan penting dari suami dan anak kami yang tercinta yang selalu mendorong dan memohonkan doa agar supaya study saya ini dapat terselesaikan.

Jakarta, Maret 2005

Penyusun

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	Ii
Abstrak .....	iii
Abstract.....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Bab I   Pendahuluan	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kontribusi Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Penulisan .....	26
Bab II   Tinjauan Pustaka mengenai Kredit Perbankan pada Usaha Kecil	
A. Pengertian Kredit Perbankan	
1. Pengertian Kredit Perbankan .....	27
2. Unsur-unsur Kredit .....	32
3. Fungsi Kredit .....	35

4. Tujuan Kredit .....	39
5. Jenis-jenis Kredit .....	41
6. Pertimbangan Pemberian Kredit .....	45
7. Perjanjian Kredit .....	50
<b>B. Usaha Kecil</b>	
1. Pengertian Usaha Kecil.....	55
2. Pengaturan Usaha Kecil .....	59
3. Arti pentingnya Modal bagi Usaha Kecil .....	71
4. Kemungkinan Perolehan Modal bagi Usaha Kecil .....	73
<b>Bab III Hasil Penelitian dan pembahasan .....</b>	<b>86</b>
<b>A. Hasil Penelitian</b>	
1. Peran Pemerintah dalam pengaturan pemberian kredit kepada usaha kecil .....	86
1.1. Kebijakan Pemerintah sebelum Paket Januari 1990 (Pakjan 1990) .....	100
1.2. Kebijakan Pemerintah Setelah Pakjan 1990 .....	102
1.3. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah .....	105
2. Peraturan Perundang-undangan yang mempengaruhi perkembangan Usaha Kecil .....	111
2.1. Perusahaan Modal Ventura ( <i>Ventura Capital</i> ) .....	118
2.2. PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) .....	120
2.3. Lembaga Keuangan Mikro .....	121



2.4. Lembaga Asuransi dan Penjaminan Kredit .....	122
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pemberian Kredit Perbankan kepada Usaha Kecil .....	123
B. Pembahasan	
1. Peranan Pemerintah dalam pengaturan pemberian kredit kepada Usaha Kecil .....	135
1.1. Beberapa skema kredit program sebelum Pakjan 1990 .....	137
1.2. Setelah Pakjan 1990 .....	141
1.3. Kebijakan Pemerintah setelah Reformasi .....	150
2. Peraturan Perundang-undangan yang mempengaruhi Perkembangan Usaha Kecil .....	154
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian kredit Perbankan .....	164
Bab IV Penutup	
A. Kesimpulan .....	174
B. Saran .....	177

Daftar Pustaka

Lampiran

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Usaha kecil merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan ekonomi pada khususnya. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan membutuhkan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.<sup>1</sup>

Usaha kecil yang dimaksud disini adalah Usaha Kecil sebagaimana disebut dalam UU No. 9 Tahun 1995. Dalam pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana di atur dalam Undang-undang ini. Kriteria Usaha Kecil dapat kita lihat pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih tidak melebihi Rp. 200.000.000,

---

<sup>1</sup> Penjelasan atas Undang-Undang No. 9 /1995 tentang Usaha Kecil

( dua ratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat berusaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diusahakan oleh warga negara Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang tentang usaha kecil menyebutkan pula antara lain bahwa kredit perbankan merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi Usaha Kecil. Dipihak lain pemberian kredit Usaha Kecil diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 1992 Jo Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan.<sup>3</sup>

Pemberian kredit perbankan kepada usaha kecil juga dipengaruhi oleh berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya, terutama undang-undang yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, yang mempengaruhi ketersediaan sumber dana untuk membiayai berbagai program pemerintah termasuk program pemberian kredit untuk Usaha Kecil<sup>4</sup>

Peraturan-peraturan tersebut diatas belum berhasil mewujudkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia, malahan berbagai kesenjangan terjadi baik kesenjangan pendapatan, kekayaan, pekerjaan maupun pendidikan masih terasa dalam masyarakat.

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 9 / 1995 tentang usaha kecil

<sup>3</sup> Undang-undang No 7 tahun 1992 Jo Undang-undang NO 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>4</sup> UU No 23 tahun 1999 Tentang BI Sebagai pengganti UU No 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral. BI tidak lagi diperkenankan untuk memberikan kredit likuiditas kepada perbankan (KLBI) untuk membiayai berbagai program pemerintah.

Sejak krisis ekonomi terjadi pertengahan tahun 1997, tingkat kemakmuran masyarakat menurun, hal ini tercermin dari makin banyaknya pengangguran, karena banyak terjadi PHK dari usaha besar, sehingga pendapatan dari masyarakat juga menurun. Krisis ekonomi itu juga menyebabkan Indonesia yang sebelumnya sempat tergolong negara yang berpendapatan sedang (*middle income countries*) kembali menjadi negara miskin (*poor countries*). Proses pemiskinan tersebut disertai pula dengan berkurangnya rasa aman, terganggunya ketertiban serta merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegakannya.

Berdasarkan data empiris terbukti bahwa Usaha Kecil (UK) memiliki peran yang cukup vital dalam perekonomian di Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui selama Indonesia menjalani krisis ekonomi mulai Tahun 1997 dimana para konglomerat hampir semuanya pada bangkrut, tetapi tidak demikian halnya dengan pengusaha ekonomi kecil, dimana dia masih tetap eksis relatif tahan terhadap guncangan krisis dan mempunyai potensi besar dalam rangka menyerap tenaga kerja.

Salah satu kegiatan usaha yang sangat potensial untuk memberikan kontribusi kearah pencapaian masyarakat adil dan makmur adalah kegiatan ekonomi berskala kecil atau Usaha Kecil yang jumlahnya tersebar diseluruh Indonesia.<sup>5</sup> Kurangnya peran aktif dan perhatian perbankan dalam

---

<sup>5</sup> Sri Edi Swarsono, Prospek dan perkembangan perekonomian rakyat /UKM : antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan pasar, Seminar Nasional sehari mengenai prospek dan perkembangan UKM, Fak Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, 25 Juni 2002.

mendukung pembiayaan Usaha Kecil telah berlangsung sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia. Hal ini antara lain mengingat bahwa kredit perbankan yang ditujukan kepada Usaha Kecil pada waktu itu pada umumnya merupakan program pemerintah yang pendanaannya sebagian besar atau seluruhnya didukung oleh BI. Perbankan sebagai bank milik negara hanya sebagai Bank pelaksana saja.

Paket kebijakan deregulasi Perbankan yang diluncurkan bulan Oktober 1988 (Pakto 1988) memang telah meningkatkan mobilisasi dana masyarakat secara berarti oleh perbankan. Namun penyaluran dana masyarakat tersebut diberikan kepada pengusaha besar atau konglomerat dan banyak diantaranya diberikan dengan kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akhirnya menjadi kredit macet. Pakto terserbut juga menyebabkan bermunculan berdirinya Bank oleh pengusaha dengan tujuan menghimpun dana masyarakat untuk membiayai kegiatan usahanya dari kelompoknya mereka sendiri. Dalam kondisi seperti itu, pembiayaan Usaha Kecil pada umumnya belum mendapatkan perhatian yang memadai dari perbankan, dan hanya beberapa Bank saja yang mempunyai sistem, organisasi dan sumber daya manusia untuk mendukung pemberian kredit kepada Usaha Kecil. Disamping itu banyak bank yang menghindari ketentuan Pemerintah Cq. Bank Indonesia agar bank menyalurkan sebagian kreditnya kepada Usaha Kecil. Penyaluran kredit kepada Usaha Kecil lebih

banyak dilakukan melalui pelaksanaan kredit program yang dananya sebagian besar dari Kredit Likuidasi Bank Indonesia (KLBI) bukan dari dana masyarakat yang dihimpun oleh Bank.

Kurangnya perhatian Perbankan terhadap Usaha Kecil terlihat sejak paket kebijakan Januari 1990 (Pakjan 1990) dan UU No 7 tahun 1992, dimana U.U tersebut menggolongkan Bank atas Bank Umum dan BPR, dimana pelayanan terhadap Usaha Kecil dilakukan oleh BPR sedangkan Bank Umum diberi kebebasan untuk melayani atau tidak UK. Dengan dikeluarkannya UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan maka pemerintah dapat bekerja sama dengan Bank Umum dalam rangka pemberian kredit kepada Usaha Kecil.

Sampai diberlakukannya UU Bank Indonesia, pemberian kredit kepada sektor-sektor yang dianggap penting oleh pemerintah termasuk Usaha Kecil tetap mengandalkan berbagai Skim kredit program pemerintah yang pembiayaannya didukung oleh Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

Dengan dikeluarkannya UU Bank Indonesia (BI) maka BI tidak lagi mengeluarkan KLBI yang dipakai untuk membiayai berbagai program pemerintah termasuk program pengembangan Usaha Kecil.

KLBI yang sudah direalisasi dan atau sudah disetujui oleh BI akan tetapi belum di tarik oleh Bank, harus dialihkan kepada BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah dalam tempo enam bulan sejak diberlakukannya UU BI.

Undang-undang Bank Indonesia Nomor 23 /1999 berlaku mulai tanggal 17 Mei 1999.

Hingga saat ini belum ada Skim atau program baru yang secara sistimatis dapat mendukung pembiayaan Usaha Kecil sebagai pengganti KLBI.

Perkembangan diatas selain meyebabkan dampak yang kurang menguntungkan bagi Usaha Kecil untuk mendapatkan akses terhadap kredit perbankan, juga mencerminkan belum sinkronnya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan dan pembiayaan Usaha Kecil, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur Usaha Kecil dengan peraturan yang mengatur tentang perbankan.

Selain itu dalam peraturan perundang-undangan, ada rumusan pasal-pasalnya yang kurang jelas sehingga menimbulkan beberapa penafsiran, dan juga peraturan pelaksanaan dari suatu UU belum ada sehingga tidak dapat dilaksanakannya UU tersebut (facum).

Mengingat peranan Usaha Kecil yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya dalam penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatannya, maka pembiayaan Usaha Kecil perlu mendapat prioritas tinggi. Meskipun faktor permodalan tidak selalu menjadi penghalang bagi berjalannya suatu Usaha Kecil, namun ketersediaan dana yang cukup dan sesuai kebutuhan akan sangat mendukung perkembangan Usaha Kecil.

Ketersediaan sumber pembiayaan pada saat dibutuhkan, tanpa prosedur yang berbelit-belit dan dengan biaya yang relatif murah akan sangat membantu kegiatan Usaha Kecil.

Pengembangan Usaha Kecil akan memberi manfaat bagi keluarganya, pegawainya yang akhirnya membawa manfaat bagi masyarakat dan rakyat banyak karena Usaha Kecil merupakan usaha padat karya atau "*labour intensive*." Disamping itu Usaha Kecil pada umumnya bersifat sederhana, tidak memakai teknologi yang tinggi sehingga dapat lebih banyak menampung tenaga kerja dan dengan pendidikan yang rendah serta nilai investasi yang relatif kecil.

Hal-hal demikian perlu dikembangkan karena Usaha Kecil mempunyai posisi yang sangat strategis dan seharusnya mendapat prioritas yang tinggi. Usaha Kecil mempunyai berbagai kelemahan dan kekurangan, terutama permodalan yang harus dicarikan jalan keluarnya. Berbagai kebijakan dan program sebenarnya telah pernah di tempuh pemerintah untuk memperkokoh modal Usaha Kecil termasuk untuk mendorong pengembangan Usaha Kecil.

Berbagai Skim kredit program pernah dilaksanakan dan dikembangkan untuk memperkuat permodalan Usaha Kecil baik untuk modal investasi maupun untuk modal kerja. Demikian pula halnya pemberian kredit program untuk mendukung program swasembada dan peningkatan produksi



pangan dilakukan pemerintah. Sebagian besar Skim-Skim kredit tersebut tidak berjalan karena tidak sinkronnya antara peraturan perundang-undangan yang mengatur pembiayaan Usaha Kecil melalui kredit perbankan.

Kebanyakan Usaha Kecil yang mempunyai prospek bagus tetapi masih sulit mendapatkan akses terhadap kredit perbankan.

Kondisi pembiayaan Usaha Kecil makin memburuk sejak terjadinya krisis ekonomi Tahun 1997 karena terganggunya fungsi inter mediasi perbankan. Banyak Bank yang dilikuidasi dan dibekukan operasi atau usahanya.

Di pihak lain, krisis ekonomi justru menunjukkan bahwa Usaha Kecil mempunyai kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Usaha Besar, sehingga ketersediaan pembiayaan perbankan sebenarnya tidak saja akan membantu pengembangan Usaha Kecil, akan tetapi akan mempercepat pemulihan ekonomi dan dalam jangka panjang akan memperkuat perekonomian Indonesia. Akan tetapi perhatian perbankan terhadap Usaha Kecil masih kurang memadai.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber dana eksternal bagi usaha Indonesia, termasuk Usaha Kecil adalah perbankan. Dengan adanya krisis perbankan, maka akan ikut mempersulit penyediaan kredit perbankan bagi Usaha Kecil yang sebelumnya memang belum mempunyai akses yang

memadai terhadap dana perbankan.<sup>6</sup> Dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa Usaha Kecil dalam rangka meningkatkan modalnya melalui Kredit perbankan memerlukan strategi, pendekatan dan upaya yang lebih fokus dan terpadu.

Hal ini selanjutnya berkaitan erat dengan atau bahkan sangat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengatur pengembangan dan pembiayaan usaha kecil.

Untuk itulah penulis mengambil judul tesis ini yaitu Pemberian Kredit Perbankan kepada usaha Kecil.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Usaha Kecil sudah kondusif guna meningkatkan peran usaha Kecil.
2. Sejauh mana Peraturan Perundang-undangan tersebut mempengaruhi Usaha Kecil.
3. Kendala-kendala apa yang dijumpai dalam pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Kecil.

---

<sup>6</sup> Fungsi utama Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit. Sebelum krisis, rasio kredit/pembiayaan terhadap dana masyarakat (loan to deposit ratio atau L D R) berkisar antara 100-110%. Setelah krisis LDR menurun berkisar antara 35-45%. "lihat laporan Tahunan BI berbagai nomor"

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur usaha kecil telah kondusif guna meningkatkan peranan usaha kecil
2. Untuk mengetahui apakah aturan kredit perbankan berpengaruh terhadap perkembangan Usaha Kecil.
3. Untuk mengetahui kendala yang dirasakan usaha kecil dalam memperoleh Kredit Perbankan.

### **D. Kontribusi Penelitian**

Kegunaan tesis ini yang berfokus pada pemberian kredit perbankan kepada Usaha Kecil adalah untuk menelaah permasalahan-permasalahan dalam pemberian kredit perbankan pada Usaha Kecil, dan diharapkan dapat memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam mengembangkan Usaha Kecil dan kepada masyarakat yang mendalami mengenai Peraturan Perkreditan Perbankan.

### **E. Kerangka Teori**

- I. Kegiatan Usaha Kecil yang pada umumnya dilaksanakan dengan pola ekonomi rakyat merupakan bagian dari sistem ekonomi nasional yang perlu ditingkatkan. Peningkatan peran Usaha Kecil merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi nasional. Kemajuan Usaha

Kecil merupakan unsur penunjang tercapainya tujuan ekonomi yaitu Kesejahteraan bagi masyarakat. Pengembangan Usaha Kecil mempunyai peran yang sangat penting dan strategis bagi masa depan bangsa dan negara khususnya dalam menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut diperlukan keterpaduan dan konsistensi peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan Usaha Kecil khususnya dalam rangka akses usaha kecil terhadap kredit perbankan.

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari kegiatan Usaha Kecil hendaknya bersifat menunjang kegiatan Usaha Kecil, kelembagaan yang berwenang menangani kegiatan Usaha Kecil, serta persepsi masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban mereka merupakan suatu kesatuan dalam sistem hukum. Efektifnya peraturan perundang-undangan Usaha Kecil tersebut akan bergantung dari aspek-aspek yang terkait dalam suatu sistem hukum tadi.

Menurut Friedman setiap sistem hukum terdiri dari *legal structure* *legal substance*, dan *legal culture* (struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum). Struktur hukum adalah kelembagaan dan proses pembentukan, penegakan, dan penyelenggaraan hukum, substansi hukum

adalah asas kaidah hukum, dan budaya hukum adalah persepsi masyarakat mengenai hukum.<sup>7</sup>

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum terdiri dari bukan hanya asas dan kaidah, tetapi termasuk pula proses dan kelembagaan harus saling menunjang dalam pelaksanaannya secara lancar agar tercapai tujuan yang diinginkan.<sup>8</sup>

Hal serupa dikemukakan pula dalam politik hukum nasional yang tertuang antara lain dalam GBHN.<sup>9</sup>

Peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan Usaha Kecil antara lain adalah peraturan perundang-undangan tentang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Usaha Kecil merupakan bagian integral dunia usaha nasional, yang dapat berkembang menjadi bagian integral regional dan internasional yang hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia, dapat berkembang melalui kemitraan dengan usaha menengah atau usaha besar maupun dengan cara pembinaan dan pengembangan kelembagaan di bidang tradisional. Dalam rangka menciptakan iklim Usaha Kecil, maka pemerintah melalui peraturan

---

<sup>7</sup> Jeane Neltje Saly, SH.MH. Usaha Kecil Penanaman Modal Asing Dalam Perspektif Perdagangan Internasional diterbitkan BPHN Jakarta, 2001 hal. 14.

<sup>8</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum. Bandung FH UNPAD, 1976.

<sup>9</sup> GBHN 1976, Politik Hukum Mochtar Kusumaatmadja.

perundang-undangan yang meliputi aspek pendanaan upaya penyediaan sumber dana tata cara dan persyaratan, untuk pemenuhan kebutuhan modal bagi pemberdayaan usaha kecil, pengembangan dan pembinaan lembaga ekonomi rakyat yang sudah berkembang.

Berdasarkan ketentuan tentang modal usaha Undang-undang Nomor 9 tahun 1995, Usaha Kecil disyaratkan sebagai usaha yang memiliki modal paling banyak 200 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 milyar rupiah.

Usaha kecil dibidang pertanian dan kelautan / nelayan serta atau industri kecil / rumah tangga, pada umumnya berdiri sendiri atau berusaha dengan sistem kekeluargaan dalam wadah koperasi guna meraih keuntungan<sup>10</sup>.

Dalam hal pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil menunjukkan bahwa kemitraan yang dilakukan usaha Kecil / Koperasi pada umumnya dengan usaha menengah atau besar baik swasta, BUMN, maupun BUMD berjalan kurang lancar.

Dalam kaitan tersebut pemerintah sedang melakukan program pengembangan dan pembinaan lembaga ekonomi rakyat, meningkatkan pelaksanaan program kemitraan Usaha Kecil dengan usaha menengah, atau usaha besar berupa perusahaan yang berbentuk BUMN, BUMD, bahkan apabila dimungkinkan dengan penanaman modal asing ( PMA ) setempat,

---

<sup>10</sup> Syariffuddin Baharsyah Prof.Dr. " kebijakan umum kemitraan usaha disektor pertanian " Departemen Pertanian Jakarta, 1997.

dan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, dalam kenyataannya kemitraan ini juga belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam hal pembiayaan Usaha Kecil dapat disediakan oleh Pemerintah, dunia usaha dan juga oleh swasta.

Pembiayaan tersebut dapat dilakukan melalui kredit perbankan pinjaman lembaga keuangan bukan Bank, modal ventura, pinjaman dari dana penyesihan dari sebagian laba badan usaha milik negara (BUMN), hibah dan jenis pembiayaan lainnya, yaitu dana sumbangan dari masyarakat termasuk dana-dana dari Usaha Besar Swasta, dan sebagainya.

Usaha Pemerintah untuk meningkatkan peranan Usaha Kecil dalam meningkatkan ekonomi nasional melalui peraturan Perundang-undangan hendaknya mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Apabila dihubungkan dengan bidang ekonomi, maka keadilan sosial berkaitan erat dengan demokrasi ekonomi, namun demokrasi ekonomi lebih luas cakupannya<sup>11</sup>.

Demokrasi ekonomi mencakup keikutsertaan rakyat dalam "menentukan" dan mengelola" sumber daya ekonomi untuk rakyat itu sendiri.

Apabila sumber daya alam dan kekayaan negeri, serta alat-alat produksi tidak tersebar secara merata dikalangan rakyat, maka dalam

---

<sup>11</sup> Hakim Nusantara, A " Identitas Hukum ekonomi Indonesia dalam Perspektif sejarah, identitas hukum nasional, UII Press Yogyakarta, 1997.

kenyataannya pemerataan kemakmuran terlihat berkurang dikalangan anggota masyarakat<sup>12</sup> Pemerataan kemakmuran rakyat dicapai melalui pemerataan sumber daya dan alat-alat produksi, dan bukan pembagian kembali hasil produksi. Apabila hal ini tidak sama, maka diperkirakan akan mengurangi hambatan yang sering terjadi akibat kekayaan negeri dan alat-alat produksi dikuasai sekelompok kecil orang. Oleh sebab itu, maka dalam rangka memeratakan kemakmuran bagi rakyat, maka yang penting adalah melakukan upaya-upaya meratakan secara relatif, sumber daya, kekayaan negara, dan alat-alat produksi sehingga membuka lapangan kerja bagi seluruh rakyat.

Pemikiran strukturalistik mengemukakan diperlukannya intervensi dalam mekanisme pasar. Hal ini diperlukan dalam menentukan koreksi terhadap ketidak sempurnaan pasar. Selanjutnya intervensi terhadap sistem ekonomi secara gradual / berangsur-angsur<sup>13</sup>.

Berbeda dengan pemikiran strukturalistik tradisional yang tidak melakukan reformasi struktur kekuasaan dan struktur sosial secara bersama-sama.

Kasus yang terjadi di Amerika Latin dimana krisis ekonomi terjadi berulang kali mendorong para pemikir ekonomi merubah cara melaksanakan reformasi dari pemikiran secara klasikal Strukturalisme ( strukturalis klasik) ke pemikiran secara neostrukturalisem mengemukakan aspek yang berkaitan

---

<sup>12</sup> Soebirin Sumawiyata, Ekonomi kerakyatan Prisma No. 8/1995 Tahun XIV, Jakarta 1985

<sup>13</sup> Srio tua Arief, Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan, CIDIES, 1996.



dengan peranan pemerintah dalam pembangunan suatu negara. Berdasarkan pemikiran neostructuralisem pemerintah diharapkan tidak mengintervensi pasar.

Di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 9 / 1995 tentang Usaha Kecil pemerintah memberikan kekuatan hukum terhadap hak dan kewajiban berusaha, agar dapat meningkatkan usaha.

Tujuan peningkatan peran pengusaha kecil yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 9 / 1995 tentang Usaha Kecil adalah untuk dapat berkembang menjadi pengusaha menengah.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang makin meningkat yang merupakan salah satu aspek yang dituju dalam pembangunan perekonomian dalam suatu negara, akan membuka pula lapangan kerja dan kesempatan kerja sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Untuk hal ini dapat dikemukakan beberapa pendapat para pakar tentang peningkatan ekonomi negara.

Rostow mengemukakan beberapa proses perkembangan ekonomi. Menurut dia perkembangan ekonomi dapat dikategorikan dalam lima tahapan, yang biasanya dialami suatu negara<sup>14</sup>.

1. Masyarakat tradisional ( traditional society)
2. Masyarakat tinggal landas ( the precondition for take off)
3. Lepas landas ( the take off)

---

<sup>14</sup> Yeane Neltje Saly, SH.MH, op.cit hal.20

4. Gerakan kearah kedewasaan ( the drive to maturity )
5. Masa konsumsi tinggi ( the age of high mass consumption)

Rostow mengatakan bahwa perkembangan ekonomi suatu negara harus melalui tahapan tradisional menuju ke tahapan industrialisasi. Usaha untuk menuju pada tahapan ini penting dilakukan agar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui mobilisasi tabungan dalam negeri, dan bantuan luar negeri, agar dapat meningkatkan investasi.

Menurut Atrhur Lewis dan Hollis Chenery yang mengemukakan tentang pola perubahan struktur, dan perkembangan ekonomi negara berkembang melalui mekanisme transformasi struktur perekonomian dari pertanian subsistem keperkembangan ekonomi yang lebih modern berupa manufaktur dan jasa<sup>15</sup>.

Selanjutnya Chenery mengemukakan bahwa perubahan tingkat pembangunan ekonomi dapat dilakukan melalui tahapan:

1. Perubahan proses akumulasi yang mencakup pembentukan modal, pendapatan pemerintah dan pendidikan.
2. Perubahan proses ekonomi sumber daya yang melingkupi struktur permintaan domestik struktur produksi, dan struktur perdagangan dan
3. Perubahan proses demografi dan distribusi pendapatan<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Yeane Neltje Saly, S.H.,M.H., ibid hal. 20.

<sup>16</sup> Mangkuprawiro,SH perkembangan perekonomian dalam pembangunan suatu negara Ghalia Indonesia, jakarta 1996.

Indonesia saat ini sedang mengalami pergeseran dari sektor industri yang terlihat dalam peningkatan kontribusi sektor industri terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) nasional disertai penurunan kontribusi sektor pertanian.

Pertumbuhan industri yang meningkat tidak diiringi oleh kemampuan sektor ini menyerap tenaga kerja dari sektor pertanian.

Menurut buku Todoro tahun 1994 Lewis mengemukakan tentang sektor perekonomian negara berkembang terdiri dari dua, sektor tradisional yaitu sektor pedesaan subsistem dengan jumlah penduduk yang besar, produktivitas marginal tenaga kerja nol, dan sektor industri perkotaan moderen yang memiliki produktivitas tinggi sebagai tempat penampungan aliran tenaga kerja dari sektor tradisional.<sup>17</sup>

Di Indonesia saat ini sedang mengalami pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri yang terlihat dalam peningkatan kontribusi sektor industri terhadap P D B ( Pendapatan Domestik Bruto ) nasional disertai pemenuhan kontribusi sektor pertanian. Dalam kenyataannya pertumbuhan industri yang meningkat tidak diiringi oleh kemampuan sektor ini menyerap tenaga kerja dari sektor pertanian.

---

<sup>17</sup> Todoro, Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid I , terjemahan Ir. Baharudin Abdulah dan Haris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1994. Todoro , Michael " De Development Planing Model and Method. Oxford University Press, Nairobi, 1978.

Pada tahun 1984 – 1991 PDB sektor pertanian berkembang rata-rata 3% per-tahun, dan kontribusi terhadap pendapatan nasional menurun dari 22% menjadi 18 %. Kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan kesempatan kerja menurun dari 55% menjadi 45% dan kemampuan sektor industri menyerap tenaga kerja hanya meningkat dari 9.3 % menjadi 13 %. Ketidakmampuan sektor industri menyerap tenaga kerja disebabkan bahan baku yang dipergunakan adalah bahan baku impor, dan bukan bahan dalam negeri dan bukan argoindustri (Data BPS 1992).

Dalam program pembangunan ekonomi yang menggunakan sistem demokrasi ekonomi, maka diharapkan agar seluruh lapisan masyarakat menikmati hasil pembangunan melalui peran sertanya.<sup>18</sup>

Kegiatan Usaha Kecil yang dilandasi oleh undang-undang No. 9 Tahun 1995 dengan mengingat Pasal 33 UUD 1945, dikategorikan atas prinsip kekeluargaan. Usaha Kecil dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik apabila para pelaku dapat mampu melaksanakan fungsinya secara baik dan optimal yang ditunjang oleh politik/kebijaksanaan ekonomi yang memadai guna merangsang dan mengarahkannya.<sup>19</sup>

## **II. Pembiayaan dan Penjaminan.**

---

<sup>18</sup> Arifin Siregar, *"Prolog Dalam Sumber Daya Manusia, Kesempatan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi"*, FE UI Press, Jakarta 1992.

<sup>19</sup> Mubyarto, *"Sistem dan Metode Ekonomi Indonesia LP3S"* Jakarta, 1994.

A. Pembiayaan dapat disediakan oleh pemerintah, dunia usaha, juga oleh masyarakat. Pembiayaan tersebut dapat dilakukan melalui kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal venture, pinjaman dari dana penyerahan sebagian laba badan usaha milik negara (BUMN), hibah, dan jenis pembiayaan lainnya, yaitu dana sumbangan dari masyarakat termasuk dana dari Usaha Besar Swasta dan sebagainya.

Untuk meningkatkan akses Usaha Kecil terhadap pembiayaan tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan peningkatan kemampuan dalam pemupukan modal, penyusunan study kelayakan, management keuangan, dan menumbuh-kembangkan lembaga penjaminan. Namun kenyataan dalam masyarakat usaha-usaha pemerintah seperti apa yang tertuang dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil tersebut sampai saat ini belum dapat dilaksanakan. Sebaliknya pengusaha Kecil yang ingin mengembangkan usahanya tetap terbentur pada masalah pendanaan.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1 menyebutkan : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Melihat fungsi Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dapat diketahui pula dari ketentuan pasal 3 Undang-undang tersebut yang berbunyi sebagai berikut :  
"Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur

dana masyarakat". Penyaluran dana (Fund Lending) adalah kegiatan usaha meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit (hutang). Menurut ketentuan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan :

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Jadi menyalurkan dana adalah memberikan kredit<sup>20</sup> .

## **B. Penjaminan**

Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank.

Pada dasarnya dalam perbankan tidak mungkin ada suatu kredit tanpa agunan, meskipun didalam undang-undang nomor 7 Tahun 1992 masalah jaminan tidak secara tegas disebutkan. <sup>21</sup>Istilah jaminan sebenarnya tidak di definisikan dengan tegas dalam Undang-undang Nomor 7

---

<sup>20</sup> Prof. Abdul Kadir Muhammad, S.H., Rilda Murniati, S.H.,M.Hum. "*Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hal. 58.

<sup>21</sup> DR. Sri Gambir Melati Hatta, S.H. Pelangi Hukum Bisnis hal 6.

tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang selanjutnya disebut Undang-undang perbankan;.

## **F. Metode Penelitian**

Penulisan tesis ini membutuhkan data yang akurat berupa data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang mendukung pengkajian data sekunder, dengan demikian permasalahan pokok dapat dijawab dari data-data tersebut.

Untuk memperoleh data yang dimaksud, Penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode pendekatan;

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, di samping itu berusaha menelaah kaedah-kaedah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

2. Metode sampling.

Penentuan subyek penelitian dilakukan dengan cara purposive sampling atau sampling bertujuan .

Digunakannya metode ini adalah untuk mendiskripsikan suatu gejala sosial atau masalah sosial tertentu.<sup>22</sup> Purposive disini maksudnya subyek penelitian dikelompokkan berdasarkan keterlibatan mereka dalam praktek penggunaan kredit usaha kecil yang menyangkut agunannya.

Subyek penelitian dalam hal ini antara lain :

1. Pihak kreditur, yaitu bank yang memberikan kredit kepada pengusaha golongan ekonomi lemah.
2. Pihak Debitur, adalah pihak yang menerima kredit dari bank khususnya dalam usaha kecil ( pengusaha golongan ekonomi lemah).
3. Notaris yang merupakan pihak yang membuat perjanjian hutang-piutang atau Akte Perjanjian kredit.

#### 1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Depok dan sekitarnya karena lokasi ini merupakan Kota yang baru berkembang dengan Usaha Kecil yang terus tumbuh dan transaksi perbankan yang begitu pesat, termasuk didalamnya transaksi kredit usaha kecil, dengan berbagai jaminan.

#### 2. Metode pengumpulan data

Data yang diperlukan untuk penulisan tesis ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan

---

<sup>22</sup> Koentjoroningrat, metode-metode penelitian masyarakat Jakarta PT Gramedia, 1981 hal 115.



1. Penelitian kepustakaan ( library research).

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yang meliputi :

a. Bahan hukum primer, yang terdiri atas :

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 22 / 81/KEP/DIR tanggal 29 Januari 1990 tentang penyempurnaan sistim perkreditan.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30 /4/KEP/Dir tanggal 4 April 1997 tentang pemberian Kredit Usaha Kecil.
- Peraturan Bank Indonesia No. 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil.

b. Bahan hukum sekunder terdiri atas :

- Karya ilmiah

- Penelitian dibidang aspek hukum jaminan
- Hasil pertemuan ilmiah
- c. Bahan hukum tersier, terdiri atas :
  - Kamus hukum
  - Kamus Bahasa Indonesia

## 2. Penelitian lapangan ( *Field Research* )

Untuk mencari data guna menunjang data sekunder yang telah diperoleh pada study dokumen dan kepustakaan, diperlukan study lapangan ke instansi atau lembaga yang terkait dengan pelaksanaan pemberian kredit perbankan kepada pengusaha kecil. Apa ada kendalanya /hambatannya. Untuk kebutuhan tersebut diatas dalam penelitian lapangan ini digunakan tehnik :

### a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan pedoman wawancara yang terstruktur maupun wawancara bebas dan mendalam dengan informal untuk mempermudah dalam memperoleh data yang diteliti. Untuk mendukung pelaksanaan wawancara, peneliti menggunakan tape recorder dan catatan harian dilapangan.

### b. Kuesioner

Kuesioner diberikan kepada subyek penelitian. Didalam tiap-tiap kuesioner dimuat daftar pertanyaan untuk mengungkap pemahaman subyek penelitian terhadap jaminan, baik dalam teori maupun dalam praktek serta bagaimana kedudukannya setelah mendapatkan kredit dari bank. Apa ada kesulitannya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari empat bab.

Bab I Berisi gambaran umum mengenai isi tesis, Bab II merupakan tinjauan pustaka, Bab III merupakan penguraian hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian, Bab IV merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KREDIT PERBANKAN PADA USAHA KECIL

#### A. Pengertian Kredit Perbankan

##### 1. Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.<sup>22</sup>

Dengan demikian prestasi dan kontraprestasi dapat berbentuk sebagai berikut :

- Barang terhadap barang
- Barang terhadap uang
- Barang terhadap jasa
- Jasa terhadap jasa
- Jasa terhadap uang

---

<sup>22</sup> Drs. Thomas Suyatno. Drs. H.A.Chalik, Drs. Made Suhada, Akt, MA. Dra C.Trio Yuniati Ananda. Djuhaepah T. Marala, MBA, "Dasar-Dasar Perkreditan" Edisi keempat, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Umum, 1999. hal 12.

- Jasa terhadap barang
- Uang terhadap uang
- Uang terhadap barang
- Uang terhadap jasa

Dengan akan diterimanya kontraprestasi pada masa yang akan datang, maka jelas tergambar bahwa kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang ,baik dalam bentuk barang,uang,maupun jasa<sup>23</sup>. Dalam hal ini faktor waktu merupakan faktor utama yang memisahkan prestasi dan kontraprestasi. Dengan demikian kredit itu dapat pula berarti bahwa salah satu pihak dapat memberikan prestasi baik berupa barang, uang, atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontra prestasinya akan diterima kemudian dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan.

Kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan dalam arti apabila seseorang atau sesuatu badan usaha mendapatkan fasilitas kredit dari bank, maka orang atau suatu badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa;

---

<sup>23</sup> Ibid, hal 12.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>24</sup>

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kredit hanya dapat diberikan kepada debitur yang dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi kewajiban mengembalikan kewajibannya atau kemampuannya untuk memenuhi prestasi suatu perikatan. Demikian pula dapat diketahui bahwa pemberi kredit sebagaimana dimaksud Undang-Undang tersebut adalah Bank, yaitu lembaga keuangan yang merupakan Badan Hukum yang pendirian tempat kedudukan dan organisasinya diatur berdasarkan Undang-Undang.

Kenapa justru uang yang sering kita jumpai dalam praptek perkreditan ? Karena uang dalam transaksi kredit lebih mudah / lancar dalam pelaksanaan kredit jika dibandingkan dengan barang dan jasa, terutama untuk mengukur pembayaran dihari yang akan datang. Disinilah letaknya jasa dari salah satu fungsi uang yaitu sebagai *standard of deferred payment*. Disamping itu uang juga mempunyai fungsi sebagai *store of value*.

---

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Secara umum kredit diartikan sebagai "*The ability to borrow on the opinion conceived by the lender that he will be repaid*"<sup>25</sup>

Di dalam perpustakaan Hukum Perdata terdapat beberapa pendirian mengenai arti kredit itu :

1. Savelberg<sup>26</sup> menyatakan "Kredit" mempunyai arti antara lain :
  - Sebagai dasar dari setiap perikatan (*Verbintenis*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.
  - Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (*Commodatus, depositus, regulare, pignus*)
2. Levy<sup>27</sup>, merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut :

Menyerahkan secara suka rela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari

Kalau ajaran Levy sudah menunjukkan kepada pengkhususan arti hukum dari "Kredit" yakni perjanjian pinjam uang. Kreditur percaya meminjamkan uang

---

<sup>25</sup> Bouvier,s Law Dictionary A-K, West Publishing Company 1914, hal 725, Dalam "perjanjian kredit bank" Prof.Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H. Alumni hal.21.

<sup>26</sup> H.M.A. Savelberg, *de credit Hypotheek*, diss, 1885, hal. 33 dalam Prof.Dr.Mariam Darus Badruzaman, S.H. Ibid hal 21

<sup>27</sup> Mr. J.A. Levy, *Rekening Courant 1873*, hal 192 dalam Prof.Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., ibid hal 21

kepada debitur oleh karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk mengembalikan pinjaman itu dibelakang hari. Ukuran yang dipergunakan Levy untuk kepercayaan itu adalah "Kemampuan Ekonomi" debitur.

3. M. Jakile<sup>28</sup>.

Beliau mengemukakan bahwa kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti rugi dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu.

Selanjutnya beliau berkata bahwa dari definisi ini dapat disimpulkan 4 (empat) elemen yang penting pula yaitu :

- Tidak seperti hibah, transaksi kredit mensyaratkan peminjam dan pemberi kredit untuk saling tukar menukar sesuatu yang bernilai ekonomis.
- Tidak seperti pembelian secara kontan transaksi kredit mensyaratkan debitur untuk membayar kembali kewajibannya pada suatu waktu dibelakang hari.
- Tidak seperti hibah maupun pembelian secara tunai, transaksi kredit akan terjadi sampai pemberi kredit bersedia mengambil resiko bahwa pinjamannya mungkin tidak bisa dibayar.

---

<sup>28</sup> M. Jakile, Kata Pengantar Majalah Bank Medan 1974, hal. 9 dalam Prof.Dr. Mariam Darus Badruzaman, ibid hal 22



- Begitu jauh ia bersedia menanggung resiko, bila pemberi kredit menaruh kepercayaan terhadap peminjam. Resiko dapat dikurangi dengan meminta kepada peminjam untuk menjamin pinjaman yang diinginkan, meskipun sama sekali tidak dapat dicegah semua resiko kredit.
- 4. Menurut Prof. Dr. Mariam Darus BadrulZaman, SH. Kredit itu benar bukan hibah sebab hibah adalah perbuatan cuma-cuma dan bukan jual-beli, karena didalam jual-beli pihak penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar sejumlah uang. Tetapi beliau tidak sependapat kalau kredit digolongkan kedalam perjanjian tukar-menukar, sebab kredit adalah penyediaan uang untuk dipinjamkan kepada penerima kredit.<sup>29</sup>
- 5. Raymond P. Kent dalam buku karangannya *money and Banking* mengatakan "Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melaksanakan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang sekarang"<sup>30</sup>

## 2. **Unsur-unsur kredit.**

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul betul yakin bahwa sipenerima kredit akan

---

<sup>29</sup> Prof. Dr. Mariam Darus BadrulZaman, S.H., perjanjian Kredit, op cit hal 23.

<sup>30</sup> Drs Thomas Suyatno dkk op cit hal 13.

mengembalikan pinjaman yang telah disetujui oleh kedua pihak. Tanpa adanya keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya<sup>31</sup>.

Penyaluran dana ( fund lending ) adalah kegiatan usaha meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit ( hutang )

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang no 10 tahun 1998 :

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu ,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga"

Jadi menyalurkan dana adalah memberikan kredit.<sup>32</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, secara yuridis dapat dirincikan dan dijelaskan unsur-unsur kredit sebagai berikut :

- a. Penyediaan uang sebagai hutang oleh pihak bank
- b. Atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang sebagai pembiayaan ,misalnya pembiayaan pembuatan rumah ,pembelian kendaraan.
- c. Kewajiban pihak peminjam (debitur)melunasi hutangnya menurut jangka waktu ,disertai pembayaran bunga.

---

<sup>31</sup> Drs. Thomas Suyatno dkk, op.cit, hal 14.

<sup>32</sup> Prof Abdulkadir Muhammad .SH, Rilda Musmiati.SH .M Hum."op cit hal 58

d. Berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam uang antara Bank dan peminjam (debitur) dengan persyaratan yang disepakati bersama

Apabila ditelaah dengan teliti secara konseptual, maka dalam konsep kredit selalu terkandung unsur-unsur esensial sebagai berikut :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan nya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Ini berarti bahwa setiap pelepasan kredit, dilandasi dengan adanya keyakinan oleh Bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Setelah permohonan kredit dianalisis oleh bank, maka bank yakin kredit yang akan diberikan itu dapat dikembalikan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama.
- b. Waktu, yaitu suatu waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang. Ini berarti bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu

- c. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidak tentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbul jaminan dalam pemberian kredit. Jaminan dalam pemberian kredit disebut dengan agunan.
- d. Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang dan jasa. Namun karena kehidupan moderen sekarang didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uang lah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan. Inilah yang disebut dengan bunga bank.
- e. Kesepakatan, semua persyaratan pemberian kredit dan prosedur pengembalian kredit serta akibat hukumnya adalah hasil kesepakatan dan dituangkan dalam akta perjanjian yang disebut kontrak kredit.

### 3. **Fungsi Kredit.**

Dalam kehidupan perekonomian yang moderen, bank memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, organisasi – organisasi bank selalu diikuti sertakan dalam menentukan kebijakan dalam bidang moneter,

pengawasan devisa, pencatatan efek- efek, dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena bank dalam usahanya adalah memberikan kredit, dan kredit yang diberikan bank mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam segala bidang kehidupan, khususnya dibidang ekonomi.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut<sup>33</sup>:

- a. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
  1. Para pemilik uang / modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.
  2. Para pemilik uang / modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga- lembaga keuangan . Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan- perusahaan untuk meningkatkan usahanya.
- b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu – lintas uang.

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran seperti cek, giro bilyet, dan wesel, sehingga apabila pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet, dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Di samping itu kredit yang ditarik secara tunai dapat meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.

---

<sup>33</sup> Drs. Thomas Suyatno dkk. Op.cit. hal 16

- c. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Di samping itu kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ketempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.

- d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas nasional ekonomi.

Dalam hal keadaan ekonomi kurang baik, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha misalnya :

1. untuk pengendalian inflasi.
2. Peningkatan ekspor.
3. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

Untuk menekan laju inflasi pada tahun 1966, yang lebih kurang 650%, pemerintah melaksanakan kebijakan uang ketat (tigh money policy) melalui pemberian kredit yang selektif dan terarah, untuk melindungi usaha-usaha yang bersifat nonspekulatif.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Drs. Thomas Suyatno dkk. Op. Cit hal 17

Kredit hanya diberikan pada sektor-sektor yang produktif, dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa diekspor.

- e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun ada kalanya terhambat dengan permodalan. Dengan adanya bantuan kredit perbankan akan dapat mengatasi masalah kekurangan modal tersebut, sehingga pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

- f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dengan adanya kredit dari bank, pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut, sehingga mereka akan memperoleh pendapatan.

Apabila perluasan usaha dan pendirian proyek telah selesai untuk mengelola diperlukan juga tenaga kerja. Sehingga dengan demikian akan menyebabkan adanya pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

- g. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Bank-bank besar di luar negeri mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara

langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan didalam negeri.

Negara-negara maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan dalam bentuk kredit ini dapat pula mempererat hubungan ekonomi antara negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan Internasional.

#### **4. Tujuan Kredit**

Tujuan kredit disuatu Negara berbeda dengan negara lain tergantung dari falsafah yang dianut oleh suatu negara tersebut. Di negara-negara liberal, tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan semata sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan, yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar-besarnya.

Oleh karena pemberian kredit dimaksud untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari faktor kemampuan dan kemauan tersebut,tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga



unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit. Kedua unsur tersebut saling berkaitan.

Keamanan atau *safety* yang dimaksud adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan/*profitability* yang diharapkan itu akan dapat menjadi kenyataan. Keuntungan atau *profitability* merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima.

Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian maka tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai *agent of development* adalah untuk turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan, meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat serta untuk memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

Dari tujuan tersebut, tersimpul adanya kepentingan yang seimbang antara : Kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat (rakyat), dan kepentingan pemilik modal (pengusaha). Dengan demikian pemberian kredit perbankan di Indonesia harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pemberian kredit harus sesuai dengan kebijakan moneter dan ekonomi.
- 2) Pemberian kredit harus selektif dan diarahkan kepada sektor-sektor yang diprioritaskan.
- 3) Bank dilarang memberikan kredit kepada usaha-usaha yang diragukan *bank ability-nya*.
- 4) Setiap kredit harus diikat dengan suatu perjanjian kredit (akad kredit).
- 5) *Overdraft* (penarikan uang dari bank melebihi saldo giro atau melebihi plafon kredit yang di setujui) dilarang.
- 6) Pemberian kredit untuk pembayaran kembali kepada pemerintah dilarang (kredit untuk membayar pajak dan bea cukai).
- 7) Kredit tanpa jaminan dilarang ( pertimbangan keamanan *dan safety* ).

## **5. Jenis-jenis Kredit**

Dalam undang-undang Perbankan tahun 1972 tidak menyinggung tentang jenis kredit. Namun dalam praktek perbankan kredit-kredit yang pernah diberikan kepada para nasabahnya dapat dilihat dari berbagai segi menurut:

1. Jangka waktunya,
2. Kegunaanya,
3. Pemakaiannya,
4. Sektor yang dibiayai.

### **5.1. Kredit dilihat dari jangka waktunya.**

Dari segi jangka waktunya terdapat tiga macam kredit berdasarkan Undang-undang no 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan yaitu: kredit jangka panjang, kredit jangka menengah dan kredit jangka pendek. Ketiga jenis kredit itu walaupun sudah berlaku Undang-undang tahun 1972, namun pelaksanaannya kini tidak menjadi masalah, karena jangka waktu kredit dipandang dari pemakaiannya masih belum ada pembatasan yang pasti. Hal ini disebabkan karena pengertian tentang lamanya pemakaian suatu kredit ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan nasabah untuk memakai dan mengembalikannya pada suatu waktu tertentu.<sup>35</sup>

1. Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu paling lama satu tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.
2. Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kecuali kredit untuk musiman tersebut.
3. Kredit jangka panjang adalah kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan

---

<sup>35</sup> Mgs. Edy Putra Tje " Aman, S.H. " Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis "Yogyakarta, Libery, 1989, hal 5.

dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi dan pendirian proyek baru.

## **5.2. Kredit menurut kegunaannya.**

Dilihat dari kegunaannya maka kredit dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit profesi.

1. Kredit investasi adalah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitasi perusahaannya. Misalnya kredit yang diberikan kepada perusahaan angkutan dimana kredit tersebut dipakai untuk membeli sejumlah kendaraan maupun untuk memperbaiki beberapa kendaraannya.
2. Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah. Kredit bank dipakai untuk membeli bahan dasar, alat –alat bantu, maupun membayar biaya lainnya.
3. Kredit profesi, kredit ini diberikan bank kepada nasabahnya semata-mata untuk kepentingan profesinya. Misalnya kredit yang diberikan kepada seorang dokter gigi untuk membeli peralatan

medis. Meskipun namanya kredit profesi tapi tidak berbeda dengan kredit investasi. Yang berbeda hanya status nasabah.<sup>36</sup>

### **5.3 Menurut Pemakaiannya**

Menurut pemakaiannya kredit dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif.

#### **1. Kredit konsumtif**

Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya kredit yang diberikan untuk membeli alat-alat rumah tangga. Semua barang-barang yang dibiayai bank itu tujuannya untuk dipakai sampai habis oleh nasabah.

#### **2. Kredit produktif**

Kredit produktif ini adalah kredit bank yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan usaha agar produktifitasnya akan meningkat.

Bentuk kredit produktif dapat berupa kredit investasi maupun kredit modal kerja, karena kedua kredit tersebut diberikan kepada nasabah untuk meningkatkan produktifitas usahanya.

Kredit profesi tidak dapat dimasukkan ke kredit produktif, karena kemampuan nasabah yang menerima kredit profesi

---

<sup>36</sup> Gatot Supramono, S.H., "Perbankan dan Masalah Kredit, Jakarta, Penerbit Jembatan, 1997, Hal. 46

sangat terbatas sekali sehingga sulit diharapkan produktifitasnya meningkat dengan pesat.<sup>37</sup>

Kalau seorang dokter gigi mendapat kredit profesi untuk membeli kursi untuk mengobati pasien 5 (lima) buah, maka ia tidak mampu mengobati pasien sekaligus lebih dari seorang. Jadi di sini dasarnya nasabah ini tidak mungkin dapat berkembang usahanya secara kuantitatif.

#### **5.4 Menurut sektor yang dibiayai**

Di samping macam-macam kredit yang telah disebutkan di atas, ada beberapa macam kredit yang diberikan kepada nasabah dilihat dari sektor yang dibiayai seperti : kredit perdagangan, kredit pemborongan, kredit pertanian, kredit peternakan, kredit perhotelan, kredit percetakan, kredit pengangkutan, kredit perindustrian.<sup>38</sup>

### **6. Pertimbangan Pemberian Kredit**

Apabila bank menerima permohonan kredit dari nasabah, bank perlu melakukan analisis kredit lebih dahulu. Analisis kredit meliputi :

- a. latar belakang nasabah;
- b. prospek usaha yang akan dibiayai;
- c. jaminan yang diberikan;

---

<sup>37</sup> Ibid, Hal. 47

<sup>38</sup> Ibid, Hal. 47

d. hal-hal lain yang ditentukan oleh bank.

Tujuan analisis kredit adalah untuk meyakinkan bank bahwa kredit yang dimohonkan itu adalah layak dan dapat dipercaya serta tidak fiktif.

Atas dasar hasil analisis kredit, bank memberikan pertimbangan dengan hati-hati apakah permohonan nasabah tersebut layak untuk dikabulkan.

Hal ini perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh mengingat resiko kemungkinan kredit sulit dilunasi dan cenderung macet. Adapun dasar pertimbangan pemberian kredit adalah hasil penilaian berdasarkan konsep 5C.<sup>39</sup>

**a. *Character* (Watak)**

Penilaian terhadap karakter perlu dilakukan untuk mengetahui itikad baik dan kejujuran nasabah calon debitur untuk membayar kembali kredit yang diterimanya. Penilaian watak calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kemauannya untuk membayar. Penilaian tersebut meliputi modal, sifat, perilaku, tanggung jawab, dan kehidupan pribadi calon debitur yang sangat berpengaruh terhadap pelunasan kredit.

---

<sup>39</sup> Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., Pilda Murniati, S.H., M.Hum, *Op.cit* hal 61.

b. ***Capacity*** (Kemampuan)

Penilaian terhadap *capacity* perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur untuk membayar kembali kredit serta bunganya.

Penilaian kemampuan membayar tersebut dilihat dari kegiatan usaha dan kemampuan mengelola usaha yang akan dibiayai melalui kredit.

c. ***Capital*** (modal)

Penilaian terhadap *capital* perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah modal yang dimiliki calon debitur cukup memadai untuk menjalankan usahanya. Makin besar jumlah modal yang ditanam oleh calon debitur kedalam usaha yang akan dibiayai dengan kredit makin menunjukkan keseriusan calon debitur menjalankan usahanya. Besarnya jumlah modal yang ditanam terutama berupa benda bergerak dan tidak bergerak akan memberi daya tahan usaha dalam menghadapi siklus atau fluktuasi ekonomi.

d. ***Collateral*** (Jaminan)

Penilaian terhadap *collateral* perlu dilakukan untuk mengetahui nilai barang jaminan yang diserahkan calon debitur untuk menutupi resiko kegagalan pengembalian kredit yang akan diperolehnya. Barang jaminan berfungsi sebagai pengaman terhadap kemungkinan ketidakmampuan calon debitur melunasi kredit yang diterimanya.



Di dalam memilih jaminan dalam rangka memberikan kredit, biasanya pihak perbankan akan memilih jaminan yang paling aman dan baik, yaitu :

- a. Secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan, baik hak kepemilikannya maupun dokumen jaminan tersebut.
- b. Tidak melemahkan potensi dan posisi pencari kredit untuk meneruskan usahanya.
- c. Memberikan kepastian kepada pemberi kredit bahwa agunan atau jaminan mudah disita dan diuangkan untuk melunasi hutangnya.

Menurut praktek yang sedang berkembang saat ini, kualitas barang jaminan dapat dilihat dari apa yang disebutnya sebagai MAST, yaitu :<sup>40</sup>

1. Marketability, artinya barang jaminan itu mudah dipasarkan.
2. Ascertainability of value, artinya bahwa ada standart harga tertentu untuk barang jaminan itu.
3. Stabily of value, artinya bahwa barang jaminan itu mampu stabilitas nilai di masa mendatang.
4. Transfer ability, artinya bahwa barang jaminan itu mudah dipindah tangankan.

Dilihat dari jenis jaminan, maka jaminan kredit dibedakan antara jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan Perorangan

---

<sup>40</sup> Zudan Arif Fakrullah, S.H.,M.H. H. Hadi Wuryan, S.H.,CN.,M.H. "Hukum Ekonomi, Buku Kesatu" Surabaya, Karya Abditama, 1997 hal. 91

yaitu jaminan seseorang atau badan hukum pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur tanpa sepengetahuannya.

Jaminan ini hanya memberikan hak perorangan (*Persoonlijke Recht*). Jaminan Kebendaan (*Zakelijke Zekerheid*) adalah jaminan berupa benda yang memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya (bank), berarti bersifat *Droit de Suit* serta hak prioritas/preference. Karena dengan jaminan kebendaan menempatkan bank sebagai kreditur preference yang lebih terlindungi dan mudah merealisasikan haknya maka dalam praktek bank, sering digunakan.

e. *Condition* (Keadaan)

Penilaian terhadap *condition* perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi pada suatu saat disuatu daerah yang mungkin akan mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur.

Kondisi ekonomi ini mencakup juga peraturan atau kebijaksanaan pemerintah yang memiliki dampak terhadap keadaan perekonomian yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan usaha calon debitur.

Selain penilaian berdasarkan konsep 5C, ada lagi penilaian kredit terhadap beberapa aspek yang menyangkut kegiatan usaha calon debitur seperti berikut :

1. Aspek pemasaran;
2. Aspek teknis;

3. Aspek manajemen;
4. Aspek yuridis;
5. Aspek sosial-ekonomi.

## **7. Perjanjian Kredit**

Pengertian kredit seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditentukan kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, namun dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan apakah bentuk persetujuan pinjam-meminjam itu secara tertulis atau secara tidak tertulis. Namun kalau kita lihat pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam didalam definisi atau pengertian kredit sebagaimana dimaksud pasal tersebut, dapat mempunyai beberapa maksud sebagai berikut :<sup>41</sup>

1. Bahwa pembentuk Undang-Undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitur yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan demikian bagi hubungan kredit bank berlaku Bab XIII buku III KUH Perdata.

---

<sup>41</sup> Dr. Sutan Remy Syahdeini, SH, "Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak Dalam perjanjian Kredit Bank di Indonesia", Seri Hukum Perbankan ISBN 979-8458-02-8 Institut Bankir Indonesia 1993, hal 180

2. Maksud yang lain dari pembentuk Undang-Undang yang dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Perbankan 1992 itu ialah bahwa pembentuk Undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis.

Ketentuan ini dapat juga dikaitkan dengan Instruksi Presidium Kabinet nomor 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 jo. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539.UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/649 UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Ampera. No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, yang menentukan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan / membuat akad perjanjian kredit.

Dengan menyebutkan dalam ketentuan-ketentuan itu bahwa bank-bank wajib mempergunakan/ membuat akad perjanjian kredit, maka dunia perbankan telah menafsirkan bahwa perjanjian kredit bank harus dilaksanakan secara tertulis. Dalam praktek perbankan di Indonesia, bank-bank membuat perjanjian kredit dengan dua bentuk atau cara yaitu :

1. Perjanjian kredit berupa akta dibawah tangan
2. perjanjian kredit berupa Akta Notaris.

Perjanjian kredit diatas pada umumnya dibuat berdasarkan bentuk perjanjian baku, dimana kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah

menandatangani suatu perjanjian yang sebelumnya sudah dipersiapkan isi atau klausul-klausulnya dalam suatu formulir yang telah dicetak.

Dalam hal perjanjian kredit dibuat dengan akta notaris, maka bank akan meminta notaris berpedoman pada model perjanjian kredit dari bank yang telah dipersiapkan oleh bank yang bersangkutan.

### **7.1. *Akta/Perjanjian Kredit di Bawah Tangan***

Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit di bawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya dibuat di antara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris.

Bahkan lazimnya dalam penandatanganan akta perjanjian kredit tersebut tanpa adanya saksi yang turut serta dalam membubuhkan tandatangan. Padahal sebagaimana diketahui bahwa saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata.

### **7.2 *Akta/Perjanjian Kredit Notaril (Otentik)***

Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit notaril (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau di hadapan notaris. Mengenai definisi akta otentik dapat dilihat pada Pasal 1868 KUH Perdata.

### **7.3 *Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Baku.***

Perjanjian kredit yang dibuat baik dengan akta di bawah tangan maupun akta notaris, pada umumnya di buat dengan bentuk

perjanjian baku yaitu dengan cara kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah, menandatangani suatu perjanjian yang sebelumnya telah dipersiapkan atau klausul-klausulnya oleh bank dalam suatu formulir cetak.<sup>42</sup>

Perjanjian baku kemudian menimbulkan hal-hal yang negatif dalam arti pihak yang mempunyai bargaining position yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, dan pihak yang kuat mendapatkan keuntungan dari tindakannya tersebut. Dalam perkembangannya di berbagai yurisdiksi, negara campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah baik melalui keputusan pengadilan maupun dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan legislatif.

Dalam kaitan tersebut muncullah aturan-aturan dasar yang harus diperhatikan bagi suatu perjanjian tertulis yang tidak ditandatangani (*unsigned written agreement*) yang mengandung syarat-syarat baku<sup>43</sup>, asas *duty to read*<sup>44</sup> yang berlaku di Amerika Serikat sebelum tahun 1960-an bagi dokumen-dokumen yang ditandatangani, dan

---

<sup>42</sup> Ibit hal 182.

<sup>43</sup> Lihat Mahesh M. Kumar, *Control of exclusion Clauses in England and India*. Kent. England : Ravenswood Publications, 1985, hal. 24 et seq ; A.G. Guest [et al] (Eds). *Chitty on Contracts Vol.III* London Sweet & Maxwell, 1989, hal. 498 et seq; G.H. Treitel. *The Law of Contract*, Seventh Edition, London : Stevens & Sons, 1987 Hal.167 et seq

<sup>44</sup> John D. Calamari & Joseph M. Perillo . *The Law of Contracts*. Third Ed.Hombook Series .St. Paul , Minnesota :West Publishing Co,1987 ,hal .409 et seq

asas publik policy,<sup>45</sup> serta asas unconscionability<sup>46</sup>. Uraian mengenai asas-asas ini membawa kita kepada asas yang terdapat pula dalam hukum perjanjian Indonesia, yaitu antara lain asas ketertiban umum, asas kepatutan dan asas itikad baik sebagaimana tercantum dalam pasal 1339 dan Pasal 1338 KUH Perdata.<sup>47</sup>

Kebebasan berkontrak adalah kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyusun dan menyetujui klausul-klausul dari perjanjian tersebut, tanpa campur tangan pihak lain.

#### 7.4 Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pendahuluan.

Di dalam praktek, istilah kredit juga dipergunakan untuk penyerahan uang, sehingga jika kita menggunakan kata-kata kredit, istilah itu meliputi baik perjanjian kreditnya, yang bersifat konsensual maupun penyerahan uang yang bersifat riil.

Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badrul Zaman, S.H.<sup>48</sup>, perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan.. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil kesepakatan antara pemberi dan

<sup>45</sup> John Edward Murray, Jr. *Murray on Contracts*, (A Revision of Grismore on Contracts). Indianapolis – New York : The Bobbs – Merrill Company, Inc, 1974, hal. 703 *et seq* ; E. Allan Fransworth . *Contracts*. Boston and Toronto : Little, Brown & Company, 1982. hal. 330 *et seq*.

<sup>46</sup> Robert N. Corley & Peter J. Shedd. *Principles of Business Law*. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall, 1989, hal. 195 *et seq*.; E. Allan Fransworth . *op.cit.* hal. 310 *et seq* ; John D. Calamari & Joseph M. Perillo . *op.cit.* hal. 397 *et seq*.

<sup>47</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>48</sup> Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., *op.cit.* hal. 28

penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual. Di dalam praktek perbankan, juga dapat disimpulkan bahwa untuk penyerahan uang dibutuhkan persesuaian kehendak. Ditanda tangannya perjanjian kredit tidak berarti tentu diiringi dengan penyerahan uang (kredit) dari pihak bank maupun penerima uang (kredit) oleh pemohon kredit.

Pemohon kredit tidak akan dapat mengambil uang, kalau tidak ada pernyataan dari bank bahwa pemohon sudah boleh mengambil pinjaman itu. Juga dari pihak pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk mengambil kredit itu, apabila pemakaian uang itu tidak begitu diperlukan. Dalam pemberian kredit dalam prakteknya biasanya bank terlalu lama untuk mengambil keputusan sedangkan kredit itu diperlukan justru pada saat tertentu, yang diperhitungkan pemohon sebagai saat yang dapat memberikan untung. Jika saat itu terlambat maka keuntungan yang diharapkan itu lenyap, oleh karena itu pemohon kredit mengurungkan niatnya untuk mengambil kredit itu.

## **B. Usaha Kecil**

### **1. Pengertian usaha kecil**

Tidak ada definisi yang sama disemua Negara tentang kriteria Usaha Kecil. Ada beberapa Negara memberi definisi tentang Usaha Kecil dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan di



perusahaanya. Kriteria Usaha Mikro bila jumlah tenaga kerja diperusahaanya antara 1-4 orang pekerja, sedangkan kalau Usaha Kecil, mempunyai tenaga kerja yang dipekerjakan antara 5-19 orang tenaga.

Di Indonesia definisi Usaha Mikro Kecil (U M K ) menggunakan kriteria yang ditetapkan dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, memberikan pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000.- ( dua ratus juta rupiah ). Tidak termasuk bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah ), milik warga negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Besar, berbentuk usaha orang perseorangan, atau badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi<sup>49</sup>

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 1 Angka 1 dinyatakan :<sup>50</sup>

- yang dimaksud dengan Usaha Kecil dalam pasal ini meliputi juga usaha kecil informal dan Usaha Kecil tradisional/

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.9 tahun 1995 tentang Usaha kecil.

<sup>50</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

- Yang dimaksud dengan Usaha Kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain, petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pemulung.
- Yang dimaksud dengan Usaha Kecil Tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun, dan/atau berkaitan dengan seni dan budaya. Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil adalah kegiatan ekonomi berskala kecil yang dimiliki dan menghidupi sebagian besar rakyat

Sedangkan yang dimaksud dengan usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih dari hasil penjualan tahunan usaha kecil, yang meliputi usaha nasional (baik milik swasta maupun milik negara), usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Di dalam draft penyempurnaan Rancangan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang prakarsanya disusun oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah membuat pengertian/kriteria usaha kecil sebagai berikut :<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Draf Penyempurnaan Rancangan Undang-undang Nomor 9/1995 tentang Usaha Kecil.

- a. memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan paling besar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. memiliki jumlah tenaga kerja 6 (enam) orang sampai dengan paling banyak 20 (dua puluh) orang, kecuali untuk sektor jasa dan perdagangan, memiliki hasil penjualan tahunan lebih besar dari Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sampai dengan paling besar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- c. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha Menengah atau usaha besar;
- d. bentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum;
- e. milik Warga Negara Indonesia

Kriteria golongan ekonomi lemah menurut Drs Thomas Suyatno dkk adalah pengusaha /perusahaan yang :<sup>52</sup>

- a. Sekurang-kurangnya 50% dari modal yang disetor dimiliki oleh orang Indonesia asli dan sebagian besar dari tiap-tiap pengurus( dewan komisaris dan/ atau direksi) adalah orang Indonesia asli atau sekurang-kurangnya 75% dari modal usaha dimiliki oleh orang Indonesia asli. Yang

---

<sup>52</sup> Drs. Thomas Suyatno dkk, op.cit hal. 34.

termasuk orang Indonesia asli adalah mereka yang sudah membaur sebagai orang Indonesia asli..

- b. Besar modal / kekayaan bersih usaha adalah penerima K I K dan K M K P yang mempunyai jumlah harta (total aset) tidak melebihi Rp. 300. juta yang berlaku untuk semua sektor ekonomi, tidak termasuk nilai tanah dan rumah yang ditempati.

Sedangkan menurut Keppres nomer 29 tahun 1984, penerima K I K dan K M K P sampai dengan Rp. 75. juta mempunyai jumlah harta ( total aset ) tidak melebihi Rp.100.juta.

## **2. Pengaturan usaha kecil**

Ketentuan dalam UU No. 9 Th. 1995 tentang usaha kecil pada pasal 1 angka 1 di sebutkan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha kecil yang ditentukan dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1995 berisi aturan mengenai : Landasan, asas dan tujuan, Kriteria, Iklim usaha, Pembinaan dan pengembangan, Pembiayaan dan Penjaminan Kemitraan, Ketentuan Pidana, dan Sanksi Administratif.

### **2.1. Landasan, Asas, dan Tujuan**

Landasan pemberdayaan Usaha Kecil adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berasaskan kekeluargaan yang

merupakan prinsip pelaksanaan pemberdayaan Usaha Kecil, bertujuan agar dalam upaya memberdayakan Usaha Kecil jiwa dan semangat usaha bersama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas kekeluargaan yang terkandung nilai-nilai keadilan.

## **2.2. Kriteria**

Kriteria Usaha Kecil seperti tersebut dalam Pasal 5 ayat 1 disebutkan sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- c. Milik Warga Negara Indonesia.
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

### **2.3. Iklim Usaha**

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil melalui penetapan Peraturan Perundang-undangan dan kebijaksanaan meliputi:

- a. Aspek pendanaan: Pemerintah memperluas sumber pendanaan, meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan dan memberikan kemudahan dalam pendanaan.
- b. Aspek persaingan: dalam hal ini Pemerintah membuat aturan yang mengatur mengenai peningkatan kerjasama usaha kecil dalam bentuk Koperasi, Asosiasi, dan Himpunan kelompok, mencegah persaingan tidak wajar dalam bentuk monopoli, serta mencegah terjadinya penguasaan pasar oleh orang perorangan atau kelompok tertentu.
- c. Aspek Prasarana: mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembang-tumbuhkan usaha kecil, memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha kecil.
- d. Aspek Informasi: membentuk dan memanfaatkan bank data dan jaringan informasi bisnis serta menyebarkan informasi mengenai pasar, teknologi, desain dan mutu.

- e. Aspek kemitraan: mewujudkan kemitraan, serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Kecil dalam bertransaksi dengan usaha menengah dan usaha besar.
- f. Aturan perizinan usaha untuk menyederhanakan perizinan, melalui sistem pelayanan satu atap, dan memberikan kemudahan persyaratan perizinan. Upaya mewujudkan sistem pelayanan satu atap dilaksanakan secara bertahap, dan memberikan keringanan biaya.
- g. Aturan perlindungan ditetapkan untuk tempat usaha yang meliputi penentuan lokasi dipasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya. Aturan tersebut meliputi pula cadangan bidang dan kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai budaya yang khusus secara turun-temurun. Selanjutnya ketentuan mengenai pengutamaan produk yang dihasilkan Usaha Kecil melalui pengadaan langsung Usaha Kecil, pengadaan barang / jasa, dan pemborongan kerja pemerintah, serta pemberian konsultasi hukum dan pembelaan.
- h. Penumbuhan iklim usaha dilaksanakan dengan cara pengadaan lokasi pasar tradisional, atau lokasi pasar tertentu lainnya yang diperuntukkan khusus bagi Usaha Kecil, pembangunan lokasi

pasar bagi Usaha Menengah atau Usaha Besar yang ditentukan dengan memperhatikan jarak lokasi pasar yang telah diperuntukan bagi Usaha Kecil.

#### **2.4. Pembinaan dan Pengembangan**

Sebagaimana telah digariskan di dalam GBHN bahwa salah satu program prioritas dalam mencapai sasaran pembangunan khususnya untuk peningkatan pemerataan adalah program pengentasan kemiskinan. Masalah ini merupakan masalah yang kompleks dan mencakup banyak segi antara lain segi ekonomi, segi sosio kultural, dan segi politis. Sehubungan dengan itu, upaya pengentasan kemiskinan merupakan upaya multi sektoral terpadu harus dilaksanakan oleh semua pihak terkait secara terkoordinasi dan bersama-sama.

Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai tugas pokok untuk memelihara stabilitas moneter, kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, serta kemantapan neraca pembayaran sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral. Pada dasarnya kaitan antara aspek kebijakan keuangan/moneter dengan pengembangan usaha kecil menyangkut 2 hal:



1. Pada tingkat *makro* adalah kebijakan untuk memelihara kestabilan harga dan untuk menciptakan lapangan kerja. Kebijakan makro ini merupakan suatu syarat penting bagi keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan. Program apapun yang dilaksanakan untuk mengentaskan kemiskinan, hanya dapat berhasil apabila harga barang-barang kebutuhan dasar yang dikonsumsi rakyat banyak, termasuk penduduk miskin, dapat dipertahankan kestabilannya. Demikian pula program-program kemiskinan hanya dapat mencapai sasaran pemecahannya secara lestari apabila secara makro dapat diciptakan sumber-sumber pendapatan baru atau lapangan kerja baru, yang makin meningkat dan meluas bagi penduduk miskin. Tanpa penciptaan lapangan kerja baru, program kemiskinan hanya akan berupa pemberian bantuan kepada penduduk miskin dan bukan mengentaskan mereka dari kemiskinan dan membuat mereka mandiri. Kebijakan makro yang mampu memelihara kestabilan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan sumber-sumber pendapatan dan lapangan kerja baru, merupakan syarat bagi keberhasilan semua program-program pengentasan kemiskinan.
2. Pada tingkat *mikro*, perlu dilaksanakan upaya untuk meningkatkan dan memperluas akses golongan yang berpenghasilan rendah kepada pelayanan-pelayanan keuangan dan perbankan yang menunjang

kegiatan-kegiatan produktif mereka. Ini mencakup upaya-upaya untuk makin memperluas jaringan pelayanan keuangan/perbankan ke pelosok-pelosok, mengembangkan lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan pola kegiatan penduduk berpenghasilan rendah, mendidik dan menyiapkan kelompok-kelompok dari mereka agar siap untuk memanfaatkan sebanyak-banyaknya jaringan dan lembaga-lembaga keuangan /perbankan yang ada bagi peningkatan pendapatan mereka.

Pembinaan dan pengembangan usaha Kecil dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi dengan cara meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan. Selanjutnya meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan, serta memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan bahan baku, bahan penolong dan pemasaran.

Pembinaan dan pengembangan tersebut dilakukan pula dalam bidang pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri dengan cara melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran, meningkatkan manajemen dan teknik pemasaran, menyediakan sarana dan dukungan promosi serta uji coba pasar. Selanjutnya dilakukan pula

pengembangan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi, dan pemasaran produk usaha Kecil.

Pembinaan dan pengembangan dilakukan juga dalam bidang sumber daya manusia melalui cara memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan meningkatkan teknik dan manajerial, membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi Usaha Kecil, serta menyediakan tenaga penyuluh. Pembinaan dan pengembangan serta memasyarakatkan kewirausahaan adalah menanamkan dan mengembangkan jiwa, semangat, serta perilaku kewirausahaan melalui kemauan dan kemampuan untuk bekerja dengan semangat kemandirian, kemauan dan kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis, termasuk keberanian mengambil resiko usaha. Hal tersebut mencakup pula kemauan dan kemampuan berpikir dan bertindak secara kreatif dan inovatif, bekerja secara teliti, tekun dan produktif, bekerja secara kebersamaan dengan berlandaskan etika bisnis yang sehat.

Di bidang teknologi dilakukan pembinaan dan pengembangan dengan cara melakukan peningkatan kemampuan teknologi produksi dan pengendalian mutu, peningkatan kemampuan di bidang penelitian untuk melaksanakan pengembangan desain dan teknologi baru, serta memberikan insentif kepada usaha Kecil yang

menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup. Pembinaan dan pengembangan tersebut dilakukan pula terhadap bidang kerjasama dan alih teknologi, kemampuan memenuhi standarisasi teknologi, menumbuh kembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi usaha Kecil. Pembinaan dan pengembangan yang berkaitan dengan tatacara, bobot, intensitas, prioritas, dan jangka waktu pembinaan dan pengembangannya dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi (Penggolongan Usaha Kecil oleh pemerintah berdasarkan nilai kekayaan bersih atau penjualan tahunan dengan memperhatikan kondisi nyata pelbagai jenis dan lapisan Usaha Kecil, termasuk Usaha Kecil informal, Usaha Kecil Rumah Tangga, dan Usaha Kecil Tradisional), dan tingkat perkembangan Usaha Kecil terkait. Hal tersebut ditentukan secara nasional.

Usaha Kecil yang telah dibina dan dikembangkan menjadi Usaha Menengah masih dapat diberikan pembinaan dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun. Dalam jangka waktu tersebut diharapkan Usaha Menengah tersebut dapat memantapkan usahanya. Bidang pengembangan dan pembinaan yang masih perlu diberikan kepada usaha Menengah ditentukan oleh pemerintah. Usaha Menengah yang berkembang dari Usaha Kecil

dapat menempati lokasi dan melakukan kegiatan usaha yang dicadangkan.

## **2.5. Pembiayaan dan Penjaminan**

Pembiayaan dapat disediakan pemerintah, dunia usaha, juga oleh masyarakat. Pembiayaan tersebut dapat dilakukan melalui kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana penyesihan sebagian laba badan usaha milik negara (BUMN), hibah, dan jenis pembiayaan lainnya, yaitu dana sumbangan dari masyarakat termasuk dana dari Usaha Besar Swasta, dan sebagainya.

Untuk meningkatkan akses usaha Kecil terhadap pembiayaan tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan peningkatan kemampuan dalam pemupukan modal, penyusunan study kelayakan, manajemen keuangan, dan menumbuh kembangkan lembaga penjaminan. Pembiayaan bagi usaha Kecil dapat dilaksanakan oleh lembaga penjamin yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta. Dalam pelaksanaan penjaminan oleh lembaga penjamin baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun oleh swasta bagi usaha Kecil diberikan kemudahan berupa penyederhanaan tata cara dan persyaratan yang ringan. Lembaga Penjamin menjamin pembiayaan usaha dalam

bentuk pembiayaan kredit perbankan, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan lainnya.

## **2.6. Kemitraan**

Pemerintah mendorong agar terjadi hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha menengah dan Usaha Besar, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha. Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara. Kemitraan dilaksanakan dengan pola intiplasma, subkontrak, dagang umum, waralaba, keagenan dan bentuk-bentuk lain.

## **2.7. Koordinasi dan Pengendalian**

Koordinasi dan pengendalian dalam rangka pemberdayaan usaha Kecil dilakukan oleh Pemerintah (Menteri yang melaksanakan tugas ini), dan memantapkannya. Presiden dapat membentuk lembaga koordinasi pengendalian yang dipimpin oleh menteri yang menangani masalah usaha Kecil. Keanggotaan terdiri dari unsur pemerintah dunia usaha, dan masyarakat yang merupakan unsur-unsur yang tercakup dalam sistem pemberdayaan, Usaha Kecil.

Lembaga tersebut berfungsi sebagai lembaga yang menentukan kebijaksanaan dan program untuk pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pemberdayaan Usaha Kecil.

## **2.8. Ketentuan Pidana**

Sanksi pidana dapat berupa penjara paling lama 5 tahun, atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah, dapat dikenakan kepada barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengaku atau memakai nama Usaha Kecil sehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana, dan keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa atau pemborongan pekerjaan pemerintah yang diperuntukan dan dicadangkan bagi Usaha Kecil yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi usaha Kecil (Pasal 35: UU No. 9/1995). Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 ini perbuatan tersebut merupakan kejahatan.

## **2.9. Sanksi Administratif**

Pasal 36 menentukan tentang sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap Usaha Menengah atau Usaha Besar. Hal ini

dilakukan apabila Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan sengaja memiliki dan /atau menguasai Usaha Kecil mitra usahanya, berupa pencabutan izin usahanya, dan atau denda paling banyak 5 milyar rupiah oleh instansi yang berwenang. Sanksi pidana dapat dikenakan kepada badan usaha atau atas nama badan usaha. Sanksi tersebut berupa pencabutan sementara atau pencabutan tetap izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34.

### **3. Arti Pentingnya Modal Bagi Usaha Kecil**

Dalam pengembangan usaha, pendanaan merupakan kendala terbesar bagi pengembangan usaha kecil dan menengah.<sup>53</sup>

Bagi Usaha Besar, tidak begitu sulit untuk mendapatkan modal demi pengembangan usahanya namun bagi usaha kecil modal merupakan suatu yang dapat menghambat usahanya. Sumber dana bagi usaha kecil bisa dari modal sendiri, maupun kredit dari Bank. Dalam praktek, pihak bank dihindangi rasa takut untuk menyalurkan kredit untuk usaha kecil. Sumber pendanaan yang berasal dari hutang bank ini dirasakan sangat berat bagi pengusaha kecil. Hal ini disebabkan tingkat bunga yang cukup tinggi, prosedur pengajuan kredit sangat berbelit-belit dan memerlukan waktu yang

---

<sup>53</sup> Zudan Arif Fakhrullah, S.H., MH & H. Hadi Wuryan, S.H., CN., MH, "Hukum Ekonomi", Buku Kesatu, Surabaya, Penerbit Karya Abditama, Hal. 41



panjang, sehingga pendanaan dari bank terasa menjadi mahal dan sulit bagi usaha menengah dan kecil.

Menyadari hal ini semua, dilakukan berbagai upaya untuk menciptakan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha kecil dan menengah. Pemerintah mulai mengenalkan sumber pembiayaan alternatif yang kemudian lebih dikenal dengan lembaga pembiayaan.

Lembaga pembiayaan (*Financing institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.<sup>54</sup>

Ketentuan ini ditetapkan oleh Pemerintah melalui Paket Deregulasi tanggal 20 Desember 1988 dalam bentuk Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan menteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK/013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Keputusan ini diubah dan disempurnakan terakhir oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 Tahun 1995. Lembaga Pembiayaan yang dimaksud :

1. *Leasing* atau sewa guna usaha;
2. *Factoring* atau anjak piutang;
3. *Sekuritas* atau perdagangan surat berharga;
4. *Venture Capital* atau modal ventura;
5. *Credit Card Company* atau kartu kredit

---

<sup>54</sup> Prof. Dr. Abdulkadir Muhammad, S.H., Rilda Murniati, S.H., M.Hum, op cit , Hal. 18

6. *Consumer Finance Company* atau pembiayaan konsumen.

#### **4. Kemungkinan Perolehan Modal Bagi Usaha Kecil**

Modal/pembiayaan usaha kecil dapat disediakan pemerintah, dunia usaha, juga oleh masyarakat. Pembiayaan tersebut dapat dilakukan melalui kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba badan usaha milik negara (BUMN), hibah, dan jenis pembiayaan lainnya, yaitu dana sumbangan dari masyarakat termasuk dana dari Usaha Besar Swasta, dan sebagainya.

Untuk meningkatkan akses usaha kecil terhadap pembiayaan tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan peningkatan kemampuan dalam pemupukan modal, penyusunan study kelayakan, manajemen keuangan, dan menumbuhkan kembangkan lembaga penjaminan. Pembiayaan bagi usaha kecil dapat dilaksanakan dengan penjamin oleh lembaga penjamin yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta. Dalam pelaksanaan penjaminan oleh lembaga penjamin baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun oleh swasta bagi usaha kecil diberikan kemudahan berupa penyederhanaan tatacara dan persyaratan yang ringan. Penjaminan oleh lembaga penjamin tersebut dapat dilakukan terhadap pembiayaan kredit perbankan, bagi hasil, dan pembiayaan lainnya.

Modal untuk Usaha Kecil bisa diperoleh dari Bank, dan Lembaga Keuangan bukan Bank. Dari Kredit bank ada beberapa macam kredit yang pernah dikeluarkan dananya yang berasal dari KLBI sebagai berikut :<sup>55</sup>

1. Kredit candak kulak yang diberikan kepada pedagang kecil/bakul dipasar-pasar.
2. Kredit mini : diberikan misalnya untuk petani, pedagang, pengrajin, dan nelayan serta buruh-buruhnya.
3. Kredit midi : Kredit yang diberikan kepada nasabah-nasabah yang semula usahanya dibiayai dengan kredit mini, kemudian membutuhkan modal yang lebih besar karena perkembangan usahanya.
4. Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP)
  - KIK adalah Kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada pengusaha/perusahaan Kecil pribumi dengan persyaratan dan prosedur khusus, guna pembiayaan barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan proyek dan pendirian proyek baru.

Modal bagi suatu usaha merupakan darah bagi kelangsungan hidup perusahaan. Bagi usaha kecil bantuan permodalan dari pemerintah sangat dibutuhkan.

Bantuan permodalan dari pemerintah untuk membantu Usaha Kecil golongan ekonomi lemah selama ini ada beberapa antara lain KIK, KMKP,

---

<sup>55</sup> Prof.Abdulkadir Mohammad, S.H., Rilda Murniati, S.H., M.Hum, "Op cit hal 19.

Kredit Mini, Kredit Midi, Kredit Koperasi, Kredit Candak Kulak, Kredit Perumahan, dan lain-lain.

Sejak dikeluarkannya kebijaksanaan deregulasi I Juni 1983 disebut kredit prioritas, yang dananya masih didukung oleh KLBI dalam Implementasinya penyaluran kredit tersebut banyak mengandung kelemahan-kelemahan untuk itu perlu dicari pola-pola yang tepat agar keberadaan modal dapat mendukung pembinaan yang berhasil baik.

Dalam rangka meningkatkan perkuatan akses permodalan usaha mikro dan kecil untuk kegiatan usaha produktifnya, maka Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI dengan surat Nomor 25/M.KUMK/VIII/2002 tanggal 30 Agustus 2002 telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan RI dalam penyediaan kredit yang berasal dari Surat Utang Pemerintah ( SUP )

Menteri Keuangan RI dengan surat Nomor 40/K/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan RI tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil. Skim Kredit Usaha Mikro dan kecil tersebut merupakan kredit program yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI berdasarkan Surat Utang Pemerintah Nomor SU-005/MK/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang lebih dikenal dengan dana SUP-005.

## **C. Kredit Usaha Kecil**

### **1. Pengertian Umum.**

1.1. Kredit Usaha Kecil adalah Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plapon kredit maksimum sebesar Rp. 350.000.000,- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif<sup>56</sup>

1.2. Kredit Usaha Kecil ( KUK ) dapat berupa kredit investasi maupun kredit modal kerja.

Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang untuk membiayai pembelian barang modal dan atau jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi proyek atau pendirian proyek baru.

Sedangkan Kredit modal kerja adalah kredit jangka pendek untuk membiayai kepentingan kelancaran modal kerja nasabah suatu usaha atau proyek.

1.3. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimum Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah). Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimum Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ). Dimiliki oleh warga negara Indonesia dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang

---

<sup>56</sup> Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/4/Kep/Dir tanggal 1 April 1997.

dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar serta berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi <sup>57</sup>

1.4. Usaha produktif adalah usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang atau jasa.

## **2. Pengaturan Kredit Usaha Kecil**

### **2.1 Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/4/KEP/DIR tanggal 1 April 1997 diatur tentang Kredit Usaha Kecil.**

Dalam Ketentuan Umum dikatakan bahwa Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah kredit investasi dan atau kredit modal kerja, yang diberikan dalam Rupiah dan atau Valuta Asing kepada nasabah Usaha Kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp 350.000.000,- (tiga ratus limapuluh juta rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif. Sedangkan Usaha Kecil yang dimaksud disini adalah Usaha Kecil sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

---

<sup>57</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 9/1995 tentang Usaha Kecil.

Adapun cakupan KUK dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut selain yang tersebut diatas mencakup pula :

- a. Kredit pemilikan rumah dengan plafon kredit maksimum Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. Pemilikan rumah tipe 70 ke bawah (KPR sampai dengan T 70), dengan luas tanah maksimum 200 m<sup>2</sup> dan luas bangunan maksimum 70 m<sup>2</sup> dan yang akan ditempati oleh nasabah.
  2. Pemilikan Kavling siap Bangun (KSB) dengan luas tanah maksimum 72 m<sup>2</sup>.
  3. Perbaikan atau pemugaran rumah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2.
- b. Kredit untuk pemilikan rumah toko (ruko) kepada Usaha Kecil dengan luas tanah maksimum 200 m<sup>2</sup> luas bangunan maksimum 70 m<sup>2</sup> dengan plafon kredit tidak melebihi Rp 350.000.000,- (tiga ratus limapuluh juta rupiah).
- c. Kredit yang diberikan kepada nasabah Usaha Kecil dengan plafon maksimum Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanpa melihat jenis penggunaannya untuk kegiatan produktif atau konsumtif, seluruhnya dapat diperlakukan sebagai KUK.
- d. Kredit yang diberikan kepada koperasi untuk dilakukan kepada anggotanya baik koperasi sebagai pelaksana (executif) atau penyalur

(channeling) sepanjang kredit untuk setiap anggota koperasi tersebut memenuhi kriteria KUK.

Dalam peraturan ini Bank wajib memberikan KUK sebesar presentase tertentu dari jumlah ekspansi kredit neto termasuk surat berharga yang diberikan dalam Rupiah dan atau Valuta Asing pada setiap tahun takwin.

Dalam peraturan ini dikenakan sanksi bagi bank yang tidak dapat memenuhi kewajiban pemberian KUK nya dan bagi bank yang ekspansi KUK nya melebihi jumlah yang diwajibkan, diberi insentif sebesar prosentase tertentu dari kelebihanannya.

## **2.2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil.**

Yang dimaksud dengan Kredit Usaha Kecil dalam peraturan ini adalah kredit atau pembiayaan dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja, yang diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing kepada nasabah Usaha Kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif, selanjutnya disebut KUK.

Kriteria Usaha Kecil adalah kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.



Dalam peraturan ini Bank dianjurkan untuk menyalurkan sebagian dananya melalui pemberian KUK.

Dengan demikian tidak ada keharusan bagi Bank untuk menyalurkan dananya kepada Usaha Kecil. Bank Indonesia hanya menghimbau agar bank dapat menyalurkan kredit kepada Usaha Kecil.

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/4/KEP/DIR tanggal 4 April 1997 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/55/KEP/DIR tanggal 8 Agustus 1997 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil untuk mendukung Program Kemitraan Terpadu dan Pengembangan Koperasi dinyatakan tidak berlaku.

## **2. Pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK).**

Dalam pemberian kredit perbankan secara legal formal selalu mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perbankan beserta peraturan pelaksanaannya.

Hingga saat ini, selain BRI yang memang ditugaskan pemerintah untuk menyalurkan sebagian besar kreditnya kepada Usaha Kecil dan sudah lama menangani pemberian kredit kepada Usaha Kecil, hanya sedikit bank umum yang benar-benar menyiapkan strategi pendekatan dan sumber dananya untuk membiayai Usaha Kecil.

Selain itu, belum ada bank umum yang sepenuhnya ditugaskan melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Kecil termasuk bank-bank umum milik negara<sup>58</sup>.

Meskipun sebagian besar kredit BRI diberikan kepada Usaha Kecil dan menengah, BRI masih tetap memberikan kredit kepada usaha berskala besar. BRI bahkan pernah memberikan kredit kepada konglomerat dalam jumlah yang sangat besar dan sebagian besar kredit macet BRI justru berasal dari kredit yang diberikan kepada para konglomerat, bukan dari kredit yang diberikan kepada Usaha Kecil.

Dipihak lain, kredit-kredit yang diberikan oleh BRI kepada Usaha Kecil misalnya Skim Kupedes melalui BRI unit Desa menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik dan bahkan sering mendapat apresiasi dari banyak pihak termasuk dari pihak luar negeri dan organisasi Internasional<sup>59</sup>.

Hal ini menunjukkan bahwa kalau kredit kepada Usaha Kecil dilaksanakan dengan serius, sistematis dan istiqomah, hasilnya seringkali lebih baik bagi bank dan juga bagi masyarakat dibandingkan dengan pemberian kredit kepada Usaha Besar (UB).

Seperti disebutkan terdahulu bahwa kredit untuk Usaha Kecil sebagian besar berasal dari KLBI bahkan ada yang pendanaannya seluruhnya (100 %) berasal dari KLBI misalnya kredit Bimas atau KUT.

---

<sup>58</sup> Achyar Ilyas, "Kajian Hukum Atas Pembiayaan Usaha Kecil Melalui Kredit Perbankan", Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2003, hal. 97.

<sup>59</sup> Apresiasi terhadap Skim Kupedes dan juga Simpedes sering disampaikan dalam pertemuan internasional seperti sidang-sidang Asia Pasific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA) dan juga kepada anggota-anggota Executive Committee APRACA.

Di dalam Skim kredit program ini, fungsi bank pada dasarnya tidak lebih sebagai bank pelaksana (*handling bank*), meskipun pihak bank sering juga ikut serta menanggung resiko macetnya kredit.

Dalam pelaksanaannya kebanyakan bank pelaksana tidak dapat memberikan perhatian penuh kepada Usaha Kecil dalam mengembangkan kegiatannya, karena hal ini memerlukan penanganan yang serius dan tidak sama caranya dengan penanganan untuk Usaha Besar (UB).

Dengan latar belakang seperti itu sulit untuk mengharap bank-bank umum yang ada secara sukarela mengubah visi dan misinya perbankan untuk mendukung pengembangan Usaha Kecil. Tanpa adanya politik hukum dari pemerintah, kesinambungan pembiayaan Usaha Kecil akan menjadi terganggu karena lemahnya akuntabilitas dan tidak jelasnya pertanggungjawaban dalam pemberian kredit Usaha Kecil ini.

Pemberian KLBI baru kemudian tidak bisa dilanjutkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral. Pemberian KLBI memang sangat terkait dengan tugas pokok Bank Indonesia menurut Undang-Undang Nomo 13 tahun 1968 yaitu membantu Pemerintah antara lain dalam mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

### **Skim-skim Kredit Program Untuk Usaha Kecil**

Sebelum dan sesudah Pakjari 1990<sup>60</sup> perlu dikemukakan bahwa skim kredit program ini dilaksanakan oleh bank-bank milik negara yang pada umumnya mempunyai jaringan kantor yang cukup luas dan pada tahap-tahap awal peranannya sangat dominan dalam perbankan Indonesia dan sering ditugaskan menyelenggarakan berbagai program prioritas pemerintah sebagai *development agent*.

Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral telah menetapkan selain tugas memelihara kestabilan nilai rupiah tugas Bank Sentral adalah mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bank Indonesia dapat memberikan kredit likuiditas (kredit yang dananya berasal dari Bank Indonesia) untuk mengembangkan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebijaksanaan kredit yang ditetapkan.

Pada tahun 1973 Bank Indonesia telah berperan dalam pengembangan Usaha Kecil melalui penyaluran skim Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen atau (KMKP) yang dimaksudkan untuk mendorong perkembangan usaha dari pengusaha kecil yang memerlukan perhatian kecil dan persyaratan khusus agar golongan ekonomi lemah tersebut dapat mempunyai akses kepada perbankan.

---

<sup>60</sup> Lihat antara lain, Biro Kredit BI., Sejarah Peranan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Kecil, Edisi ke empat, Juni 2001.

Skim kredit ini didukung oleh likuiditas Bank Indonesia (KBLI) dengan persyaratan yang ringan seperti suku bunga rendah tidak mutlak diperlukan penyediaan dana sendiri dan menjamin kredit sehingga dapat terjangkau oleh usaha kecil.<sup>61</sup>

Beberapa skim kredit untuk Usaha Kecil sebelum dikeluarkan Pakjan 1990 antara lain :

1. Kredit Bimas dan Inmas.

Kredit Bimas sejak Tahun 1965, awalnya untuk intensifikasi padi yang selanjutnya dikembangkan menjadi palawija.

2. KUT, sejak 1985 untuk petani melalui Koperasi Unit Desa (K.U.D.).

3. Kredit investasi, tahun 1969.

4. KIK/KMKP.

### **Sesudah Pakjan 1990**

Dengan kebijakan paket bulan Januari 1990 kredit likuiditas Bank Indonesia disalurkan antara lain untuk: Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Untuk Koperasi Unit Desa (KKUD) dan Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya. (KKPA). Kredit ini masuk dalam katagori Kredit Usaha Kecil yang secara rinci dalam surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/4 /KEP/DIR tanggal 4 April 1997 dengan kriteria usaha kecil sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil.

---

<sup>61</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 6 / 38/UPK tanggal 4 Desember 1973

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut Bank wajib memberikan sebesar persentase tertentu dari jumlah ekspansi kredit netto termasuk surat berharga yang diberikan dalam Rupiah dan Valuta Asing pada setiap tahun takwim. Sekalipun peraturan tersebut telah memberikan kewajiban dan sanksi serta insentif kepada Bank penyalur KUK, pengusaha kecil maupun Pemerintah mengatakan sulit mendapatkan akses kredit dari Bank, karena persyaratan Bank dianggap "*tidak Bank able*" Dari sisi nasabah debitur keharusan penyediaan jaminan dan penetapan tingkat suku bunga yang cukup tinggi bagi KUK, disamping prosedurnya berbelit-belit dan memakan waktu lama.

Menurut Anwar Nasution, dari statistik kredit bermasalah yang semakin tersedia dewasa ini bahwa kredit program telah menjadi sumber KKN. Kredit itu terutama dinikmati oleh segelintir nasabah tertentu yang dekat dengan penguasa politik dan bukan oleh "*wong cilik*" seperti yang diharapkan semua. Ternyata bahwa sebagian besar dari kredit itu diinvestasikan pada proyek-proyek yang justru melemahkan ekonomi nasional dan bukan pada kegiatan produktif yang menguasai perekonomian nasional.<sup>62</sup>

Sejak masa tanam 1999/2000 KUT diganti dengan Skim Kredit Ketahanan pangan.

---

<sup>62</sup> Anwar Nasution " Pidato Pengantar Tugas sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, Jakarta, Rabu 28 Juli 1999.

### **BAB III**

#### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Setelah diadakan penelitian baik melalui Kepustakaan maupun lapangan maka dapat disajikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Peran Pemerintah dalam pengaturan pemberian kredit kepada usaha kecil.**

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan pokok Negara yaitu masyarakat adil dan makmur. Undang-undang dasar 1945 juga meletakkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipedomani dalam menjaikan roda perekonomian yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945, dimana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Disini menunjukkan para perumus konstitusi kita menginginkan terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui asas kekeluargaan, kebersamaan, demokrasi ekonomi serta melalui peran dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Pasal 33 UUD 1945 Perubahan keempat UUD 1945 yang telah disahkan oleh MPR bulan Agustus 2002

Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dituangkan pula dalam GBHN (Tap MPR No IV/1999) GBHN tahun 1999-2004, dimana salah satu program yang merupakan prioritas dalam mencapai sasaran pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan andal berdasarkan demokrasi Ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil dan merata.<sup>64</sup>

Sebagai penjabaran dari GBHN telah dikeluarkan propenas yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 yang menetapkan beberapa kebijakan dan program untuk mengembangkan usaha kecil, menengah dan koperasi.<sup>65</sup>

Salah satu program yang digariskan dalam GBHN Tahun 1999 yang merupakan prioritas dalam mencapai sasaran pembangunan khususnya untuk peningkatan pemerataan adalah pengentasan kemiskinan. Dalam rangka ini perlu diberikan perhatian yang lebih terhadap usaha untuk membina dan melindungi usaha kecil dan tradisional.

Pengembangan usaha kecil dan koperasi merupakan tugas nasional yang sangat strategis, baik dari segi pembangunan ekonomi maupun dari segi perkembangan sosial politik.

Pengembangannya mencakup berbagai aspek, sehingga dalam pelaksanaannya terkait banyak faktor. Oleh karena itu upaya pengembangan

---

<sup>64</sup> GBHN Tahun 1999-2004 (Tap MPR No IV/1999)

<sup>65</sup> UU No 25 Tahun 2000 Tentang Propenas



usaha kecil harus dilaksanakan oleh semua pihak secara bersama-sama melalui program-program yang terarah dan terkoordinasi.

Usaha kecil merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan ekonomi pada khususnya. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan membutuhkan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.<sup>66</sup>

Usaha kecil yang dimaksud disini adalah Usaha Kecil sebagaimana disebut dalam UU No. 9 Tahun 1995. Dalam pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana di atur dalam Undang-undang ini. Kriteria Usaha Kecil dapat kita lihat pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih tidak melebihi Rp. 200.000.000, ( dua ratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat berusaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.

---

<sup>66</sup> Penjelasan atas Undang-Undang No. 9 /1995 tentang Usaha Kecil

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diusahakan oleh warga negara Indonesia.<sup>67</sup>

Dalam Undang-undang tentang usaha kecil menyebutkan pula antara lain bahwa kredit perbankan merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi Usaha Kecil. Dihak lain pemberian kredit Usaha Kecil diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 1992 Jo Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan.<sup>68</sup>

Krisis ekonomi yang terjadi mulai pertengahan tahun 1997 antara lain disebabkan tidak kuatnya landasan ekonomi Indonesia yang ternyata tidak berdaya menghadapi gejolak keuangan eksternal, secara mendasar disebabkan karena penyelenggara ekonomi tidak mengacu pada Pasal 33 UUD 45 yang dengan tegas menetapkan bahwa " kemakmuran rakyat yang diutamakan bukan kemakmuran orang per orang" Rentannya ekonomi Indonesia antara lain dipicu oleh pembangunan industri yang tidak ada keterkaitan antara industri besar, menengah dan kecil yang serasi.

Krisis ini berkembang keseluruh aspek kehidupan baik politik, ekonomi dan sosial, yang ditandai dengan ambruknya tatanan ekonomi dan keuangan, pengangguran yang meluas, dan kemiskinan yang menjurus pada ketidak berdayaan masyarakat dan mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam kenyataan pemerintah

---

<sup>67</sup> Undang-undang Nomor 9 / 1995 tentang usaha kecil

<sup>68</sup> Undang-undang No 7 tahun 1992 Jo Undang-undang NO 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

justro kurang memperhatikan kemakmuran rakyat namun lebih memperhatikan kepentingan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung semangat kewirausahaan sejati. Hal tersebut menyebabkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak kompetitif <sup>69</sup>.

Selama ini dunia luar melihat ekonomi Indonesia tumbuh dengan pesat dan industri sudah begitu canggih, akan tetapi dibalik itu , munculnya konglomerat yang menguasai banyak sektor ekonomi, sedangkan pengusaha kecil semakin terpojok dalam posisi yang tidak seimbang. Gambaran kondisi struktur pelaku nasional terlihat mulai timpang .Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)<sup>70</sup> pada tahun 1998 terdapat 33,42 juta unit usaha dan sekitar 2000 unit usaha diantaranya adalah usaha besar atau konglomerat yang menguasai 61,1 % PDB ( Produk Domestik Bruto ). Selebihnya 37.000 unit usaha menengah menguasai 5% PDB dan kelompok kecil sebanyak 33,381 juta unit atau 99% dari jumlah seluruh unit usaha yang ada tetapi menguasai hanya 22,9 PDB. Angka ini menggambarkan bahwa telah terjadi pemusatan penguasaan aset oleh golongan tertentu( konglomerat ) yang jumlah orangnya sedikit sebaliknya masih banyak orang miskin yang tidak menguasai aset. Pada saat krisis ekonomi terjadi banyak konglomerat berjatuh dan sangat mempengaruhi perekonomian negara, sedangkan

---

<sup>69</sup> Mubyarto ,Reformasi Sistem Ekonomi : Dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan ( Kumpulan Makalah ) .Reformasi haluan Negara dan Politik Ekonomi baru penerbit Aditya Media 1996 hal 117 .

<sup>70</sup> Badan Pusat Statistik ( BPS ) Tahun 1998

pengusaha kecil yang bertahan tidak begitu banyak pengaruhnya terhadap perekonomian negara.<sup>71</sup>

Selanjutnya menurut data BPS tahun 1998 ada 36,81 juta orang pengusaha yang tercatat di Indonesia , 99,85%( atau 36,76 juta orang ) merupakan pengusaha kecil , 0,14% ( atau 51,88 ribu orang ) merupakan pengusaha menengah dan hanya 0,01% ( atau 1,83 ribu orang) merupakan pengusaha besar. Dalam hal penyerapan tenaga kerja dari 64,67 juta tenaga kerja ,88,66 %( atau 57,34 juta orang )diserap oleh pengusaha kecil , 10,78% (atau 6 ,97 juta orang )diserap oleh pengusaha menengah dan 0,5% (atau 0,36 juta orang) diserap oleh pengusaha besar.<sup>72</sup>

Dari beberapa data tersebut diatas sudah pada tempatnya apabila perhatian pemerintah lebih ditujukan kepada pengembangan usaha kecil daripada memberikan berbagai keistimewaan bagi pengusaha kuat.Keberpihakan kepada rakyat berdasarkan asas-asas perekonomian berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dimana perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan asas keadilan maka kepentingan rakyat dan kepentingan Nasional harus diutamakan dan menjadi dasar pembangunan ekonomi Indonesia .Pembangunan ekonomi harus mencakup usaha restrukturisasi ekonomi untuk mengatasi

---

<sup>71</sup> July . P .Tambunan " Pemberdayaan Usaha Ekonomi Rakyat ,Business news no .460 / thn -XI / 1999,tanggal 2 Februari 1999.

<sup>72</sup> Sri Edi Swasono ,Reformatory Recovery : Menghindari marginalisasi terhadap usaha kecil "Makalah sebagai bahan ceramah mengenai "Small and Medium Scale Enterprises and Cooperatives"Diklat Caraka Madya Angkatan V ,Pusdiklat Deplu ,Jakarta 30 Maret 2000.hal 5.

ketimpangan-ketimpangan struktural yang merugikan kepentingan rakyat dan kepentingan nasional.<sup>73</sup>

Untuk merealisasikan pemihakan pemerintah kepada perekonomian rakyat upaya memberdayakan rakyat dalam bentuk penyaluran dana sangat diperlukan sebagai modal usaha rakyat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonominya .

Usaha kecil sebagai bagian integral dari dunia usaha dalam pembangunan nasional ,yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan ,potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan perekonomian yang semakin seimbang.

Undang-undang no 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil menetapkan bahwa pemberdayaan usaha kecil bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil sebagai usaha yang tangguh dan mandiri dan dapat berkembang menjadi usaha menengah .Dengan berkembangnya usaha produksi akan meningkat kesempatan kerja, bertambah banyak ,peningkatan hasil ekspor serta pemerataan hasil-hasil pembangunan yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap penerimaan negara .Dalam menumbuhkan iklim usaha untuk mendukung pengembangan usaha kecil pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan dan -kebijakan-kebijakan antara lain dalam aspek

---

<sup>73</sup> Sri Edi Swasono "Ekonomi Rakyat dan peran Kadinda –kadinda : Antara retorika dan realita .Makalah untuk diskusi panel membangun model pemberdayaan ekonomi kerakyatan di kotamadya Bandung , 20 November 1999,hal 8.

pendanaan untuk memperluas sumber pendanaan ,meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan dan memberikan kemudahan dalam pendanaan.

Perkembangan ekonomi dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dalam ekonomi regional dan International yang dapat menunjang, sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan, sementara itu perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin komplek, oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan ekonomi termasuk diantaranya adalah sektor Usaha Kecil, mengingat sektor Usaha Kecil memiliki posisi strategis dalam upaya menunjang pencapaian tugas pembangunan nasional secara umum dan secara khusus Untuk memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional, maka terhadap Usaha Kecil perlu senantiasa mendapat perberdayaan dan Pembinaan agar dapat bersaing di tingkat global!.

Usaha kecil yang tangguh, mandiri, dan berkembang dengan sendirinya akan meningkatkan produk nasional, kesempatan kerja, ekspor dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan yang lebih besar pada penerimaan negara. Pada kenyataannya, Usaha Kecil merupakan pelaku ekonomi yang sering kali terpuruk dalam berbagai kesulitan dan kalah dalam persaingan, atau bahkan tergilas oleh usaha-usaha yang berskala lebih besar. Dalam kehidupan sehari-hari banyak petani tergusur, pedagang asongan dan pedagang kaki

lima dikejar-kejar, produsen industri kecil seringkali harus gulung tikar karena kalah bersaing dalam kualitas, harga dan sebagainya. Hal itu disebabkan Usaha Kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, Kendala-kendala tersebut pada umumnya dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya. Perlindungan dan pembinaan Usaha Kecil dalam era globalisasi harus mendapat perhatian agar usaha kecil tetap berperan pada pasar global karenanya diperlukan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan-peraturan dan kebijaksanaan yang antara lain meliputi peningkatan sarana dan prasarana bagi Usaha Kecil, penyediaan informasi penyederhanaan prosedur perizinan serta meningkatkan dan mengembangkan kemitraan, serta penyediaan permodalan.

Diundangkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, tepatnya undang-undang ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 26 Desember 1995 dan disahkan oleh Presiden Pada tanggal 26 Desember 1995, merupakan salah satu langkah melakukan usaha memperkuat komitmen dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Usaha Kecil tersebut. Dalam konsideran Huruf C Undang-undang Usaha Kecil dinyatakan bahwa Usaha Kecil sebagai bagian integral dunia usaha merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis mewujudkan struktur perekonomian nasional yang

semakin berkembang berdasarkan demokrasi ekonomi. Dan dalam konstitusi menyebut bahwa bangun (bentuk) perusahaan yang sesuai dengan amanat di atas adalah koperasi, akan tetapi perkembangannya telah bergeser dengan diberikan peran bentuk perusahaan lain selain koperasi, telah diberikan peran yang sangat besar, sehingga pembangunan ekonomi nasional oleh pelaku usaha menjadi tidak seimbang. Oleh karenanya dalam konsideran huruf (d) Undang-undang Usaha Kecil dinyatakan bahwa Usaha Kecil perlu diberdayakan (empowering) dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab perkembangan ekonomi dimasa datang. Dengan demikian pemberdayaan Usaha Kecil dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi dimasa mendatang merupakan suatu hal yang mendasar dibentuknya undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini diharapkan dapat memberdayakan Usaha Kecil, sehingga menjadi tangguh, mandiri dan juga dapat berkembang menjadi usaha menengah.

Dari hasil inventarisasi berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh sejumlah instansi Pemerintah, diketahui bahwa pengertian dan kriteria usaha kecil telah diatur oleh masing-masing instansi sehingga, pengertian



dan kriteria usaha kecil yang akan disebutkan disini, meliputi seluruh ketentuan yang ada kaitannya dengan Usaha Kecil.<sup>74</sup>

Kriteria Usaha Kecil yang diatur dalam surat Keputusan Menteri Perindustrian, dan Keputusan Bersama Menteri Koperasi dan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi, batasan asset Rp 600 juta tidak termasuk tanah, bangunan atau rumah. Dengan demikian maka asset Rp 600 juta tersebut terdiri dari peralatan atau perlengkapan dan barang-barang lainnya sebagai penggerak roda usaha. Tentu semua ini tergantung dari jenis usahanya. Bila usaha tersebut bergerak di bidang konveksi misalnya, maka yang menjadi asset di sini adalah peralatan mesin jahit dan peralatan lain pendukungnya.

UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang diundangkan pada tanggal 26 Desember 1995, Pasal 1 ayat (1)-nya menetapkan bahwa Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan Pasal 5 ayat (1) kemudian merinci kriteria Usaha Kecil sebagai berikut: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 milyar, dan Milik warga negara Indonesia, Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, berbentuk usaha orang perorangan, badan

---

<sup>74</sup> Sumiyati Sahala, SH. penelitian aspek hukum peningkatan Peranan Pengusaha Kecil dalam ekonomi BPHN 2000

usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Besarnya kekayaan bersih (asset) yang ditentukan oleh UU ini lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Akan tetapi penjualan (omzet) tahunannya justru dinaikkan setinggi satu milyar rupiah. Kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur oleh berbagai keputusan menteri bila dikaitkan dengan yang diatur dalam UU Usaha Kecil, kelihatannya tidak ada keseragaman. Namun semua ketentuan-ketentuan tersebut mempunyai penilaian yang sama bahwa tanah dan bangunan tempat usaha bukan termasuk asset. Mengenai pemilik usaha kecil terdapat persamaan pula, yaitu bahwa yang memiliki adalah warga negara Indonesia.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1232/KMK.013/1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan, bahwa pengusaha ekonomi lemah adalah perorangan atau badan usaha yang mempunyai asset (aktiva) setinggi-tingginya RP 300 juta, atau yang Penjualannya/omzet maksimal Rp 300 juta pertahun. Selanjutnya surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 286/M/SK/10/1989 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri, dalam Pasal 9 ayat (1) menetapkan kriteria bidang usaha dalam kelompok industri kecil, sebagai berikut: Investasi mencakup bangunan, mesin, dan peralatan dengan nilai seluruhnya tidak lebih dari RP 200.000.000,- (dua ratus juta

ripiah); Pemilik adalah warga negara Indonesia. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 286/M/SK/10/1989 kemudian disempunakan melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 13/M/SK-1/3/1990. Menurut ketentuan baru ini, kriteria bidang usaha dalam kelompok industri Kecil adalah sebagai berikut : Nilai kekayaan perusahaan seluruhnya (asset) tidak lebih dari Rp 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) tidak termasuk nilai rumah dan tanah yang ditempati, Pemilik adalah warga negara Indonesia. Lebih lanjut surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Kepada Usaha Kecil dan Koperasi oleh BUMN di lingkungan Departemen Perhubungan, memberi pengertian bahwa Usaha Kecil adalah perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai penjualan/omset pertahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), atau asset/aktiva yang ditempati, terdiri dari : Badan usaha (Fa, CV, PT dan Koperasi); Perorangan (pengrajin/industri Rumah Tangga, Petani, Peternak, Nelayan, Perambah Hutan, Penambang, Pedagang Barang dan Jasa angkutan dan sebagainya). Sedangkan Keputusan Bersama Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM Nomor OI/SKB/M/VI/1995, Nomor 11/SK/1995 menetapkan bahwa pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki asset, di luar tanah dan bangunan yang ditempati maksimum Rp 600 juta atau omzet maksimum Rp 600 juta pertahun.

Membahas industri kecil akan lebih baik jika terlebih dahulu mengetahui dan memahami tentang apa yang disebut dengan Usaha Kecil. Karena pada hakekatnya industri kecilpun adalah merupakan usaha skala kecil. Hanya saja bila dibandingkan dengan jenis usaha skala Kecil wujud dan industri kecil lebih memenuhi persyaratan sebagai lembaga industri yang utuh. Materi dari karakteristik skala kecil ini diambil dari makalah Tawang Alun yang uraiannya sebagai berikut:<sup>75</sup>

"Karakteristik usaha kecil sebenarnya dapat dilihat dari namanya "usaha" yang dimaksudkan di sini adalah upaya ekonomi., yang bertujuan untuk mengejar suatu keuntungan. Termasuk ke dalam kelompok ini berbagai jenis usaha kecil dalam bidang kerajinan manufakturing (industri kecil), perdagangan dan jasa lainnya.

Pengembangan usaha kecil dan koperasi merupakan tugas nasional yang sangat strategis, baik dari segi pembangunan ekonomi maupun dari segi perkembangan sosial-politik. Permasalahannya bersifat multi-aspek, sehingga dalam pemecahannya terkait banyak faktor. Dengan demikian upaya pengembangan usaha kecil harus dilaksanakan oleh semua pihak secara bersama-sama melalui program-program yang terarah dan terkoordinasi. Dalam pelayanan perbankan yang memadai terutama dalam pembiayaan usaha, merupakan salah satu kebutuhan esensial yang harus

---

<sup>75</sup> Tawang Alun, Peranan Usaha Kecil dalam Perekonomian Indonesia "dalam Seminar Perkulitan dan Persepatuan, Jakarta 18 Oktober 1987

dipenuhi, disamping peningkatan peluang usaha dan pembinaan kewirausahaan. teknologi serta pemasaran

### **1.1. Kebijakan Pemerintah sebelum Paket Januari 1990 (Pakjan 1990)**

Sejak awal kebijakan pemerintah didasari oleh pandangan bahwa usaha kecil perlu mendapat perhatian khusus dalam pelayanan jasa perbankan. Kebijakan tersebut pada tahap awal dilaksanakan terutama melalui berbagai program kredit bersubsidi yang ditunjang dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI ). antara lain Kredit Investasi Kecil / Kredit Modal Kerja Permanen (KIK/KMKP), KIK/KMK s.d. Rp.75 juta, Kredit Bimas/Inmas padi dan palawija. Kredit mini kredit keppres 14A/1980, Kredit Profesi Guru (KPG), Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) Kredit Koperasi dan berbagai program kredit lainnya. Berbagai program tersebut pada waktu itu dimungkinkan tanpa mengganggu keseimbangan makro karena adanya akumulasi dana pemerintah pada Bank Indonesia terutama yang berasal dari penerimaan minyak bumi.

Seiring dengan pelaksanaan program-program kredit bersubsidi tersebut Bank Indonesia mengadakan pula program bantuan teknis berupa pelatihan bagi staf perbankan konsultasi serta berbagai studi kelayakan. Bantuan teknis tersebut bertujuan membantu bank-bank melakukan identifikasi, penilaian kelayakan, administrasi serta pengawasan proyek-proyek usaha kecil.

Berubahnya situasi keuangan negara, kekhawatiran akan adanya bahaya ekspansi KLBI yang berlebihan terhadap kestabilan moneter dan keharusan untuk membina sistem perbankan dan perkreditan yang sehat dan mandiri dalam pendanaannya, telah mengharuskan dilakukannya penyesuaian-penyesuaian dalam kebijakan perbankan, demikian pula dalam kaitan dengan kebijakan mendorong peningkatan pelayanan bagi usaha kecil dan koperasi. Seperti kita ketahui, penyesuaian-penyesuaian ini antara lain tercermin dalam paket Juni 1983, paket Oktober 1988 (Pakto 1988), Paket Januari 1990 (Pakjan 1990) serta paket Mei 1993 (Pak Mei 1993).

Meskipun demikian, komitmen dan kebijakan untuk terus memperluas akses para pengusaha kecil kepada pelayanan perbankan tetap tidak berubah.

Dalam kebijakan meningkatkan pelayanan perbankan bagi usaha kecil bersandar pada empat strategi dasar:

**Pertama:** semua bank (terutama bank-bank nasional) diwajibkan mengalokasikan sebagian tertentu dari kredit yang diberikannya kepada usaha kecil. Kewajiban ini dimaksudkan agar semua bank menyadari pentingnya sektor usaha kecil dan memberikan pelayanan yang layak kepada sektor tersebut.

**Kedua:** melaksanakan berbagai kredit program untuk mendorong pemberian kredit kecil kepada sektor-sektor atau jenis usaha tertentu. Diantara kredit-kredit program ini ada yang seluruh atau sebagian dananya bersumber dari KLBI, ada yang bersumber dari APBN atau dana bantuan luar negeri dan ada

lagi yang seluruhnya dibiayai dengan dana bank-bank sendiri. Disamping kredit program, struktur permodalan usaha kecil juga diperkuat melalui penyediaan fasilitas modal ventura yang pada gilirannya akan lebih meningkatkan kelayakan usaha kecil tersebut untuk memperoleh kredit perbankan.

**Ketiga:** dari segi kelembagaan Bank Indonesia berusaha memperluas jaringan perbankan keseluruh tanah air dan mengembangkan lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pola kegiatan usaha kecil serta ekonomi pedesaan, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), koperasi simpan pinjam dsb.

**Keempat:** untuk membantu meningkatkan kemampuan bank-bank melayani usah kecil, khususnya dalam pemberian kredit, Bank Indonesia memberikan bantuan teknis melalui proyek pengembangan Usaha Kecil (PPUK) dan proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK). PPUK bertujuan mengembangkan kemampuan umum dari bank-bank khusus dalam melayani para pengusaha mikro disektor informal melalui pendekatan kelompok.

## **1.2. Kebijakan Pemerintah Setelah Pakjan 1990**

Kewajiban pemberian KUK ini dikenakan pada setiap bank sejak Pakjan 1990 dan ketentuan tersebut pernah mengalami penyesuaian pada bulan Mei 1993. sampai dengan 31 Maret 1997 yang lalu. Setiap bank

diwajibkan mengalokasikan minimal 20% dari seluruh portopolio pinjaman kepada usaha kecil. Kekurangan atau kelebihan dari jumlah yang diwajibkan tersebut dikenakan sanksi, atau diberikan insentif yang dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan.

Adanya kewajiban ini telah mendorong perkembangan pemberian KUK oleh bank-bank. Posisi KUK meningkat rata-rata sekitar 20 % per-tahun dari Rp. 14.1 triliun pada akhir Desember 1989 menjadi Rp.49.3 triliun pada akhir Januari 1997. Rasio KUK seluruh perbankan juga meningkat dari 17,5% pada akhir Desember 1989 menjadi 22,9% pada akhir Januari 1997.

Namun demikian, dilihat dalam tiga tahun terakhir, laju pertumbuhan KUK menunjukkan kecenderungan melambat, terutama untuk kelompok Bank Umum Swasta Nasional (BUSN). Rasio KUK dari kelompok bank persero masih mengalami peningkatan dari 21,6% menjadi 27,0% dan BUSN non devisa menurun dari 25,3% menjadi 18,1% Penurunan tersebut antara lain terjadi karena pertumbuhan total kredit yang jauh lebih besar dari pada pertumbuhan Kredit Usaha Kecil.

Menanggapi perkembangan ini Bank Indonesia pada bulan April 1997 kembali melakukan penyempurnaan dalam ketentuan kewajiban pemberian Kredit usaha Kecil, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil Nomor 30/4/KEP/Dir/ tanggal 1 April 1997. Penyempurnaan ini ditujukan untuk lebih memperkuat komitmen dan motivasi bank-bank, mempertegas sanksi dan imbalan dalam



pencapaian realisasi KUK dan menghilangkan praktek-praktek yang bersifat kosmetik dalam pemenuhan kewajiban dimaksud. Hal-hal pokok yang disempurnakan meliputi:

- a. Pemberlakuan kewajiban pemberian KUK bagi semua bank, termasuk bank asing dan bank campuran.
- b. Penetapan kewajiban pemberian KUK minimal 25% dari ekspansi kredit setiap tahun bagi bank-bank yang rasio KUK totalnya belum mencapai 20% dan 22,5% bagi bank-bank yang rasio total KUKnya telah mencapai 20% atau lebih.
- c. Pengenaan denda administratif sebesar 2% atas kekurangan dan pemberian imbalan/insentif 0,5% s.d. 1,5% atas kelebihan pencapaian jumlah yang diwajibkan.
- d. Penyesuaian kriteria KUK dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang usaha kecil dan penyesuaian maksimum KUK dari RP.250 juta menjadi RP.350 juta.

Namun Peraturan ini tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Peraturan bank Indonesia Nomor 3 /2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit usaha Kecil. Dalam hal ini Bank tidak lagi diharuskan menyalurkan sebagian kreditnya kepada usaha Kecil, namun hanya menganjurkan menyalurkan sebagian dananya melalui pemberian Kredit usaha Kecil.

Jadi tidak ada keharusan bagi bank apakah harus menyalurkan atau tidak kepada pengusaha kecil.

Pemberian Kredit kepada usaha Kecil tergantung dari masing-masing kebijakan bank. Disamping itu pemerintah juga membantu pengembangan Usaha Mikro dan Kecil dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/18/PBI/2003 tentang Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil. Bantuan teknis ini diberikan dalam bentuk pelatihan dan penyediaan informasi.

Dengan berlakunya Peraturan bank Indonesia tersebut diatas maka pasal 4 Peraturan bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil, dan angka VII Surat Edaran No. 3/9/BKA tanggal 17 Mei 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil, dinyatakan tidak berlaku.

### **1.3. Pengembangan usaha Kecil dan Menengah**

Dalam laporan tahunan Tahun 2001 Bank Indonesia tetap memberikan komitmen untuk mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk bantuan Teknis pengembangan Usaha kecil dan Mikro (PUKM) yang lebih difokuskan pada kegiatan pelatihan dan penyediaan informasi pada kegiatan pelatihan, penelitian dan penyediaan informasi di sektor perbankan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan bantuan teknis yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia , antara lain meliputi:<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Laporan tahunan Bank Indonesia Tahun 2001

- a. Dibidang pelatihan, Bank Indonesia telah melaksanakan kegiatan pelatihan kepada perbankan yang meliputi *training of facilitator* untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan pelatihan usaha Kecil dan mikro untuk Bank Umum.
- b. Dibidang penelitian, Bank Indonesia telah melakukan penelitian mengenai komoditas skala kecil yang potensial dibiayai oleh Bank yang mencakup 10 komoditas. Kesepuluh pola pembiayaan tersebut melengkapi 45 model kelayakan proyek Kemitraan terpadu dari berbagai sektor baik pertanian, industri maupun jasa yang telah diteliti dari tahun 1995 sampai dengan 1999.
- c. Dibidang penyediaan informasi Bank Indonesia telah memasukkan hasil-hasil penelitian dimaksud kedalam suatu Sistem Informasi terpadu pengembangan usaha Kecil ( SI-PUK) yang dapat diakses melalui internet /website Bank Indonesia. Informasi tersebut terdiri dari sistem informasi *Baseline Economic Survey* (SIB). Sistem informasi Agroindustri Berorientasi Ekspor (SIABE), Sistem informasi pola pembiayaan/lending Model Usaha Kecil ( SI-LMUK), Sistem penunjang Keputusan untuk investasi (SPKUI) dan sistem Informasi Prosedur memperoleh Kredit ( SI-PMK).
- d. Dalam rangka mendorong perbankan agar meningkatkan pembiayaan khususnya kepada Usaha Kecil dan menengah , Bank Indonesia juga

secara terus menerus melakukan sosialisasi dalam bentuk seminar atau lokakarya.

Sementara itu, kegiatan bantuan teknis lain yang masih ditangani oleh Bank Indonesia adalah Proyek Kredit Mikro (PKM) yang merupakan proyek kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan Asia Development Bank (ADB). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia seharusnya mengalihkan pengelolaan PKM kepada BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah, namun dengan pertimbangan dana pinjaman ADB belum ditarik seluruhnya, serta pelaksanaan PKM cukup berhasil dan kebutuhan masyarakat atas kredit PKM masih tinggi, maka atas kesepakatan ADB Pemerintah dan Bank Indonesia pelaksanaan PKM tetap dilakukan oleh Bank Indonesia sampai dengan berakhirnya jangka waktu penarikan pinjaman, yaitu 30 Juni 2001<sup>77</sup> yang kemudian diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2001.<sup>78</sup>

Saat ini PKM telah mencakup 15 Propinsi yang melibatkan 24 Kantor bank Indonesia (KBI) yang tersebar diberbagai propinsi di Indonesia. Sementara itu, jumlah maksimal kredit yang diberikan kepada nasabah mikro juga telah mengalami beberapa kali perubahan yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian. Perubahan yang terakhir menetapkan jumlah

---

<sup>77</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang proyek Kredit Mikro.

<sup>78</sup> Peraturan bank Indonesia Nomor 3/16/PBI/2001 tanggal 3 Oktober 2001 tentang perubahan kedua atas peraturaan Bank Indonesia No. 3/1/PB/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang proyek kredit Mikro

kredit PKM yang pertama kali diberikan maksimal sebesar Rp. 2 Juta per nasabah dan untuk kredit selanjutnya maksimal Rp.5 Juta per nasabah.<sup>79</sup>

Untuk periode tahun 2001, besarnya kredit yang telah disalurkan Bank Indonesia kepada usaha mikro berjumlah Rp.137,4 miliar, sehingga jumlah kredit kepada usaha mikro yang telah direalisasikan seluruhnya (sejak tahun 1996 s.d. Desember 2001) berjumlah Rp.417,1 milyar kepada 752.492 nasabah mikro dengan melibatkan BPD, BPR, Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LKDP) dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM). Berdasarkan tingkat kolektibilitasnya, PKM dinilai cukup berhasil karena memiliki kredit macet sebesar 1,2%.

Sementara itu, dalam hal kebijakan perkreditan, Bank Indonesia telah menyempurnakan ketentuan tentang KUK<sup>80</sup> yang pada intinya tidak lagi mewajibkan namun menganjurkan penyaluran KUK dan merubah plafon KUK menjadi Rp500 juta per nasabah. Realisasinya KUK pada tahun laporan posisinya mengalami peningkatan sebesar 14,8% dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menjadi Rp65 triliun (lihat tabel).

---

<sup>79</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/8/PBI/2001 tanggal 25 April 2001 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang Proyek Kredit Mikro.

<sup>80</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Surat Edaran Nomor 3/9/BKR tanggal 17 Mei 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil.

### Perkembangan Kredit Usaha Kecil

Penyebaran KUK	Posisi ( Triliun rupiah )			Pertumbuhan (%)		Pangsa (%)
	1999	2000	2001	2000	2001	2001
Menurut Jenis Penggunaan	37,2	56,6	64,9	52,1	14,8	100,0
Modal Kerja	15,7	22,0	27,3	40,0	23,8	42,0
Investasi	5,4	7,8	9,4	44,0	21,3	14,5
Konsumsi	16,1	26,8	28,3	66,6	5,4	43,5
Menurut Sektor Ekonomi	37,2	56,6	64,9	52,1	14,8	100,0
Pertanian	7,7	9,3	11,4	19,8	23,3	17,6
Perindustrian	1,1	1,7	2,6	54,5	51,3	4,0
Perdagangan Restoran dan Hotel	8,8	10,3	12,8	17,0	24,0	19,7
Jasa-Jasa	3,4	4,7	5,2	37,7	11,0	8,1
Lain-lain	16,2	30,6	32,9	89,3	7,6	50,6
Menurut Kelompok Bank	37,2	56,6	64,9	52,1	14,8	100,0
Bank Persero	25,4	30,5	36,9	20,3	21,0	56,8
BUSN Devisa	5,9	12,3	13,7	108,7	11,5	21,1
BUSN Non Devisa	1,8	5,1	2,5	180,4	-51,3	3,8
BPD	4,1	8,6	11,8	111,9	36,9	18,2
Bank Campuran % Asing	0,1	8,1	0,01	-1,4	190,3	0,01

Dengan perkembangan tersebut, sampai dengan akhir tahun 2001 rasio penyaluran KUK terhadap total kredit perbankan menjadi 18,5%.

Selain melalui kebijakan perkreditan, sebagai upaya penyediaan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah, Bank Indonesia masih tetap menjaga keseimbangan pembiayaan atau pendanaan kredit program. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan kepada BUMN koordinator untuk menyalurkan kembali angsuran Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sampai dengan KLBI tersebut jatuh tempo. Jumlah angsuran KLBI yang dikelola oleh BUMN Koordinator sampai dengan akhir tahun 2001 sebesar Rp1,45 triliun atau meningkat sekitar 44% dibandingkan posisi 31 Desember 2000 yang hanya Rp1,0 triliun. Dari dana hasil angsuran tersebut, telah disalurkan kembali sebesar Rp1,3 triliun atau meningkat sekitar 186%

dibandingkan Rp453,5 miliar pada tahun sebelumnya. Penyaluran dana yang disalurkan kembali tersebut sebagian besar dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Dengan melihat masih rendahnya penyaluran kembali dana hasil angsuran KLBI oleh BUMN Koordinator khususnya pada tahun 2000, maka pada tahun 2001 Bank Indonesia memandang perlu untuk mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan KLBI oleh BUMN Koordinator. Dari hasil evaluasi tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa pengelolaan KLBI oleh 3 BUMN Koordinator, khususnya dalam hal penyaluran kembali dana hasil angsuran KLBI belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing BUMN Koordinator tersebut, antara lain disebabkan karena angsuran KLBI yang dikelola berjangka waktu lebih pendek daripada jangka waktu kredit yang akan di *relending*, sehingga dikhawatirkan terjadi *mismatch* pendanaan. Di samping itu masih sangat terbatasnya jaringan kantor dan permodalan PT.PNM juga menjadi kendala rendahnya penyaluran kembali dana hasil angsuran KLBI tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, Bank Indonesia telah merekomendasikan kepada Pemerintah untuk lebih memberdayakan BUMN Koordinator agar dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Hal-hal yang direkomendasikan antara lain perlu ditunjuknya satu BUMN Koordinator sebagai pengelola kredit program secara keseluruhan. BUMN Koordinator

dimaksud selanjutnya dapat dijadikan cikal bakal bagi terbentuknya suatu bank khusus yang membiayai usaha kecil dan menengah, atau sebagai lembaga sementara yang khusus menangani pembiayaan usaha kecil dan menengah (termasuk kredit program) sampai dengan terbentuknya bank khusus tersebut.

Selain itu, dalam rangka pengembangan usaha kecil dan menengah, berbagai masukan telah disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah antara lain perlunya pemanfaatan dana Surat Utang Pemerintah dalam rangka kredit program (SUP Nomor 005)<sup>81</sup> secara optimal guna membantu pendanaan kredit program. Sampai dengan posisi akhir tahun 2001, dana SUP Nomor 005 yang dapat dicairkan adalah sebesar Rp3,1 triliun dan baru dicairkan Pemerintah sebesar Rp859 miliar, sehingga dana yang masih dapat dicairkan sebesar Rp2,2 triliun.

## **2. Peraturan Perundang-undangan yang mempengaruhi perkembangan usaha kecil**

Usaha kecil diatur dengan Undang-undang Nomor 9 / 1995 yang diundangkan pada tanggal 26 Desember 1995. Dalam pasal 1 menetapkan bahwa Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan

---

<sup>81</sup> Surat Utang Pemerintah dalam rangka kredit program (SUP Nomor 005) adalah surat utang yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk pembiayaan kredit program sebagai pengganti dana KLBI karena dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan KLBI untuk pembiayaan kredit program. Besarnya SUP Nomor 005 adalah Rp9,97 triliun, tetapi penarikannya tergantung dari KLBI yang telah diberikan untuk kredit program yang jatuh tempo dan diterima oleh Bank Indonesia dalam tahun 2000 dan 2001.



memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Kemudian dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan kriteria usaha kecil sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih tidak melebihi Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat berusaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) yang diusahakan oleh warga negara Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1232/KMK.013/1989<sup>82</sup> tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi menyatakan bahwa pengusaha ekonomi lemah adalah perorangan atau badan Usaha yang mempunyai asset ( aktiva) setinggi-tingginya Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah) selanjutnya berdasarkan surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 286/M/SK/10/1989<sup>83</sup> tentang ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Pemberian ijin Usaha Industri, dalam pasal 9 ayat (1) menetapkan nilai assetnya tidak lebih dari Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) Surat Keputusan Menteri Perindustrian ini disempurnakan dengan surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 13/M/SK-1/3/1990<sup>84</sup>. Menurut ketentuan baru ini, kriteria bidang usaha dalam kelompok industri kecil adalah nilai kekayaan seluruhnya (asset) tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk nilai rumah dan tanah yang ditempati, sedangkan Keputusan bersama Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan

---

<sup>82</sup> Surat Keputusan menteri Keuangan No 1232/KMK.013/1989

<sup>83</sup> Surat Keputusan Menteri Perindustrian No.286/M/SK/10/1989

<sup>84</sup> Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 13/M/SK-1/3/1990

Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM<sup>85</sup> Nomor 01/SKB/M/VI/1995, dan Nomor 11/SK/1995 menetapkan bahwa pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki asset diluar tanah dan bangunan yang ditempati maksimum Rp. 600.000.000,- ( enam ratus juta rupiah ) atau omset maksimum Rp. 600.000.000,- ( enam ratus juta ) per-tahun.

Dilihat dari definisi / kriteria yang diberikan oleh beberapa instansi ternyata berbeda-beda hanya kepemilikannya harus warga negara Indonesia yang sama. Dengan banyaknya instansi yang merasa berwenang dan berhak mengatur tentang usaha kecil menyebabkan para pihak mengalami kebingungan karena banyak sekali Peraturan yang mengatur dan antara Peraturan yang satu dengan yang lain tidak sama, Untuk itu pemerintah haruslah mengadakan kordinasi dalam melaksanakan program dalam upaya pengembangan usaha kecil.

Pengembangan UKM di Indonesia selama ini dilakukan oleh Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Selain Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), instansi yang lain seperti Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Keuangan dan Bank Indonesia juga melaksanakan fungsi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah tahun 2002 s/d 2004. Demikian juga Departemen Keuangan melalui SK Menteri Keuangan ( Menkeu) Nomor 316/KMK/016/1994 mewajibkan BUMN untuk menyisihkan 1-5% laba

---

<sup>85</sup> Keputusan Bersama Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menteri Negara Penggerak Dana Industri/Ketua BKPM No. 01 /SKB/M/VI/1995 dan No. 11 /SK/1995

perusahaan bagi pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Bank Indonesia sebagai otoritas keuangan dahulu mengeluarkan peraturan mengenai kredit bank untuk UKM, meskipun akhir-akhir ini tidak ada kebijakan khusus terhadap perbankan mengenai pemberian kredit Usaha Kecil lagi. Demikian juga kantor ataupun instansi lainnya yang terlibat dalam "bisnis" UKM juga banyak.

Meski banyak terlibat dalam pengembangan UKM namun tugas pengembangan UKM yang dilimpahkan kepada instansi-instansi tersebut diwarnai banyak isu negatif misalnya politisasi terhadap KUKM, terutama koperasi serta pemberian dana subsidi JPS yang tidak jelas dan tidak terarah. Demikian juga kewajiban BUMN untuk menyisihkan labanya 1-5% juga tidak dikelola dan dilaksanakan dengan baik. Kebanyakan BUMN memilih persentase terkecil, yaitu 1% sementara banyak UKM yang mengaku kesulitan mengakses dana tersebut. Selain itu kredit perbankan juga sulit untuk diakses oleh UKM yang belum bankable. Apalagi Bank Indonesia tidak lagi membantu usaha kecil dalam bidang permodalan secara langsung dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Dalam suatu usaha modal sangat penting sebagai sumber daya dalam menentukan menyongsong kesuksesan usaha termasuk proses produksi. Kalau kekurangan modal, maka akan sulit menumbuhkan usaha yang produktif, meskipun tenaga kerja melimpah, dan ada potensi proses tanpa

modal yang memadai sulit mengharapkan proses produksi akan berjalan lancar.

Dalam kaitannya dengan usaha kecil, kebutuhan pembiayaan untuk setiap unit usaha sebenarnya relatif kecil. Meskipun demikian pembiayaan usaha kecil secara sehat dan berkelanjutan bukanlah pekerjaan yang mudah melainkan memerlukan strategi, pendekatan dan juga pengaturan yang mengacu kepada kondisi dan karakteristik usaha kecil itu sendiri.

Usaha kecil yang sangat banyak secara keseluruhan membutuhkan pembiayaan yang besar sehingga sering memerlukan dukungan pemerintah. Disamping itu usaha kecil yang tersebar di pelosok-pelosok hingga di seluruh Indonesia sulit terjangkau karena sampai ke pedesaan memerlukan jaringan kantor yang luas dan sumber daya manusia yang banyak untuk melayani pembiayaan usaha kecil tersebut. Permasalahan lain adalah kelompok usaha kecil belum biasa dengan sistem dan mekanisme keuangan modern seperti aspek perizinan dan aspek hukum berkenaan dengan jaminan serta administrasi keuangan.

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa usaha kecil mempunyai kelemahan di bidang pemasaran, teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajerial, dan juga masalah klasik yang selalu di hadapi usaha kecil adalah kekurangan modal untuk kelangsungan usahanya.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Paramita Prananingtyas, Pembaharuan peraturan Perundang-undangan mengenai usaha kecil dan menengah di Indonesia. "Makalah di sampaikan pada seminar berjudul Kajian Peraturan Perundang-undangan tentang Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah" Jakarta, 26 Juli 2001, hal 3.

Kesulitan dalam permodalan menyebabkan usaha kecil sulit mengembangkan usahanya baik untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan memperbaharui mesin-mesinnya maupun untuk memasarkan hasil produksinya, terlebih lagi untuk memasarkan produksinya keluar negeri.

Usaha kecil umumnya mengalami kesulitan modal untuk memulai usahanya. Di pihak lain, yaitu perbankan baik umum/komersial kurang suka membiayai usaha kecil pemula karena tidak mempunyai riwayat kredit untuk dijadikan dasar pengambil keputusan pembiayaan. Selain itu usaha kecil pemula belum berpengalaman melaksanakan usahanya sehingga mungkin sekali membuat kesalahan bisnis yang mampu di hindari oleh pengusaha yang telah berpengalaman. Usaha kecil juga kurang paham kredit investasi. Penilaian kredit investasi lebih sulit, memakan waktu lama, dan mahal dibandingkan dengan penilaian kredit modal kerja. Meskipun jumlah kredit yang diminta relatif kecil namun investasi sering melibatkan agunan barang tidak bergerak, sehingga perlu keluwesan dari pihak bank umum dalam hal agunan.<sup>87</sup>

Perhatian terhadap kebutuhan pembiayaan/kredit usaha kecil di Indonesia sebenarnya juga mempunyai sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak dari masa penjajahan Belanda, yang antara lain tercermin dari pendirian Algemeene Volkscredite Bank pada tahun 1934 yang akhirnya berubah menjadi Bank Rakyat Indonesia.

---

<sup>87</sup> Asian Development Bank, *Best Parties In Credit Programmes Design, ADBSME Development Technical Assistance, Indonesia, 2001-2002*, hal 6-7.

Namun dalam perkembangannya, penanganan pembiayaan mengalami pasang surut, yang secara keseluruhan mungkin lebih banyak "surut daripada pasang" seperti tercermin di lapangan. Sumber pembiayaan besar maupun kecil secara umum berasal dari dua sumber, yaitu sumber internal, berupa modal dan laba usaha, dan sumber eksternal berupa utang kepada pihak lain termasuk utang kepada bank . walaupun kurang lazim, pembiayaan eksternal bisa juga dari hibah pihak lain. Pinjaman dari pihak lain bisa dari keluarga teman ataupun perusahaan lain seperti bank dan lembaga keuangan lainnya.

Pembiayaan yang berasal dari kredit perbankan masih menghadapi berbagai kendala sementara itu pembiayaan dari lembaga lainnya masih belum berkembang. Parman Nataatmadja, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia ( APPI) mengatakan bahwa pelaku usaha kecil, menengah, umumnya berupaya mendapatkan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan yang sudah cukup di kenal seperti Bank Umum dan BPR. Akan tetapi masih sangat sedikit usaha kecil yang menggunakan sumber pembiayaan lain seperti leasing dan anjak piutang. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi lembaga multi finance tersebut sehingga usaha kecil belum melihat potensi pemanfaatan dana tersebut untuk mendukung usahanya.

Untuk lebih mendukung keuangan dan permodalan usaha kecil, pemerintah menempuh berbagai upaya seperti mendirikan lembaga-lembaga dan

mengembangkan program untuk membiayai usaha kecil diluar perbankan, membentuk dan mengembangkan lembaga penjamin dan asuransi kredit, serta memberikan pembinaan, pelatihan serta bantuan teknis lainnya kepada usaha kecil. Dengan upaya dan langkah tersebut pemberian pembiayaan kepada usaha kecil baik yang melalui perbankan maupun yang melalui non perbankan seperti lembaga keuangan diharapkan dapat ditingkatkan, Dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang ada, dewasa ini terdapat beberapa lembaga keuangan yang memfokuskan kegiatannya untuk memberikan dukungan pembiayaan kepada usaha kecil.

Tumbuhnya berbagai lembaga pembiayaan tidak dapat dilepaskan dari adanya berbagai deregulasi. Upaya pemerintah untuk meningkatkan usaha pembiayaan dikonkritkan melalui deregulasi dengan Kepres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/ KMK 031/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang mulai berlaku tanggal 20 Desember 1988 ( lebih dikenal dengan Pakdes 20 1988).

## **2.1. Perusahaan modal ventura ( ventura capital )**

Pada umumnya menyediakan modal untuk mendirikan atau memulai usaha (seed capital) atau untuk kebutuhan usaha skala kecil yang beresiko tinggi namun mempunyai potensi tinggi untuk berkembang. Modal perusahaan modal ventura dapat berasal dari pemerintah atau pihak swasta.

Bidang usaha yang dibiayai hanya berkaitan dengan high tech dan kegiatan yang bersifat penemuan (inovative).<sup>88</sup>

Di Indonesia, perusahaan modal ventura memberikan pembiayaan kepada pengusaha kecil dan menengah untuk semua jenis usaha yang dipandang prospektif untuk berkembang. Meskipun untuk sebagian besar pembiayaan diberikan kepada usaha kecil dan menengah yang bergerak dengan agribisnis (pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan lain-lain). Plafon pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan. Sampai tahun 2002 terdapat 30 perusahaan yang menjalankan bisnis modal ventura. Dari jumlah tersebut, 26 perusahaan berafiliasi dengan PT Bahana Arta Ventura (PT BAU), anak perusahaan BUMN PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI) yang disebut dengan PT Modal Ventura Dinas (PT MVD). Jumlah UKM yang mendapat pembiayaan dari PT BAU dan PT MVD hingga akhir Februari 2003 baru sekitar 900 perusahaan pasangan usaha (PPU) dengan sekitar 620 ribu anggota. Modal ventura yang memperoleh dana dari PT BAU memberikan pembiayaan maksimum Rp 500 juta per entity, modal ventura yang memperoleh dana dari PT MVD memberikan pembiayaan maksimum Rp.100 juta per entity. Jangka waktu pembiayaan modal berkisar antara 3 sampai 5 tahun.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Achjar Ilyas, Kajian Hukum atas pembiayaan usaha kecil melalui kredit "perbankan", tesis program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2003, Hal. 115.

<sup>89</sup> Lihat Harian Suara Pembaruan, Rubrik Ekonomi, 9 Mei 2003.



## **2.2. PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM)**

PT Permodalan Nasional Madani adalah sebuah lembaga keuangan khusus yang sahamnya 100 persen milik pemerintah, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38/1999 tanggal 25 Mei 1999 dan akta notaris Nomor 1 Tanggal 1 Juni 1999. Modal dasar PT Permodalan Nasional Madani berjumlah Rp.1,2 triliun dan dari jumlah tersebut baru disetorkan sebesar Rp.300 milyar. Tugas utama Permodalan Nasional Madani adalah memberikan pembiayaan kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi berdasarkan wilayah usaha serta prinsip ekonomi pasar. PT Permodalan nasional Madani mengembangkan sistem pembiayaan alternatif yang tidak menekankan pada aspek jaminan dan bunga. Selain memberikan pembiayaan, PT Permodalan nasional Madani juga memberikan bantuan manajemen sebagai paket yang terpisahkan dengan bantuan permodalan.<sup>90</sup>

Kegiatan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) ini adaiah untuk meningkatkan peran serta usaha kecil menengah dan koperasi (UKMK). Dalam perekonomian nasional dan meningkatkan permodalannya, PNM memiliki visi menjadi lembaga keuangan terkemuka yang secara berkesinambungan meningkatkan nilai tambah bagi UKMK dan mampu meningkatkan permodalannya maupun laba usahanya.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, PT Permodalan Nasional Madani bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan seperti modal ventura,

---

<sup>90</sup> Lihat Web Site PT PNM (<http://www.pm.m.co.id> ) tanggal 23 Juni 2003

baik syariah, koperasi simpan pinjam baik yang khusus di dirikan maupun yang sudah ada dan tersebar di seluruh propinsi di Indonesia. Sumber dana yang disalurkan oleh PT Permodalan Nasional Madani terutama berasal dari modal pemerintah, dana eks KLBI (SK Menteri Keuangan RI Nomor 487/KMK.017/1999, tanggal 13 Oktober 1999. Selain dana dari eks KLBI modal PT Permodalan Nasional Madani juga berasal dari surat utang pemerintah untuk pembiayaan usaha kecil. Sumber pembiayaan yang berasal dari investasi lokal dan luar negeri dapat dihimpun oleh PT Permodalan Nasional Madani melalui pengelolaan dana investasi oleh unit usaha PNM *Investment management*.

Secara garis besar usaha yang dapat dibiayai PNM diarahkan ke bidang-bidang yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. mempunyai employment effect yang besar.
2. mempunyai potensi ekspor (menambah devisa)
3. merupakan substitusi impor
4. memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang tersedia di Indonesia
5. memberikan nilai tambah melalui pendayagunaan teknologi semaksimal mungkin.

### **2.3. Lembaga Keuangan Mikro**

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan mikro berupa penghimpunan dana dan

pemberian pinjaman dalam jumlah kecil yang ditujukan untuk kelompok berpenghasilan rendah dengan tujuan memperluas lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan. Lembaga Keuangan Mikro secara umum mencakup lembaga keuangan seperti badan kredit desa (BKD) dan Lembaga Desa dan Kredit Pedesaan (LDKBP). Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perbankan serta koperasi simpan pinjam (KSP) dan Baitul Mal wattamwil (BMT) yang didirikan berdasarkan Undang-undang perkoperasian, serta lembaga keuangan lainnya yang menjalankan kegiatan serupa. Hingga saat ini Lembaga Keuangan Mikro belum diatur tersendiri oleh Undang-undang tentang keuangan Mikro.

#### **2.4. Lembaga Asuransi dan Penjaminan Kredit**

Asuransi Kredit berfungsi mengalihkan resiko tidak terbayarnya kredit dari pihak kreditor kepada pihak lembaga atau perusahaan asuransi kredit sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak. Dalam hal yang diasuransikan adalah kredit bank, maka resiko tidak terbayarnya atau macetnya kredit dialihkan dari bank kepada asuransi.

Pinjaman kredit diperlukan untuk membantu pengusaha dalam mendapatkan kredit dari kreditor, baik kreditor perbankan maupun kreditor lainnya. Pinjaman kredit memiliki masalah pada pengalihan resiko kegagalan debitor sebagai pihak terjamin sehingga kewajibannya kepada kreditor sebagai pemberi jaminan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang

diperjanjikan. Indonesia telah merintis pendirian lembaga penjamin kredit (LPK). Pada tahun 1971 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi c.q. Ditjen Koperasi telah membentuk lembaga jaminan kredit koperasi (LJKK) dengan tugas utama menjamin usaha kredit yang disalurkan kepada koperasi.

Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 11 Januari 1971 dan secara resmi berdiri tanggal 6 April 1971, PT Askindo didirikan Pemerintah dengan tujuan agar mempermudah akses bagi UKM untuk memperluas kredit bank bagi usahanya. Dalam hal ini PT Askindo bertindak sebagai penjamin atau *Collateral Institution* yang menjamin kredit bank bagi pengusaha kecil dan menengah. Pemegang saham PT Askindo adalah negara RI, dalam hal ini Departemen Keuangan (45%) dan Bank Indonesia (55%).<sup>91</sup>

### **3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pemberian Kredit Perbankan kepada Usaha Kecil.**

Dari uraian terdahulu telah dipaparkan usaha-usaha pemerintah dalam memberikan bantuan kepada pengusaha kecil serta beberapa deregulasi telah dikeluarkan namun di lapangan masih terdapat banyak kendala-kendala yang dihadapi baik oleh pengusaha kecil sendiri sebagai debitur maupun oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya sebagai kreditur. Hingga Saat ini terdapat kesulitan-kesulitan yang merupakan

---

<sup>91</sup> Ali Marwan Hanan, Menimbang peran lembaga penjamin kredit dalam mengacu kredit usaha kecil dan menengah, *Harian Republika*, 19 Juni 2003

kendala bagi masyarakat berpenghasilan kecil untuk memperoleh pelayanan perbankan sehingga kredit yang ditujukan bagi usaha kecil belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

- A. Dari sisi masyarakat berpenghasilan rendah, (debitur) kendala untuk memperoleh kredit yang dihadapi usaha kecil cukup bervariasi, seperti sulitnya membuktikan kelayakan usahanya keterbatasan jangkauan dengan memasarkan produksinya, teknis produksi, manajemen dan organisasi serta belum mempunyai usaha kecil untuk memenuhi persyaratan bank teknis antara lain jaminan ( agunan) dan perijinan.
- B. Dari pihak bank, kesulitan timbul dengan menyalurkan kreditnya kepada usaha Kecil ini adalah tingginya biaya transaksi, dan sulitnya memperoleh Usaha Kecil yang layak untuk diberikan kredit. Disamping itu tingginya resiko yang dihadapi dan terbatasnya kantor cabang bank untuk ditingkat kecamatan merupakan kendala yang cukup berarti.

Secara rinci kendala-kendala itu sebagai berikut:

- a. Keterlibatan instansi terkait atau pihak ketiga misalnya Koperasi Unit Desa atau LSM dengan menyalurkan kredit program. Kasus yang paling terkenal penyaluran jatah kedele para pengrajin tahu tempe oleh Pejabat Perpuskopti ( Pusat Koperasi Tahu Tempe) Jawa Tengah bersama pengurus CV Hidup Bahagia Semarang antara tahun 1981 s/d Tahun 1983. Jumlah seluruh kerugian Negara sebesar Rp. 5.708.693.268,74 Putusan Mahkamah Agung No.78 K/Sip/1986 telah menetapkan bahwa

terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi melanggar Undang-Undang Nomor 3 /1971 jo. Pasal 55 ayat 1 sub 1 jo Pasal 64 jo Pasal 65 KUHP. Disamping itu juga terbukti melakukan pemalsuan atau menggunakan surat palsu melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat 1 sub 1 jo Pasal 64 jo Pasal 65 KUH Pidana. Disamping itu kasus penyelewengan dana KUT yang telah disalurkan ke Kabupaten Malang sebesar Rp. 300 milyar untuk masa tanam 1998/1999 oleh oknum pengurus Pusat. Peran serta Masyarakat (PPM), sebuah LSM yang menjadi perantara dalam pencarian KUT dari bank kepetani. Dalam hal ini petani tidak mendapat kucuran dana KUT sebagaimana seharusnya. Para Petani melalui Rencana Definitif Kerja Kelompok mestinya mendapat dana KUT sebesar Rp.2 miliar tetapi dalam kenyataannya hanya mendapat Rp.10 juta. Penyimpangan tersebut antara lain dilakukan dengan memakai identitas petani dan penggelembungan (mark up) luas areal sawah yang mendapat KUT. Dalam prinsip kehati-hatian seharusnya kredit langsung diberikan kepada debitur ( petani) tanpa ada perantara atau pihak ketiga. Sementara itu pihak bank maupun Departemen Koperasi yang menyalurkan dana /kreditnya ( KUT) tersebut selalu saling tuding dan saling menyalahkan yaitu perbankan hanya merasa sebagai channelling (penerus kredit) saja sementara itu Departemen Koperasi menyatakan yang mencairkan kredit adalah Bank Jatim<sup>92</sup>. Penyalah

---

<sup>92</sup> Harian Kompas 10 Nopember 1999. Dana KUT diselewengkan, Perbankan dan Koperasi saling tuding.

gunaan KUT juga terjadi di Sulawesi selatan saat itu Kejaksaan Tinggi Sulsel memeriksa 13 Pengurus KUD dari 5 Kabupaten yaitu Bone, Barru, Mamuju, Palopo dan Sidrap serta kota Madya Parepare, dan jumlah yang diduga diselewengkan Rp. 700 juta. Disamping Pengurus KUD juga ada LSM di Kabupaten Barru, Wajo, Jeneponto, Sinji dan Bulukumba juga terlibat dengan penyelewengan KUT. Cara penyelewengan di Kabupaten Jeneponto dengan memotong nilai KUT Rp. 50 juta menjadi Rp.20 Juta. Bahkan ketua DPRD Sulsel disinyalir terlibat dalam hal penyelewengan dana KUT yang bernilai ratusan miliar sehingga meminta keseriusan pihak Kejaksaan mengusut tuntas kemungkinan adanya LSM dan KUD yang terlibat dalam kasus tersebut.<sup>93</sup>

Dari beberapa kasus yang terjadi nampak bahwa keikutsertaan pihak ketiga dalam hal ini Koperasi dan LSM dalam penyaluran kredit program terbukti telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya dipakai untuk kepentingan pribadi atau lembaganya. Hal tersebut dapat terjadi karena pemantauan-pemantauan pengawasan bank terhadap penerusan dan pengelolaan dana yang diterima oleh Koperasi dan LSM sangat minim sehingga "peluang" tersebut dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri atau lembaga secara tidak bertanggung jawab. Disamping itu Koperasi dan LSM tidak punya kompetensi dan

---

<sup>93</sup> Harian Kompas, 28 Januari 2000, 13 Pengurus KUD tersangka KUT penjelasan Kejaksaan Tinggi Sulsel.

profesionalisme dibidang perbankan sehingga KUT yang disalurkan mereka menimbulkan masalah dan menjadi tidak lancar. Kondisi tersebut bisa terjadi karena dalam hal ini fungsi bank hanya sebagai Chanelling kredit tanpa beban harus menanggung resiko kemacetan kredit.

- b. Status Bank penerima KLBI sebagai chanelling, bank bukan sebagai executting bank.

Dalam hal ini yang harus diteliti lebih jauh adalah sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab bank sebagai executting ( pemberi kredit) dan Chanelling (penyalur kredit) dalam pemberian kredit untuk usaha kecil, khususnya dalam hal perjanjian penyaluran kredit untuk Usaha Kecil antara penyanggah dana (misalnya BI ) dengan bank tersebut.

Dari berbagai perjanjian kredit dimana bank dapat bertindak sebagai executting dapat disimpulkan bahwa bank bertindak untuk dua pihak yaitu sebagai debitur pada waktu berhadapan dengan Bank Indonesia sebagai penyanggah dana, dimana bank tersebut harus mengembalikan seluruh pinjamannya kepada Bank Indonesia. KLBI yang diterima beserta bunganya dengan presentase tertentu bahkan jika bank tidak mengembalikan dananya (KLBI) tersebut beserta bunganya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan hukum yang diperlukan. Selanjutnya dana yang dapat dari Bank Indonesia tersebut disalurkan kepada nasabah debitur dalam bentuk penyaluran kredit program



sehingga dalam hal ini bank bertindak sebagai kreditur. Dengan demikian bank harus bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit beserta bunganya secara keseluruhan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip dan kewajiban pembayaran utang yang menunjuk pada persetujuan diantara kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1393 KUH Perdata dan Ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 7 / 1992 tentang Perbankan dan kemudian dirubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998.

Sekalipun Bank Indonesia tidak pernah mengambil tindakan hukum yang diperlukan dalam hal bank ingkar janji, namun Bank Indonesia akan mendebet rekening giro/saldo giro bank tersebut di Bank Indonesia pada saat jatuh tempo. Dalam hal saldo giro bank telah bersaldo merah (melampaui dana yang tersedia) Bank Indonesia ada kalanya menempuh jalan lain antara lain dengan melakukan perpanjangan kredit likuiditas Bank Indonesia.

Untuk memperketat pengembalian dana tersebut ( KLBI) Bank Indonesia, kantor cabang harus melaporkan jumlah pelunasan kredit program dari Koperasi/LSM setiap akhir bulan kepada Bank Indonesia, dan atas laporan pelunasan tersebut Bank Indonesia akan menarik kredit likuiditas yang diberikannya. Dalam hal laporan tersebut melewati batas waktu yang ditentukan, maka jumlah pelunasan kredit program yang terlambat dilaporkan akan ditarik dan dikenakan suku bunga deposito

tertinggi yang berlaku pada Bank yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan agar bank tidak menyalahgunakan dana murah tersebut dengan menyalurkannya kedalam bentuk kredit komersial dengan suku bunga pasar.

Sementara jika bank hanya sebagai channelling, bank yang hanya sebagai penerus kredit (KLBI) yang dananya dari Bank Indonesia, Pemerintah atau lembaga Internasional, Bank tidak akan menanggung resiko. Kegagalan kredit sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah dan atau Bank Indonesia. Jika pengambil alihan resiko ini berlebihan maka penyaluran kredit tidak akan efisien dan dalam hal ini akan merusak sistem penilaian kelayakan pemberian kredit yang secara tidak langsung merusak karakter pengusaha kecil yang pada dasarnya jujur.

Sekalipun demikian dalam sistem channelling ini Bank wajib meneruskan pembayaran kredit dari debitur ke Bank Indonesia/ Pemerintah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta angsurannya. Hal ini berarti bank harus senantiasa mengusahakan agar kredit dapat dibayar sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan pada waktu kredit diberikan kepada usaha kecil. Demikian pula dalam hal ini dimana bank sebagai channelling bank harus menganalisa dan memeriksa persyaratan administrasi serta mengawasi penggunaan kredit dan membantu dalam hal pengembalian kredit program tersebut.

Dengan perbandingan kedua posisi bank tersebut diantara bank sebagai executing dan bank sebagai channelling dalam penyaluran kredit program tersebut dilihat dari persyaratan dan ketentuannya nampak bahwa dalam hal bank posisinya sebagai channelling bank tidak berstatus sebagai debitur yang harus mengembalikan kredit program (KLBI) yang telah diterimanya, sementara itu dalam penerusan pemberian kredit tersebut kepada debitur ( KUD/LSM) secara tegas disebutkan bahwa bank bertindak sebagai kreditur.<sup>94</sup> Dalam hal ini timbul pertanyaan adalah atas dasar apa bank itu menyatakan dirinya sebagai kreditur. Karena dalam hal ini posisi bank hanyalah sebagai penerus kredit program itu kepada KUD dan LSM. Secara hukum jika bank posisinya hanya sebagai penerus kredit, dalam akad kredit antara bank dengan debitur (KUD/LSM) status bank itu harus dijelaskan yaitu untuk dan atas nama penyanggah dana yang sebetulnya dalam hal ini Bank Indonesia atau pemerintah.

- c. Persyaratan ( termasuk permintaan jaminan) kredit program dan kredit untuk Usaha Kecil dengan dana bank sendiri. Dalam hal ini penulis dapat membagi dua kredit yang disalurkan :
  - 1. kelompok kredit bagi usaha kecil yang disebut kredit program, dimana dananya diperoleh dari KLBI misalnya KUT kredit kepada KUD ( KKUD) dan kredit kepada Koperasi Primer dan Anggotanya.( KKPA),

---

<sup>94</sup> Disimpulkan dari perjanjian Penerusan Kredit kepada Pengusaha kecil dan pengusaha Mikro ( KPKM) antara Bank Indonesia dengan Bank.

2. Kredit Usaha Tani dan Kredit bagi Usaha Kecil yang didanai oleh dana yang berhasil dihimpun oleh bank sendiri misalnya KUPEDES dan Kredit Kelayakan Usaha.

Dalam rangka kredit program yang memperoleh dana dari KLBI pun dibagi dua kelompok juga yaitu :

1. Kelompok yang dananya tidak seluruhnya dari Bank Indonesia atau pun sebagian bank masih mempunyai pangsa ( Share) dalam penyaluran kredit tersebut antara lain KKPA dan KKUD.
2. Kelompok satunya lagi dimana dana seluruhnya berasal dari Bank Indonesia atau pemerintah misalnya kredit Usaha Tani.

Dalam kelompok pertama dimana dananya tidak seluruhnya berasal dari Bank Indonesia atau pemerintah seperti KKPA dan KKUD kredit diberikan kepada debitur berdasarkan analisis kelayakan kredit dengan perjanjian kredit yang klausulanya cukup sempurna seperti halnya kredit komersial lainnya antara lain dipersyaratkannya jaminan yang cukup dan pengikatan jaminan tersebut secara sempurna, sementara pada KUT yang dananya seharusnya berasal dari Bank Indonesia atau pemerintah pemberiannya tidak berdasarkan analisis kelayakan kredit karena penyaluran kredit tersebut seolah-olah " perintah" dengan tujuan tertentu antara lain meningkatkan produktivitas padi dan tujuan politis tertentu karena jumlah petani merupakan mayoritas dari pada penduduk Indonesia yang justru dalam

kondisi yang memprihatinkan. Pemberian KUT tidak berdasarkan analisis kelayakan demikian pula perjanjian kreditnya tidak mensyaratkan diserahkannya agunan oleh KUD/LSM penerus KUT tersebut kepada petani.

Sekalipun ada perbedaan dalam kedua kelompok kredit program tersebut diatas, namun terdapat perbedaan yang lebih tajam dalam persyaratan kredit antara kelompok kredit program kredit Usaha Kecil yang didanai dana bank sendiri. Dalam kredit yang merupakan kredit likuiditas dari Bank Indonesia penerapan persyaratan kredit relatif lebih lunak atau tidak terlalu ketat dibandingkan dengan kredit Usaha Kecil yang dananya berasal dari dana masyarakat yang dihimpun oleh bank sendiri. Persyaratan yang lebih ketat tersebut antara lain: jangka waktu kredit, angsuran kredit, suku bunga kredit, keharusan adanya jaminan/agunan dan eksekusinya serta sanksi yang diterapkan apabila timbul kredit macet.

Hal tersebut antara lain disebabkan pada kredit dengan likuiditas Bank Indonesia dianggap tidak terlalu merugikan bank ( mengingat pangsa bank jauh lebih kecil dibandingkan dengan pangsa kredit likuiditas Bank Indonesia) apabila terjadi kredit macet. Sementara itu timbulnya kredit macet pada kredit yang diberikan dengan dana sendiri akan menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi bank karena bank tetap harus membayar biaya dana/bunga yang cukup tinggi kepada penabung dan menyediakan cadangan piutang macet sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kondisi tersebut tercermin antara lain pada klausula formulir standar surat Pengakuan Hutang Kredit Umum Pedesaan Bank Rakyat Indonesia ( yang bersifat sepihak dari debitur) yang memuat persyaratan sebagai berikut:

1. Penggunaan pinjaman ( penjelasan tentang keperluan penggunaan kredit) Dalam hal ini kredit harus dipergunakan sesuai dengan tujuannya jika terjadi penyimpangan atau tidak sesuai dengan tujuan dipergunakan kredit tersebut maka bank dapat memutuskan atau menghentikan kredit yang diberikan sebelum jatuh tempo dan debitur harus membayar kredit sekaligus
2. Pembayaran kembali pinjaman ( yang mengatur tentang jangka waktu pembayaran dengan jumlah angsuran) Dalam angsuran pinjaman tersebut terkandung unsur Cadangan Insentif Pembayaran Tepat Waktu ( CIPTW) sebesar 25% dari angsuran bunga yang dibayar debitur sebagai dana dari insentif yang akan diberikan kepada debitur dalam hal pembayaran dilakukan secara tepat waktu. Namun kalau terjadi kelambatan pembayaran, debitur tidak berhak atas insentif tersebut dan CIPTW diperhitungkan sebagai penalty.
3. Jaminan, dalam klausula ini diatur secara rinci jaminan yang harus diserahkan kepada BRI dan pengikatan jaminannya sebagai berikut:
  - a. Tanah dan bangunan atau tanah tanpa bangunan untuk dibebani Hak Tanggungan atas tanah ( Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang

Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah )

- b. Benda bergerak dan benda tidak bergerak ( yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atas tanah ) untuk dibebankan dengan hak jaminan fiducia ( Undang-undang Nomor 42/1999 tentang Jaminan Fiducia)
- c. Benda bergerak dan surat berharga untuk diikat secara gadai ( Pasal 1150 s/d pasal 1159 KUH Perdata).
- d. Pengalihan/pindahan hak/pengoperan hak kepada bank atas ijin pemakaian tempat berjualan.
- e. Penggadaian dan pengalihan hak gaji debitur kepada bank ( dalam hal Debitur adalah pegawai negeri atau pegawai lainnya) beserta kuasa kepada Kas Negara / juru bayar/ bendahara qq PT BRI untuk memotong gaji Debitur.
- f. Penggadaian dan pengalihan hak pensiun debitur kepada bank serta memberikan kepada Kas Negara / kantor Pos dan Giro qq PT BRI untuk melakukan pemotongan pensiun Debitur.
- g. Asuransi jiwa, asuransi ini ditutup atas beban dari debitur, jika debitur meninggal maka asuransi inilah yang menjadi jaminannya.
- h. Debitur berkewajiban menyerahkan surat-surat jaminan untuk disimpan di bank.
- i. Penjualan jaminan, dalam hal jaminan tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditentukan bank berhak untuk menjual seluruh jaminan

baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum (melalui pelelangan) untuk dan atas nama bank dan atas kerelaan dari debitur serta debitur akan menyerahkan/mengosongkan ruangan/bangunan tersebut.

## **B. Pembahasan**

### **1. Peranan Pemerintah dalam pengaturan pemberian kredit kepada Usaha Kecil**

Usaha kecil yang merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional pada Umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Kenyataan menunjukkan bahwa Usaha Kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranan secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa Usaha Kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran,



permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, serta iklim usaha belum mendukung bagi perkembangannya.

Dalam usaha untuk meningkatkan kesempatan dan kemampuan berusaha yang lebih baik kepada para pelaku usaha di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia telah mengadakan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan membuat berbagai kebijaksanaan untuk usaha kecil yang dituangkan baik dalam Undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Namun dalam perkembangannya, sampai sekarang upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itulah Pemerintah Republik Indonesia tetap membuat bermacam kebijakan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan usaha Kecil ini. Untuk saat sekarang ini saja ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk membantu para pelaku usaha Kecil, baik yang disusun oleh Departemen Perindustrian dan perdagangan maupun lembaga atau instansi Pemerintah lainnya yang berhubungan dengan usaha Kecil.

Disamping itu kebijakan-kebijakan lain yang pernah dikeluarkan pemerintah untuk membantu permodalan bagi usaha kecil, ialah dengan kredit Likuiditas Bank Indonesia ( KLBI) seperti kredit investasi kecil/kredit modal kerja

Permanen, Bimas, Inmas padi dan palawija dan lain-lain. Kredit ini merupakan kredit program yang dananya seluruhnya dari pemerintah.

Berikut ini secara singkat dikemukakan beberapa skim-skim kredit program untuk mendukung perkembangan dan kegiatan usaha Kecil sebelum dan setelah diberlakukannya Pakjan 1990.<sup>96</sup>

Perlu dikemukakan bahwa kelayakan skim kredit program ini dilaksanakan oleh Bank-bank milik negara yang pada umumnya mempunyai jaringan kantor yang cukup luas dan pada tahap-tahap awal peranannya sangat dominan didalam perbankan di Indonesia dan sering ditugaskan menyelenggarakan berbagai program prioritas pemerintah sebagai development-agent.<sup>97</sup>

**A. Beberapa skim kredit program yang ditujukan untuk Usaha Kecil sebelum dikeluarkannya Pakjan 1990 antara lain sebagai berikut:**

**1. Kredit Bimas dan Inmas.**

Kredit Bimas ( bimbingan masal) sebenarnya sudah dimulai tahun 1965, dan pada awalnya hanya ditujukan untuk intensifikasi padi yang selanjutnya dikembangkan mencakup palawija. Pemberian

---

<sup>96</sup> Biro Kredit bank Indonesia, sejarah peranan Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Kecil, Edisi keempat, Juni 2001 sebelum Tahun 1992, kegiatan perbankan diatur dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok perbankan.

<sup>97</sup> Peran sebagai development agent atau agen pembangunan ini sayangnya tidak dijadwalkan secara jelas dan dibuatkan ukuran kinerja atau performance criterianya sekarang sulit untuk mengevaluasi berhasil tidaknya peranan dimaksud. Kredit Bimas ini sejak masa tahun 1977/1978 didukung oleh kredit Inmas ( Intensifikasi masal ) Kredit Bimas dan Inmas dilaksanakan oleh BRI

kredit ini dimaksudkan sebagai modal kerja ( untuk membiayai hidup dan sarana produksi seperti pupuk, insektisida dan pestisida) dalam rangka menunjang program peningkatan pangan. Kredit Bimas ini sejak masa tanam 1977/1978 didukung oleh kredit Inmas.

2. Kredit Usaha Tani ( KUT)

Sejak tahun 1985 skim kredit Bimas/Inmas diganti dengan Skim Kredit Usaha Tani ( KUT ) disalurkan kepada petani melalui KUD ( Koperasi Unit Desa ) Kredit ini merupakan kredit modal yang diberikan kepada KUD untuk keperluan petani guna pembiayaan pengadaan sarana produksi pertanian. KUD yang dapat menerima Kredit adalah KUD yang ditetapkan oleh Departemen Koperasi dan memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan Bank pelaksana. Setelah Pakjan tahun 1990 KUT tetap berkelanjutan dengan berbagai ketentuan namun banyak mengalami perubahan. Kredit ini cukup berhasil karena Indonesia bisa menjadi Negara yang berswasembada dalam hal pangan. Indonesia tidak lagi mengimpor beras tapi sudah cukup dengan hasil sendiri berkat hasil pertanian cukup bagus.

3. Kredit Investasi

Kredit investasi diperkenalkan Pemerintah dan bank Indonesia Tahun 1969 untuk membantu pembiayaan investasi dunia usaha termasuk Usaha Kecil, namun program ini belum mampu meningkatkan akses Usaha Kecil kepada Kredit perbankan terutama

karena persyaratan penyediaan jaminan dana sendiri ( self financing) minimal 25% dari kebutuhan pembiayaan serta kewajiban penyedia jaminan ( *co/etera*) yang cukup. Dalam pelaksanaannya kredit ini kebanyakan dinikmati oleh penguasa berskala besar. Pengusaha kecil tidak mampu memberikan jaminan karena kebanyakan pengusaha kecil adalah pengusaha gurem yang tempat usahanya saja masih kontrak.

#### 4. KIK/KMKP.

Skim ini diperkenalkan sejak tahun 1973 untuk membantu permodalan pengusaha kecil pribumi/Indonesia asli yang kemudian disebut dengan pengusaha lemah. Untuk Skim KIK/KMKP ini tidak ada kewajiban self financing sedangkan sebagai co/eteral cukup proyek/usaha yang dibiayai dengan KIK/KMKP tersebut. Untuk mengurangi resiko kerugian Bank, KIK / KMKP diasuransikan kepada PT Askrindo dengan premi yang relatif ringan. Dana untuk KIK/KMKP ini sebagian besar berasal dari KLBI. Kenyataan dalam masyarakat PT. Askrindo menyalurkan kreditnya harus ada jaminan tambahan tidak hanya usahanya saja yang dijaminakan tetapi PT. Askrindo minta jaminan berupa tanah/rumah

#### 5 Kredit Mini dan Midi.

Skim kredit ini ( nilai kredit antara Rp. 10.000,- sampai Rp. 200.000,- pernasabah ) diperkenalkan tahun 1974 dan ditujukan untuk usaha

yang sangat kecil termasuk Usaha Kecil di sektor Informal. Dana untuk kredit mini berasal dari APBN dan disalurkan oleh BRI. Skim kredit midi ( nilai antara Rp. 200.000-Rp. 500.000 per nasabah ) dikeluarkan tahun 1980 untuk nasabah sangat kecil namun diatas kriteria Kredit Mini.

Dana kredit seluruhnya berasal dari dana KLBI dan disalurkan melalui BRI.

6. Kredit Kelayakan.

Skim kredit ini diperkenalkan tahun 1979. Untuk kredit kelayakan ini besarnya self financing ditetapkan 10% dari nilai proyek dan nilai koleteral tambahan maksimal 50% dari nilai kredit. Dana kredit kelayakan berasal dari dana KLBI.

7. Kredit Koperasi Unit Desa dan Kredit Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKUD/KKPA)

Sejak dikeluarkannya Pakjan 1990, pemberian KLBI cenderung menurun, sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Pakjan 1990. Meskipun demikian ketika krisis perbankan memuncak tahun 1998, peranan KLBI kembali meningkat khususnya karena meningkatnya skim kredit program yang ditujukan untuk koperasi dan/atau anggota koperasi. Peranan KLBI kemudian berkurang secara drastis setelah berlakunya ketentuan Undang-undang Bank Indonesia ( UUBI) yang melarang BI untuk memberikan KLBI baru.

Skim-skim Kredit yang masih ada sampai saat ini

1. Kredit Usaha Tani ( KUT )

Pemberian KUT yang semula bersifat excecutting ( bank melakukan penilaiann dan menanggung risiko ) diubah menjadi bersifat chaneling ( bank tidak melakukan penilaian dan tidak menanggung resiko ). Kebijakan ini disertai dengan diikutkannya LSM dalam penyaluran KUT dan dipermudahnya pendirian Koperasi baru.

2 Kredit Ketahanan pangan ( KKP )

Langkah-langkah untuk memperkuat keuangan Usaha Kecil, dengan mendirikan Lembaga-Lembaga Keuangan dan mengembangkan program diluar perbankan seperti lembaga penjaminan dan Asuransi kredit.

1. Pembiayaan diluar perbankan dibuat perusahaan ventura.
2. PT Permodalan Nasional madani PP No. 38 Tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 dan akte Notaris No. 1 tanggal 1 Juni 1999.

**B. Setelah Pakjan 1990.**

Kebijakan tentang kewajiban pemberian kredit Usaha Kecil dikenakan pada setiap bank, dan ketentuan tersebut pernah mengalami penyesuaian pada bulan Mei 1993, sampai dengan 31 Maret 1997.

Bank Indonesia pada bulan April 1997 kembali melakukan penyempurnaan dalam ketentuan kewajiban pemberian Kredit Usaha Kecil dengan Surat Keputusan Direksi bank Indonesia tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil

Nomor 30/4/KEP/Dir tanggal 1 April 1997 dimana pemberian Kredit Usaha Kecil maksimal Rp. 350.000.000,- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah ) Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil.

Dilihat dari kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam membantu mengembangkan usaha kecil memang kelihatannya ada komitmen yang besar. Namun dilihat dari banyaknya Peraturan-Peraturan yang mengatur usaha kecil dimana antara instansi yang satu dengan yang lainnya merasa mempunyai kepentingan dan kewenangan untuk mengaturnya maka Peraturan-peraturan yang mengatur tentang usaha kecil sering tidak sinkron kadang-kadang malah bertentangan dan tumpang tindih. Dengan adanya banyak istilah dengan banyak kriteria serta banyaknya campur tangan dari banyak pihak, maka usaha kecil berada pada suatu lingkaran yang tidak berujung pangkal dari fasilitas dan kewajiban yang harus dilaksanakannya demi memenuhi kriteria dan kepentingan pihak-pihak pada usaha kecil. Dilapangan banyak terjadi ketidak jelasan bagi Usaha kecil, kalau mengalami suatu kesulitan apalagi kesulitan dalam bidang permodalan.

Didalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 menyebutkan antara lain bahwa kredit perbankan merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi usaha kecil.

Kita tahu bahwa pengusaha kecil tidak punya atau jarang yang mempunyai kemampuan dalam pengurusan administrasi atau dokumen-dokumen untuk

mendapatkan kredit perbankan. Di lain pihak Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan " Dalam pemberian Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembayaran dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa kendala utama yang dihadapi usaha kecil dalam memperoleh kredit perbankan adalah sulit dan berbelit-belitnya proses permohonan pengajuan kredit. Persyaratan-persyaratan banyak yang tidak dapat dipenuhi oleh pengusaha kecil misalnya pemenuhan dokumen-dokumen atau izin dan administrasi lainnya.

Bank-bank khususnya bank konvensional menetapkan persyaratan – persyaratan untuk persetujuan kredit yakni :

1. lamanya perusahaan menjadi nasabah Bank.
2. kinerja perusahaan.
3. kemampuan menyediakan jaminan.

Ditinjau dari kinerja perusahaan kecil, terdapat keengganan dari bank menyalurkan kredit kepada usaha kecil walaupun memiliki kualitas kredit yang lebih baik dibandingkan dengan usaha menengah dan besar. Bank memandang bahwa administratif terhadap usaha kecil sangat rumit dan memerlukan biaya tinggi, sementara dari pihak nasabah terdapat beberapa



faktor yang dipandang menghambat penyaluran kredit yakni suku bunga yang terlalu tinggi dan persyaratan untuk mengajukan kredit terlalu berat dan rumit, sehingga pengusaha kecil sering akhirnya mencari modal kepada rentenir walaupun bunga lebih tinggi dari bank namun prosesnya cepat dan mudah.

Usaha kecil memiliki peran yang sangat penting dalam denyut nadi perekonomian nasional tidak diragukan lagi. Hanya saja keluhan mereka atas sulitnya dan berbelit-belitnya prosedur mendapatkan kucuran kredit, belum juga mendapatkan jawaban yang memuaskan dari pemerintah kalau memang benar-benar komit dengan pengusaha kecil.

Dari setiap pemerintahan baru muncul, selalu ada iming-iming bahwa usaha kecil bakal diperhatikan, namun hal itu hanya merupakan janji-janji saja.

Pada dasarnya Usaha Kecil tidak hanya dipertahankan eksistensinya saja, tetapi harus dikembangkan agar menjadi usaha menengah dan terus menjadi usaha besar.

Data empiris menunjukkan peranan usaha kecil menengah cukup dominan dan sangat vital bagi perekonomian nasional <sup>98</sup> Urgensinya dapat ditinjau dari berbagai aspek.

Pertama: Jumlah Industri yang tergolong banyak dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, Berdasarkan data Biro Pusat Statistik ( BPS ) 2003<sup>99</sup>, jumlah

---

<sup>98</sup> Media Indonesia, Senin 14 Pebruari 2005

<sup>99</sup> Data Biro Pusat Statistik ( BPS ) Tahun 2003

Industri Usaha Mikro kecil menengah (UMKM) tercatat 42, 39 juta unit atau 99,9% dari total unit usaha nasional.

Kedua: memiliki potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja Setiap unit investasi pada sektor Usaha Kecil dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi usaha besar.

Ketiga, kontribusi Usaha Kecil Menengah dalam pembentukan Produk Domestik Bruto ( PDB) cukup signifikan. Menurut data yang dikeluarkan Bank Indonesia kontribusi sektor ini terhadap PDB mencapai 56, 72%

Persoalan mendasar yang dihadapi Usaha Kecil Menengah sampai saat ini adalah masalah permodalan. Permodalan dari kredit perbankan sulit didapatkan karena untuk mendapatkan kredit dari perbankan harus dipenuhi berbagai macam persyaratan yang kesemuanya itu sangat berat dan hampir tidak mungkin dapat dipenuhi oleh usaha kecil menengah. Untuk itu kiranya Pemerintah harus mengambil kebijakan untuk memperlonggar prosedur permohonan kredit perbankan terutama dalam masalah kewajiban menyediakan jaminan tambahan. Dari hasil survey kami di BRI, dikatakan bahwa kredit dengan plafon di atas 50 juta rupiah harus ada agunan dan agunan tersebut berupa baik benda bergerak maupun tidak bergerak seperti misalnya, mobil atau tanah. Hal ini diharapkan untuk menjaga risiko kredit macet, sehingga jaminannya bisa dijual, dari nilai jaminan/agunan paling tidak sama dengan nilai kredit yang diberikan. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang sekaligus sebagai lembaga pengawas perbankan

sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tetap mewajibkan agar setiap bank mengedepankan asas kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Tujuannya adalah untuk menekan risiko kredit bermasalah. Prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit, menjadi faktor yang harus diikuti oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia tanpa kecuali seperti tersebut dalam Undang-undang Nomor 7/1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Kalau hal ini diterapkan bagi seluruh lapisan pengusaha maka jelas yang dapat mengakses kredit perbankan hanyalah usaha menengah ke atas karena usaha kecil ke bawah jelas tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut. Untuk itu kiranya pemerintah mendirikan suatu lembaga penjamin atau bank khusus yang membantu pengusaha kecil khususnya dalam pemberian kredit.

Saat ini usaha kecil menengah memang sedang dimanja pemerintah dengan besarnya porsi kredit yang diberikan pemerintah dan perbankan nasional, contoh yang ada di Bank rakyat Indonesia porsi penyaluran kreditnya adalah 80% untuk pengusaha kecil menengah dan 20 % untuk korporasi, namun karena persyaratan yang sangat sulit dipenuhi oleh usaha kecil maka kredit yang disediakan tidak akan dapat diserap oleh usaha kecil, karena Undang-undang perbankan yang harus diikuti sementara pihak pemerintah tidak memberi kelonggaran atau menanggung risiko seperti memberi subsidi bunga Perbankan nasional pada tahun ini ( tahun 2005) mengalokasikan

dana sebesar Rp. 60,4 triliun untuk sektor Usaha Mikro kecil menengah (UMKM) yang dipergunakan untuk usaha produktif kata gubernur senior Bank Indonesia Miranda S Gultom<sup>100</sup>. Kenyataan dilapangan Usaha Kecil, Menengah tetap saja tidak dapat mengakses kredit tersebut. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia, Kredit program dibiayai dengan kredit likuiditas Bank Indonesia ( KLBI ) seperti disebutkan terdahulu banyak menimbulkan kredit macet karena moral hazard baik dari para debitur maupun dari para penyalurnya.

Debitur menganggap uang itu adalah uang pemerintah yang tidak perlu dikembalikan. Pada waktu itu Bank hanya sebagai penyalur dana saja dan sebagai pemutus kredit adalah Departemen Koperasi, yang menentukan kelompok koperasi mana yang diberikan kredit. Disinilah banyak sekali timbul penyelewengan-penyelewengan sehingga koperasi pada waktu itu banyak bermunculan yang tujuannya hanya untuk mendapatkan kredit Departemen Koperasi pada waktu itu sebagai pemutus kredit tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian karena memang bukan bidang pekerjaannya sehingga menimbulkan banyak masalah yang akhirnya menyebabkan kredit macet, disamping juga adanya moral hazard sehingga terjadilah KKN dalam pemberian kredit. Namun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia maka kredit likuiditas bank Indonesia di setop. Selanjutnya kepada perbankan dianjurkan menyalurkan kreditnya

---

<sup>100</sup> Media Indonesia Minggu 27 Pebruari 2005

kepada usaha kecil menengah dengan modalnya sendiri. Memang ada kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan surat utang Pemerintah ( SUP 005 ) dimana pemerintah memberikan pinjaman kepada Bank, baik bank Umum maupun BPR dengan bunga 7 % untuk disalurkan kepada UKM: Namun kebijakan ini tidak banyak diambil oleh bank karena bunganya terlalu tinggi di bandingkan dengan dana yang diperoleh dari masyarakat, seperti deposito yang bunganya sekitar 5 s/d 6% 1. tahun.

Dengan apa yang telah diuraikan diatas kelihatan sekali kebijakan-kebijakan dari pemerintah hampir semuanya merupakan teori-teori diatas kertas yang tidak dapat di implementasikan dilapangan. Dari hasil penelitian penulis kepada pengusaha kecil disekitar Kotip Depok seperti pengusaha bengkel las, konveksi, perdagangan umum, salon kecantikan dan usaha makanan kering, yang selalu dikeluhkan oleh pengusaha tersebut dalam menjalankan usahanya adalah permodalan dari perbankan. Pengusaha bengkel las besi, yang kami wawancarai mengatakan bahwa dia membuka usaha mulai tahun 1980 dan sampai sekarang masih berjalan tapi tidak dapat berkembang karena kekurangan modal kerja. Modal yang dipakai sampai saat ini disamping modal sendiri sering mencapai hutangan ke rentenir yang bunganya cukup tinggi yaitu 5% perbulan. Pernah dia mengajukan kredit ke Bank Rakyat Indonesia Depok, tapi diminta agar ada jaminan berupa sertifikat rumah atau tanah, pada hal dia sendiri masih kontrak rumah dan tempat usaha nya milik dari keluarga. Dalam menjalankan usahanya dia

mempekerjakan 9 orang pekerja yang digaji perminggu. Jika pemerintah betul-betul komitmen dengan usaha kecil maka seharusnya pengusaha-pengusaha semacam inilah yang harus dibantu, baik dari segi permodalan, pelatihan maupun produksi dan pemasarannya. Disamping itu ada lagi yang penulis temui adalah pengusaha kecil bidang konveksi bernama Pak Agus. Dia mulai membuka usaha tahun 1985 dengan modal sendiri dan bantuan teman-temannya. Saat ini dia sudah mempekerjakan 10 orang tenaga baik laki-laki maupun wanita. Mesin-mesin jahit mereka sudah punya dan untuk menambah modal kerja untuk membeli bahan bakunya dia pernah mengajukan kredit ke PT Askrindo, namun usahanya untuk memperoleh kredit kandas karena harus ada jaminan berupa sertifikat hak milik tanah untuk itu dia mengurungkan niatnya untuk mencari kredit dari PT Askrindo. Semua pengusaha kecil yang kami wawancarai dalam penelitian ini semua mengatakan bahwa memperoleh kredit perbankan sangat sulit prosesnya sudah berbelit-belit walaupun kredit yang diajukan hanya Rp. 50.000.000,- namun toh tidak berhasil. Dari pihak Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) kami mendapatkan penjelasan bahwa BRI tetap konsen terhadap pengusaha kecil dan selalu akan membantu dalam memperoleh kredit, namun sebagaimana Peraturan yang berlaku Bank harus hati-hati dalam mengeluarkan kreditnya karena resiko kredit macet atau masalah-masalah yang timbul karena kurang hati-hatian dalam penyaluran kredit akan ditanggung oleh Bank itu sendiri.

### **C. Kebijakan Pemerintah Setelah Reformasi**

Kredit Program yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Utang Pemerintah Nomor SU 005/MK/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang lebih dikenal dengan Dana SUP – 005 merupakan Skim Kredit Usaha Mikro dan Kecil.

Dalam rangka meningkatkan kekuatan akses permodalan Usaha Mikro dan Kecil untuk kegiatan dan Usaha produktifnya, maka Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Surat Nomor 25/M.KUMK/VIII/2002 tanggal 30 Agustus 2002 telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam penyediaan Kredit yang berasal dari Surat Utang Pemerintah ( SUP).

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/KMK.06.2003 tanggal 29 Januari 2003 Tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil pada dasarnya mengatur mengenai penyaluran Kredit Program tersebut agar pelaksanaannya dapat berjalan secara tertib, terkendali efektif, efisien dalam upaya pengembangan usaha Kecil. Kredit usaha Mikro dan Kecil terhadap dana pinjaman guna pembiayaan investasi dan modal kerja dengan persyaratan ringan dan terjangkau. Kredit ini disalurkan melalui lembaga Keuangan Pelaksana ( LKP). Sedangkan Lembaga Keuangan Pelaksana adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Pegadaian, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi, Baitul Maal Wattamwil ( BMT), dan lembaga-lembaga perkreditan

yang diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Usaha yang dapat dibiayai dengan dana KUMK adalah Usaha Mikro dan Usaha kecil pada semua sektor ekonomi yang layak untuk dibiayai oleh Lembaga Keuangan Pelaksana ( LKP).

Usaha Mikro dan Kecil yang dapat menerima KUMK sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

Usaha Mikro:

1. Usaha Produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia.
2. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta pertahun.

Usaha Kecil.

Kriterianya seperti disebut dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dimana memiliki kekayaan paling banyak Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) pertahun.

Persyaratan untuk kredit usaha Mikro Kecil dari Lembaga-lembaga Keuangan Pelaksana adalah sebagai berikut:

1. Jumlah maksimal kredit kepada nasabah usaha Mikro maksimum Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dan kepada usaha Kecil sebesar Rp. 500.000.000,- ( Lima ratus juta rupiah).
2. Besarnya tingkat bunga KUMK atau presentase bagi hasil untuk Kredit usaha Kecil pola Syariah ditetapkan dengan mempertimbangkan tujuan



KMK, besarnya tingkat bunga pinjaman/penerusan pinjaman pendanaan KUMK, biaya overhead penyaluran KUMK, serta tingkat margin yang wajar bagi LKP.

3. Jangka waktu pinjaman untuk kredit investasi maksimal lima tahun termasuk tenggang waktu pembayaran angsuran ( grace period) sedangkan untuk modal kerja maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali.
4. Tidak diwajibkan menyediakan jaminan tambahan.
5. Tidak dikenakan biaya komitmen dan provisi kredit.
6. Persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan LKP dengan memperhatikan tujuan KUMK, serta ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, perjanjian Pinjaman Pendanaan KUMK, dan ketentuan – ketentuan terkait lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BUMN pengelola dan LKP yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan bertanggung jawab sepenuhnya atas resiko tunggakan pokok dan tunggakan bunga pinjaman pendanaan KUMK yang dilakukan. Oleh karena itulah sebelum menyalurkan harus memakai prinsip kehati-hatian serta analisis yang benar sebelum menyalurkan kredit kepada usaha Mikro dan Kecil.

Dari plafon dana SUP 005 sebesar Rp. 3,1 triliun, saat ini baru dicairkan oleh BUMN pengelola dan LKP sebesar Rp. 1,68 triliun atau sebesar 54,2%.<sup>101</sup>. Dana ini tidak sepenuhnya ditarik oleh BUMN atau LKP karena disamping risiko sepenuhnya ditanggung oleh BUMN atau LKP bunga dari Pemerintah terhadap dana tersebut juga tinggi.

Dari hasil wawancara penulis dengan petugas BRI Pusat mengatakan BRI tidak mengambil dana SUP 005 karena bunga kredit tersebut sebesar 7½%, sedangkan kalau dana masyarakat bunganya hanya 5%. Oleh karena itu banyak LKP yang menarik dana ( SUP ) 005 kurang dari 50% antara lain: Bank mandiri hanya 25% dari plafon, BRI 50%, BTN 3,4% dan 10 BPD yang penarikannya kurang dari 50%<sup>102</sup>.

Jika Pemerintah betul-betul ingin membantu/komitmen untuk pengembangan usaha Kecil penulis mengusulkan kiranya bunga kredit Usaha Mikro Kecil tersebut harus disubsidi oleh Pemerintah. Menurut Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia ( BRI) Rudjito yang menjadi ketua pelaksana Tahun Mikro kredit 2005 mengatakan bahwa perbankan bersama Pemerintah bergiat untuk mendukung UMKM karena keberhasilan UMKM akan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain itu, UMKM telah membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang cukup tangguh dalam menghadapi krisis.

Namun dari hasil wawancara penulis kepada beberapa pengusaha Kecil mengatakan sampai saat ini pengusaha tersebut sangat sulit untuk

---

<sup>101</sup> Media Indonesia, Rabu, 2 Maret 2005.

<sup>102</sup> Media Indonesia, Rabu 2 Maret 2005

memperoleh kredit dari BRI maupun dari PT. Askrindo karena persyaratan-persyaratan bank yang terlalu berbelit-belit. Untuk itu kiranya pemerintah jangan hanya berteori saja dalam membantu pengembangan usaha Kecil. Hendaknya diciptakan suatu sistim permodalan diluar dari ketentuan pada Undang-undang Perbankan. Penulis mengusulkan kiranya sudah waktunya Bank Khusus dibuat / dibentuk untuk membantu UMKM.

Berdasarkan Undang-undang Perbankan bahwa dalam penyaluran kredit Bank harus melaksanakan prinsip ke hati-hatian dan berdasarkan pada prinsip 5C:

1. Karakter
2. Capacity
3. Capital
4. Collateral
5. Condition.

Jika hal ini dilaksanaka secara ketat maka sulit kredit Bank dapat diakses oleh Pengusaha Kecil.

## **2. Peraturan Perundang-undangan yang mempengaruhi Perkembangan Usaha Kecil.**

Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dalam pasal 21 menyebutkan bahwa kredit perbankan merupakan salah satu pembiayaan bagi Usaha Kecil. Dipihak lain pemberian kredit Usaha Kecil

diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pemberian kredit perbankan kepada usaha kecil juga dipengaruhi oleh berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya, terutama undang-undang yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, yang mempengaruhi ketersediaan sumber dana untuk membiayai berbagai program pemerintah termasuk program pemberian kredit untuk Usaha Kecil.<sup>103</sup>

Peraturan-peraturan tersebut diatas belum berhasil mewujudkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia, malahan berbagai kesenjangan terjadi baik kesenjangan pendapatan, kekayaan, pekerjaan maupun pendidikan masih terasa dalam masyarakat.

Sejak krisis ekonomi terjadi pertengahan tahun 1997, tingkat kemakmuran masyarakat menurun, hal ini tercermin dari makin banyaknya pengangguran, karena banyak terjadi PHK dari usaha besar, sehingga pendapatan dari masyarakat juga menurun. Krisis ekonomi itu juga menyebabkan Indonesia yang sebelumnya sempat tergolong negara yang berpendapatan sedang (*midle income countries*) kembali menjadi negara miskin (*poor countries*). Proses pemiskinan tersebut disertai pula dengan

---

<sup>103</sup> UU No 23 tahun 1999 Tentang BI Sebagai pengganti UU No 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral. BI tidak lagi diperkenankan untuk memberikan kredit likuiditas kepada perbankan (KLBI) untuk membiayai berbagai program pemerintah.

berkurangnya rasa aman, terganggunya ketertiban serta merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegakannya.

Berdasarkan data empiris terbukti bahwa Usaha Kecil (UK) memiliki peran yang cukup vital dalam perekonomian di Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui selama Indonesia menjalani krisis ekonomi mulai Tahun 1997 dimana para konglomerat hampir semuanya pada bangkrut, tetapi tidak demikian halnya dengan pengusaha ekonomi kecil, dimana dia masih tetap eksis relatif tahan terhadap guncangan krisis dan mempunyai potensi besar dalam rangka menyerap tenaga kerja.

Salah satu kegiatan usaha yang sangat potensial untuk memberikan kontribusi kearah pencapaian masyarakat adil dan makmur adalah kegiatan ekonomi berskala kecil atau Usaha Kecil yang jumlahnya tersebar diseluruh Indonesia.<sup>104</sup> Kurangnya peran aktif dan perhatian perbankan dalam mendukung pembiayaan Usaha Kecil telah berlangsung sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia. Hal ini antara lain mengingat bahwa kredit perbankan yang ditujukan kepada Usaha Kecil pada waktu itu pada umumnya merupakan program pemerintah yang pendanaannya sebagian besar atau seluruhnya didukung oleh BI. Perbankan sebagai bank milik negara hanya sebagai Bank pelaksana saja.

---

<sup>104</sup> Sri Edi Swarsono, Prospek dan perkembangan perekonomian rakyat /UKM : antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan pasar, Seminar Nasional sehari mengenai prospek dan perkembangan UKM, Fak Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, 25 Juni 2002.

Paket kebijakan deregulasi Perbankan yang diluncurkan bulan Oktober 1988 (Pakto 1988) memang telah meningkatkan mobilisasi dana masyarakat secara berarti oleh perbankan. Namun penyaluran dana masyarakat tersebut diberikan kepada pengusaha besar atau konglomerat dan banyak diantaranya diberikan dengan kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akhirnya menjadi kredit macet. Pakto tersebut juga menyebabkan bermunculan berdirinya Bank oleh pengusaha dengan tujuan menghimpun dana masyarakat untuk membiayai kegiatan usahanya dari kelompoknya mereka sendiri. Dalam kondisi seperti itu, pembiayaan Usaha Kecil pada umumnya belum mendapatkan perhatian yang memadai dari perbankan, dan hanya beberapa Bank saja yang mempunyai sistem, organisasi dan sumber daya manusia untuk mendukung pemberian kredit kepada Usaha Kecil. Disamping itu banyak bank yang menghindari dari ketentuan Pemerintah Cq. Bank Indonesia agar bank menyalurkan sebagian kreditnya kepada Usaha Kecil. Penyaluran kredit kepada Usaha Kecil lebih banyak dilakukan melalui pelaksanaan kredit program yang dananya sebagian besar dari Kredit Likuidasi Bank Indonesia (KLBI) bukan dari dana masyarakat yang dihimpun oleh Bank.

Kurangnya perhatian Perbankan terhadap Usaha Kecil terlihat sejak paket kebijakan Januari 1990 (Pakjan 1990) dan UU No 7 tahun 1992, dimana U.U tersebut menggolongkan Bank atas Bank Umum dan BPR, dimana pelayanan terhadap Usaha Kecil dilakukan oleh BPR sedangkan Bank

Umum diberi kebebasan untuk melayani atau tidak UK. Dengan dikeluarkannya UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan maka pemerintah dapat bekerja sama dengan Bank Umum dalam rangka pemberian kredit kepada Usaha Kecil.

Sampai diberlakukannya UU Bank Indonesia, pemberian kredit kepada sektor-sektor yang dianggap penting oleh pemerintah termasuk Usaha Kecil tetap mengandalkan berbagai Skim kredit program pemerintah yang pembiayaannya didukung oleh Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

Dengan dikeluarkannya UU Bank Indonesia (BI) maka BI tidak lagi mengeluarkan KLBI yang dipakai untuk membiayai berbagai program pemerintah termasuk program pengembangan Usaha Kecil.

KLBI yang sudah direalisasi dan atau sudah disetujui oleh BI akan tetapi belum di tarik oleh Bank, harus dialihkan kepada BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah dalam tempo enam bulan sejak diberlakukannya UU BI.

Hingga saat ini belum ada Skim atau program baru yang secara sistimatis dapat mendukung pembiayaan Usaha Kecil sebagai pengganti KLBI.

Perkembangan diatas selain meyebabkan dampak yang kurang menguntungkan bagi Usaha Kecil untuk mendapatkan akses terhadap kredit perbankan, juga mencerminkan belum sinkronnya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan dan

pembiayaan Usaha Kecil, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur Usaha Kecil dengan peraturan yang mengatur tentang perbankan.

Selain itu dalam peraturan perundang-undangan, ada rumusan pasal-pasal yang kurang jelas sehingga menimbulkan beberapa penafsiran, dan juga peraturan pelaksanaan dari suatu UU belum ada sehingga tidak dapat dilaksanakannya UU tersebut (facum).

Mengingat peranan Usaha Kecil yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya dalam penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatannya, maka pembiayaan Usaha Kecil perlu mendapat prioritas tinggi. Meskipun faktor permodalan tidak selalu menjadi penghalang bagi berjalannya suatu Usaha Kecil, namun ketersediaan dana yang cukup dan sesuai kebutuhan akan sangat mendukung perkembangan Usaha Kecil.

Ketersediaan sumber pembiayaan pada saat dibutuhkan, tanpa prosedur yang berbelit-belit dan dengan biaya yang relatif murah akan sangat membantu kegiatan Usaha Kecil.

Perlu dikemukakan bahwa masalah permodalan atau pembiayaan bagi Usaha Kecil, sebagaimana juga pada Usaha Menengah, dan Usaha Besar, tidak bisa dilihat secara tersendiri terlepas dari berbagai aspek lainnya, seperti produksi, pemasaran dan manajemen, karena semuanya saling terkait dan mempengaruhi sehingga memerlukan penanganan secara terpadu.



Kelangkaan sumber dana tampaknya bukanlah merupakan faktor utama yang menyebabkan masih sulitnya akses Usaha Kecil kepada kredit perbankan. Dana masyarakat yang tersimpan di Bank dalam bentuk giro, deposito dan tabungan cukup besar jumlahnya. Meskipun sebagian dana tersebut dewasa ini tertanam dalam obligasi rekap, sertifikat Bank Indonesia dan alat likuid lainnya, perbankan masih mempunyai dana yang cukup memadai untuk disalurkan kepada Usaha Kecil.<sup>105</sup>

Selain itu, pemerintah juga mempunyai dana di Bank Indonesia yang dimaksudkan untuk membantu permodalan Usaha Kecil yang di kenal dengan Dana SUP-005.<sup>106</sup> Akan tetapi realisasi penggunaan dana tersebut ternyata sangat lambat dan rendah, terutama karena belum adanya sistem dan ketentuan yang jelas mengenai penggunaan dana tersebut.<sup>107</sup>

Pengembangan Usaha Kecil akan memberi manfaat bagi keuangannya, pegawainya yang akhirnya membawa manfaat bagi masyarakat dan rakyat banyak karena Usaha Kecil merupakan usaha padat karya atau "*labour intensive*." Disamping itu Usaha Kecil pada umumnya bersifat sederhana, tidak memakai teknologi yang tinggi sehingga dapat lebih banyak

---

<sup>105</sup> Dana masyarakat yang tersimpan di Bank Per Juni 2002 berjumlah sekitar Rp. 800 triliun, pada periode yang sama jumlah kredit perbankan tercatat sekitar Rp. 300 triliun dan hanya Rp. 36 triliun (12% dari total kredit atau 4,5% total simpanan masyarakat) yang disalurkan untuk keperluan investasi dan modal kerja uk. (sumber Biro Kredit BI).

<sup>106</sup> Dana tersebut berasal dari Surat Utang Pemerintah (SUP) No. 005 Tahun 1999 sebesar Rp.9,97 triliun yang telah dibeli BI untuk diri sendiri (pasar primer) berdasarkan pasal 76 ayat 1 UU BI).

<sup>107</sup> Petunjuk Pelaksanaan penggunaan dana tersebut baru dikeluarkan Pemerintah yaitu dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003.

menampung tenaga kerja dan dengan pendidikan yang rendah serta nilai investasi yang relatif kecil.

Hal-hal demikian perlu dikembangkan karena Usaha Kecil mempunyai posisi yang sangat strategis dan seharusnya mendapat prioritas yang tinggi. Usaha Kecil mempunyai berbagai kelemahan dan kekurangan terutama permodalan yang harus dicarikan jalan keluarnya. Berbagai kebijakan dan program sebenarnya telah pernah di tempuh pemerintah untuk memperkuat modal Usaha Kecil termasuk untuk mendorong pengembangan Usaha Kecil.

Berbagai Skim kredit program pernah dilaksanakan dan dikembangkan untuk memperkuat permodalan Usaha Kecil baik untuk modal investasi maupun untuk modal kerja. Demikian pula halnya pemberian kredit program untuk mendukung program swasembada dan peningkatan produksi pangan dilakukan pemerintah. Sebagian besar Skim-Skim kredit tersebut tidak berjalan karena tidak sinkronnya antara peraturan perundang-undangan yang mengatur pembiayaan Usaha Kecil melalui kredit perbankan.

Kebanyakan Usaha Kecil yang mempunyai prospek bagus tetapi masih sulit mendapatkan akses terhadap kredit perbankan.

Kondisi pembiayaan Usaha Kecil makin memburuk sejak terjadinya krisis ekonomi Tahun 1997 karena terganggunya fungsi inter mediasi perbankan. Banyak Bank yang dilikuidasi dan dibekukan operasi atau usahanya.

Di pihak lain, krisis ekonomi justru menunjukkan bahwa Usaha Kecil mempunyai kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Usaha Besar, sehingga ketersediaan pembiayaan perbankan sebenarnya tidak saja akan membantu pengembangan Usaha Kecil, akan tetapi akan mempercepat pemulihan ekonomi dan dalam jangka panjang akan memperkuat perekonomian Indonesia. Akan tetapi perhatian perbankan terhadap Usaha Kecil masih kurang memadai.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber dana eksternal bagi usaha Indonesia, termasuk Usaha Kecil adalah perbankan. Dengan adanya krisis perbankan, maka akan ikut mempersulit penyediaan kredit perbankan bagi Usaha Kecil yang sebelumnya memang belum mempunyai akses yang memadai terhadap dana perbankan<sup>108</sup>. Dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa Usaha Kecil dalam rangka meningkatkan modalnya melalui Kredit perbankan memerlukan strategi, pendekatan dan upaya yang lebih fokus dan terpadu.

Hal ini selanjutnya berkaitan erat dengan atau bahkan sangat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengatur pengembangan dan pembiayaan usaha kecil.

Untuk itulah penulis mengambil judul tesis ini yaitu Pemberian Kredit Perbankan kepada usaha Kecil.

---

<sup>108</sup> Fungsi utama Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit. Sebelum krisis, rasio kredit/pembiayaan terhadap dana masyarakat (loan to deposit rasio atau L D R) berkisar antara 100-110%. Setelah krisis LDR menurun berkisar antara 35-45%. "lihat laporan Tahunan BI berbagai nomor"

Disamping peraturan-peraturan tersebut diatas Kredit Usaha Kecil (KUK) Pernah diatur dengan Surat Keputusan Direksi BI No 30/4/KEP/DIR tanggal 1 April 1997.

Dalam pasal 5 peraturan tersebut ada ketentuan bahwa Bank wajib memberikan KUK sebesar presentase tertentu dari jumlah ekspansi kredit netto termasuk surat berharga yang diberikan dalam Rupiah dan atau Valuta asing pada setiap tahun takwim. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/24/KEP/Dir tanggal 29 Mei 1993, dinyatakan tidak berlaku.

Konsekwensi bagi Bank yang tidak mematuhi aturan tersebut ini ada sanksi dan insentif. Namun bank juga harus menyalurkan dananya tidak boleh melanggar aturan yang telah ditentukan oleh UU no 7/1992 jo UU no 10/1998, yaitu prinsip kehati-hatian karena ada ketentuan yang tidak saling mendukung, malah bertentangan, maka Surat Keputusan tersebut akhirnya dicabut dan diganti dengan Peraturan Bank Indonesia No.3/2/PBI/2001 tentang Pemberian kredit usaha kecil.

Dalam peraturan ini tidak ada keharusan bagi bank untuk menyalurkan kreditnya kepada usaha kecil sebesar persentase tertentu tetapi Bank dianjurkan untuk menyalurkan kreditnya kepada usaha kecil. Dengan demikian bank tidak wajib menyalurkan kreditnya kepada pengusaha kecil tetapi harus melihat apakah usaha kecil layak untuk diberikan kredit atau tidak sesuai dengan ketentuan UU Perbankan, kalau Bank tidak yakin bahwa

usaha kecil layak untuk diberikan kredit maka Bank tidak akan menyalurkan kreditnya, karena resiko ada pada Bank itu. Jadi Bank menanggung segala risiko dari penyaluran kreditnya bukan seperti kredit program, dimana dana dari KLBI yang semuanya berasal dari Pemerintah.

Jadi pemerintah kelihatan tidak konsisten membantu usaha kecil karena peraturan yang dibuat tidak sejalan dengan peraturan yang lain. Apalagi diberlakukannya Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral sebagai pengganti Undang-undang No.13 th 1968 maka pemberian kredit Likuidasi Bank Indonesia tidak bisa dilanjutkan lagi. Untuk itu kiranya pemerintah mencari jalan baru agar Usaha Kecil dapat berkembang, menjadi Usaha Menengah dan Besar dengan demikian pemerataan kesempatan kerja dan program pengentasan kemiskinan dapat tercapai. Dari hasil penelitian, maka penulis berpendapat kiranya pemerintah sudah waktunya untuk mendirikan Bank khusus untuk Usaha Kecil dan juga Lembaga penjamin segera harus dibentuk.

### **3. Kendala yang dihadapi dalam pemberian kredit Perbankan**

Adanya krisis ekonomi pada th 1997-1998 di Indonesia ,telah mendorong perbankan nasional mengubah strategi lendingnya dalam tahun-tahun terakhir dari kredit ke korporasi menjadi kredit ke usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM). Dirasakan bahwa kredit ke sektor korporasi banyak yang

menimbulkan masalah dengan banyaknya kredit macet yang dialihkan ke BPPN.<sup>109</sup>

Dengan adanya perubahan kecenderungan pemberian kredit Perbankan tersebut, secara politik dan sosial merupakan fenomena sangat menarik untuk diperhatikan karena penyaluran kredit ke usaha kecil yang sebelumnya hanya disentuh oleh BPR dan beberapa Bank saja, saat ini telah menjadi perhatian hampir seluruh Bank-bank besar tidak segan-segan untuk menyalurkan kredit ke sektor UMK baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bagi Bank-bank besar yang sebelumnya berorientasi ke korporasi, akhirnya menyalurkan kredit Baru ke UMK, tapi karena tidak mempunyai pengalaman menyalurkan kreditnya ke usaha kecil dan juga tidak punya jaringan kantor pendukung maka solusi yang ditempuh adalah dengan melakukan linkage program antara Bank besar tersebut dengan BPR-BPR maupun re lending ke lembaga bukan Bank seperti perusahaan pembiayaan (leasing). Dalam linkage program tersebut, bank Umum akan memberikan pinjaman kepada BPR yang nantinya pinjaman tersebut akan disalurkan oleh BPR kepada nasabah UMK dengan mengambil margin keuntungan tertentu. Dengan demikian akan menyebabkan bunga Bank akan tinggi jika sampai ke UMK.

---

<sup>109</sup> DR. Yunus Husein, SH. LLM dan Garda T. Paripurna, SH. LLM Penjaminan Kredit dan upaya mendorong penyaluran kredit Perbankan kepada usaha Mikro dan Kecil, Disampaikan dalam dialog nasional Hukum dan Non Hukum, diselenggarakan oleh badan Pembinaan Hukum nasional Departemen Kehakiman dan Ham, tanggal 7-9 September 2004 di Jakarta.

Berdasarkan hasil survei kami ke BRI diperoleh informasi bahwa kendala utama yang dihadapi UMK untuk dapat akses terhadap kredit perbankan disebabkan perbankan menerapkan peraturan-peraturan yang dijadikan dasar untuk persetujuan kredit yakni:

1. Dilihat dari lamanya perusahaan itu menjadi nasabah Bank. Kalau nasabah lama dan tidak pernah mengalami kredit macet akan lebih mudah dibandingkan dengan nasabah baru. Nasabah baru dilihat dulu usahanya paling sedikit sudah berjalan 2th dan 1th telah menghasilkan.
2. Kinerja Perusahaan
3. Kemampuan menyediakan jaminan tambahan

Ditinjau dari kinerja perusahaan, terdapat keengganan dari Bank menyalurkan kredit kepada usaha kecil walaupun memiliki kualitas kredit yang lebih baik dibandingkan usaha menengah besar. Bank memandang bahwa administratif terhadap usaha kecil sangat rumit dan memerlukan biaya tinggi, sementara dari sisi nasabah terdapat beberapa faktor yang dipandang menghambat penyaluran kredit yakni suku bunga tinggi dan persyaratan yang rumit dan berbelit-belit.

Bank/ Lembaga keuangan formal menghadapi beberapa kendala dalam melayani usaha kecil diantaranya:

- 1) kendala geografis, menyebabkan perbankan sangat sulit untuk menjangkau pengusaha kecil karena tempat usaha dan tempat tinggal terpencil ke desa-desa.

- 2) Kendala ekonomi, yaitu usaha yang dikelola berskala kecil dan terisolir, sehingga biaya transaksi kedua belah pihak, baik Bank maupun pengusaha kecil menjadi sangat tinggi.
- 3) Kendala hukum/legalitas, dengan adanya regulasi yang mensyaratkan perbankan untuk memperhatikan legalitas usaha Calon debitur, maka perbankan mengalami kesulitan dalam membiayai pengusaha kecil/ sektor informal.
- 4) Kendala desain yaitu banyak program-program pengembangan usaha kecil merupakan paket kebijakan pemerintah yang seringkali tidak sesuai dengan kondisi obyektif sektor usaha kecil yang sangat bervariasi berdasarkan lokasi, jenis usaha dan latar belakang sosial budaya setempat.
- 5) Kendala inkonsistensi program dimana seringkali pelaksanaan kredit program berubah-ubah bahkan dihentikan yang mengakibatkan bank harus menyusun kembali sistem dan prosedur baru padahal bank telah melakukan investasi infrastruktur dan sumber daya manusia yang cukup besar sehingga menambah biaya operasional Bank.
- 6) Kendala dalam hal koordinasi  
  
Usaha kecil sebagai mana disebut pada bab-bab terdahulu banyak sekali instansi yang mengaturnya. Ada Departemen Koperasi dan Usaha kecil menengah, ada Departemen Perindustrian perdagangan, ada Departemen keuangan dan juga Bank Indonesia.



Diantara instansi-instansi tersebut kelihatan bahwa koordinasinya sangat lemah.

7) Belum adanya aturan yang jelas dan sistematis mengenai peraturan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha kecil. Kebijaksanaan bersifat adhoc, sehingga dapat diragukan efektifitasnya serta kontinuitasnya .

8) Kendala yuridis misalnya

- a. mengenai status badan usaha dan legalitas berusaha.
- b. Pengelolaan dokumen yang kurang rapi, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban –kewajiban sebagai debitur, atau sebaliknya.
- c. Kemampuan bernegosiasi yang sangat kurang, sehingga hasilnya tidak maksimal . Hal ini erat kaitanya dalam penyusunan kontrak dan perjanjian kotrak, khusus pada syarat dan kondisi yang selalu mendudukan mereka dalam posisi lemah dan terbatas.
- d. Terbatasnya kemampuan memelihara hak milik inteiektual dan mempertahankan terhadap pihak-pihak lain.

9) Kendala non yuridis .

- e. Kurangnya kemampuan bernegosiasi sehingga selalu menempatkan debitur pada posisi yang lemah.
- f. Kurang kemampuan memelihara mitra dengan baik, sehingga selalu harus mencari mitra baru, sehingga kurang efisien.

10 Kendala bagi usaha kecil untuk mendapatkan kredit bank adalah keharusan adanya jaminan sedangkan bagi bank alasan operasional perlunya jaminan dalam pemberian kredit adalah sulitnya menerapkan prinsip 5 C.

Dalam analisis pemberian kredit sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-undang tentang perbankan dalam menyalurkan kredit harus memperhatikan Prinsip 5C. Prinsip 5C meliputi 5 asas yaitu:

1. Character( Watak )
2. Capacity ( kemampuan )
3. Capital ( Modal )
4. Condition ( Kondisi Perekonomian )
5. Colateral ( Jaminan ).

Karakter adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan jika bank ingin memberikan kredit kepada nasabah debitur . Apabila debitur seorang yang dikenal tidak jujur , curang maka kredit tidak akan berhasil tanpa perlu memperhatikan faktor-faktor lainnya . Seseorang yang tidak jujur ataupun orang yang curang akan selalu mencari jalan untuk mengambil keuntungan .Orang yang tidak jujur dalam menjalankan bisnisnya tidak akan menjalankannya dengan baik dan akhirnya kredit yang diberikan oleh bank akan mengandung resiko tinggi. Untuk itu penilaian karakter debitur harus ditentukan sejak ia memulai langkah pertama untuk mendapatkan pinjaman .Dalam menentukan karakter debitur harus mampu menunjukkan kepada bank bahwa ia adalah orang yang jujur dan dapat

diandalkan untuk itu dibutuhkan track record dari yang bersangkutan . Tentu saja untuk melakukan hal ini sangat sulit. Di Australia informasi semacam ini dapat diperoleh dari *Credit Bureau* ( Biro Kredit ), seperti Credit Reference Association Of Australia, Ltd ("CRAA"). Di Indonesia informasi seperti tersebut diatas dapat diperoleh melalui Sistem Informasi Debitur ( dahulu dikenal dengan Sistem Informasi Kredit ) yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Sistem ini sudah dirasakan manfaatnya oleh perbankan ,namun karena tidak adanya sistem kenal diri yang berlaku nasional dimana seseorang dapat memiliki identitas diri lebih dari satu sehingga informasi ini sering tidak akurat.

2. Capacity ( kemampuan )

Penilaian terhadap capacity perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur untuk membayar kembali kredit serta bunganya. Penilaian kemampuan membayar tersebut dilihat dari kegiatan usaha dan kemampuan mengelola usaha yang akan dibiayai melalui kredit.

3. Capital ( Modal) berhubungan dengan kekuatan si peminjam. Ada beberapa cara untuk menentukan apakah modal seseorang itu memuaskan.

Langkah pertama adalah mendapatkan laporan aset dan passiva dari si peminjam dan harus dipastikan data tersebut akurat. Beberapa lembaga pinjaman mempunyai aturan-aturan pinjaman yang memuat batas rasio maksimal aset dan passiva.

4. *Condition* ,dapat dilihat melalui dua katagori yaitu kondisi internal dan eksternal yang akan mempengaruhi peminjam dan kemampuan debitur untuk mengembalikan. Kedua pihak baik bank maupun debitur menyusun kontrak yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan kredit, bunga dan biaya. Bank berhak mengetahui gegunaan dari kredit. Kalau tujuan kredit digunakan untuk hal-hal yang ilegal misalnya membahayakan lingkungan maka kredit akan ditolak.

5. Collateral ( Jaminan )

Penilaian terhadap collateral perlu dilakukan untuk mengetahui nilai barang jaminan yang diserahkan calon debitur untuk menutupi resiko kegagalan pengambilan kredit yang akan diperolehnya. Barang jaminan berfungsi sebagai pengaman terhadap kemungkinan ketidakmampuan calon debitur melunasi kredit yang diterimanya.

Kesulitan bank dalam melaksanakan analisis dengan menggunakan prinsip 5C sebagaimana disebut diatas, dapat diatasi dengan adanya skim jaminan atau skim asuransi kredit. Dengan adanya skim jaminan tersebut diatas maka bank lebih mudah untuk menilai resiko kredit yang diberikannya.

Dilihat dari pembahasan terdahulu maka upaya mendorong penyaluran kredit perbankan kepada usaha kecil masih menghadapi kendala.

Pemerintah, perbankan dan pihak terkait perlu melakukan sinergi agar hambatan didalam menyalurkan kredit dapat diatasi. Usaha Mikro dan Kecil berperan sangat penting dalam perekonomian Nasional. Disamping itu Usaha

Mikro dan Kecil telah terbukti mampu bertahan dalam menghadapi krisis keuangan yang cukup parah pada tahun 1997-1998. Kalangan perbankan perlu mendesak pemerintah untuk memebentuk lembaga penjamin kredit perbankan bagi usaha bersekala kecil. Alasannya selama ini perbankan kesulitan untuk mengucurkan kreditnya bagi pengusaha mikro kecil karena proposal nya dinilai tidak cukup layak sehingga sulit untuk dikabulkan kreditnya. Bankir mengaku kesulitan dalam menganalisa kemampuan para pengusaha kecil karena sebagian besar dari mereka tidak menerapkan manajemen usaha secara tertib. Kondisi semacam ini sangat menyulitkan perbankan dalam melakukan analisis keuangan., terutama pada waktu hendak mengabulkan permohonan kredit usahanya. Oleh karena itu , diharapkan agar pemerintah mendirikan infrastruktur pendukung berupa lembaga penjamin kredit guna memayungi keberadaan para pengusaha kecil yang jumlahnya sangat besar.

Dengan adanya kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan IMF tanggal 20 Januari tahun 2000, maka Bank Indonesia menghapuskan ketentuan yang mewajibkan Bank menyalurkan kreditnya kepada usaha kecil minimal 20 % dari porto polio kreditnya . Kalau dilihat dari ketentuan undang-undang no 7 tahun 1992 jo UU no 10 tahun 1998 tentang perbankan maka hal tersebut diatas bertentangan dengan pasal 4 yang mengatakan perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak .

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **I. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah di paparkan dalam bab terdahulu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat peluang untuk mengadakan regulasi mengenai sistim dan mekanisme untuk meningkatkan akses usaha kecil kepada kredit perbankan. Regulasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan, mengintegrasikan, atau menghubungkan beberapa unsur pokok yang diperlukan dalam sebuah sistim dan mekanisme yang terpadu. Unsur-unsur tersebut terdiri dari Bank yang khusus didirikan untuk memberikan kredit kepada UK, lembaga yang memberikan pinjaman atas kredit yang diberikan kepada UK dan lembaga untuk mengkoordinasikan semua kegiatan pembinaan dan pemberian teknis kepada UK. Untuk mewujudkan sistim dan mekanisme tersebut diperlukan perubahan pada peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-undang Perbankan dan undang-undang Usaha Kecil serta peraturan pelaksanaan yang terkait.

2. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sistim pembiayaan dan pemberian kredit UK di Indonesia saat ini terdiri atas beberapa unsur yaitu: perbankan yang terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, lembaga keuangan non Bank seperti modal ventura dan lembaga keuangan mikro, dan lembaga Asuransi dan penjaminan kredit yang memberikan dukungan dalam bentuk penutupan Asuransi dan penjaminan kredit atas kredit yang diberikan kreditur. Pemberi bantuan yang bersifat teknis seperti seperti produksi, pemasaran administrasi dan informasi beberapa pihak termasuk lembaga kreditur, penjaminan serta instansi pemerintah terkait. Peraturan perundang-undangan yang ada juga belum dirancang secara komprehensif dan terpadu, sehingga masing-masing pihak cenderung berjalan sendiri-sendiri. Selain itu peraturan Perundang-undangan juga belum mengatur secara tegas mengenai peranan Pemerintah dalam menunjang pembiayaan kepada usaha Kecil beserta mekanisme operasionalnya. Sementara itu, sistim pembiayaan kepada Usaha Kecil di negara-negara lain pada umumnya menunjukkan adanya hubungan yang erat dan terintegrasi antara pihak yang memberikan kredit dengan pihak yang memberikan penjaminan serta pihak yang memberikan pembinaan dan bantuan teknis. Di Negara-negara lain menunjukkan adanya hubungan yang erat dan terintegrasi antara pihak yang memberikan kredit dan pembiayaan dengan pihak yang memberikan penjaminan serta pihak



yang memberikan pembinaan dan bantuan teknis. Seperti misalnya Amerika dan Jepang bahkan telah sejak lama mempunyai lembaga yang khusus menangani pengembangan usaha Kecil yang didirikan dengan Undang-undang dan dikelola secara mandiri dan profesional sesuai dengan amanat dan mandat yang diberikan Undang-undang. Pengalaman dinegara-negara lain menunjukkan bahwa Pemerintah mempunyai peran besar dan upaya pengembang Usaha Kecil, baik melalui regulasi maupun melalui bantuan keuangan khususnya dalam mendirikan Bank dan lembaga keuangan lainnya yang khusus ditujukan untuk pembiayaan kepada Usaha Kecil, termasuk lembaga penjaminan kredit.

3. Kendala dan kesulitan usaha kecil untuk memperoleh akses kepada kredit perbankan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pendekatan perbankan khususnya bank umum yang lebih mementingkan persyaratan formal yang sulit dipenuhi UK, kondisi dan karakteristik UK yang belum sesuai dengan keinginan perbankan, serta Peraturan perundang-undangan yang belum berhasil menciptakan sistem dan mekanisme untuk menjembatani kesenjangan antara sikap dan pendekatan perbankan dengan, kondisi dan karakteristik UK yang jumlahnya demikian banyak dan tersebar sampai kepedesaan. Walau beberapa hal, kesenjangan tersebut justru berasal dari peraturan

Perundang-undangan yang kurang jelas, kurang tegas serta tidak sinkron satu sama lainnya.

## **II. SARAN**

Untuk mengetahui permasalahan tersebut diatas dapat disarankan sebagai berikut:

1. Perlu segera dikeluarkan peraturan baru atau paling tidak dilakukan perubahan yang cukup mendasar terhadap undang-undang no.9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Undang-undang baru atau perubahan undang-undang tersebut diperlukan terutama untuk mengatur beberapa substansi pokok yang diperlukan untuk mendukung pemberian kredit perbankan kepada usaha kecil seperti pembentukan peran, kedudukan dan tanggung jawab lembaga penjamin kredit, pembentukan, peran, kedudukan dan tanggung jawab lembaga yang melakukan pembinaan dan bantuan teknis, serta keterkaitan dan kordinasi antara lembaga penjamin kredit dan lembaga yang melakukan pembinaan dan bantuan teknis dengan perbankan dan lembaga keuangan yang memberikan kredit dan pembiayaan. Penjaminan kredit diperlukan untuk mendukung atau memperkuat jaminan kredit sedangkan bantuan teknis diperlukan untuk membantu meningkatkan kelayakan usaha secara keseluruhan.
2. Perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Perubahan terutama dimaksudkan untuk memberikan

peluang bagi didirikannya Bank khusus untuk membiayai kegiatan Usaha Kecil umpamanya dengan menggolongkan atas bank Umum dan Bank khusus atau paling tidak mempertegas kewenangan pemerintah dalam menugaskan bank-Bank umum dalam membiayai usaha Kecil. Perubahan diperlukan untuk memperjelas dan mempertegas peranan penjamin kredit bagi bagi Usaha Kecil yang belum dapat memenuhi persyaratan koleteral dan peranan bantuan teknis dalam meningkatkan kelayakan usaha secara keseluruhan sebagaimana disinggung dalam saran butir 1. Undang-undang perbankan juga perlu diubah untuk menjamin perlakuan yang sama antara Bank konvensional dengan bank Syariah baik secara konsepsional maupun realita lebih banyak memberikan perhatian kepada pembiayaan usaha kecil.

3. Apabila keuangan negara dalam jangka menengah dan jangka panjang diperhitungkan tidak akan mampu memberikan dukungan yang berarti bagi pengembangan dan pembiayaan usaha Kecil, maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang Bank Indonesia agar Bank Indonesia sebagai Bank Sentral tetap dapat membantu pembiayaan usaha Kecil secara sehat dan berkelanjutan tanpa harus mengabaikan fungsinya sebagai pemelihara stabilitas moneter.
4. Untuk Usaha Kecil yang betul-betul sulit dibiayai dengan mekanisme perbankan seperti usaha mikro perlu dibentuk dan dikembangkan

lembaga keuangan mikro sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu perlu segera dikeluarkan Undang-Undang mengenai lembaga keuangan mikro, khususnya untuk mengatur, mengembangkan dan mengawasi lembaga keuangan mikro agar betul-betul dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

5. Sambil menunggu peraturan perundang-undangan yang diusulkan diatas pemerintah segera melakukan upaya seperti meningkatkan efektivitas, koordinasi kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil, melakukan evaluasi dan sinkronisasi antara berbagai skim pemberian kredit yang dilakukan perbankan dan lembaga keuangan non Bank dalam membiayai usaha Kecil, mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan yang tersedia seperti SUP No. 005 dan dana PUKK, BUMN menjadi Skim kredit program melalui perbankan, mengintegrasikan dan mengusulkan aktivitas PT Askrindo, Peran sarana, lembaga penjamin kredit lainnya untuk mendukung pembiayaan Usaha Kecil.
6. Perlu ada subsidi bunga dari pemerintah untuk kredit usaha kecil dan prosedur pemberian kredit dipermudah.
7. Perlu ada sosialisasi mengenai sumber-sumber pendanaan/kredit bagi usaha kecil.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, SH. Rilda Murniati, SH.M.Hum " Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan" PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hal 58.
- Achyar Ilyas "Kapan Hukum Atas Pembiayaan Usaha Kecil Melalui Kredit Perbankan" Program Pasca sarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2003.
- Biro Kredit BI "Syariat Peranan Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Kecil, Edisi ke empat, Juni 2001.
- Bouvier, S Law Dictionary A-K, West Publishing Company 1914.
- Drs. D. Ganda Prawira, S.H. Buku "Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional" BPHN th. 1992.
- Dupin Siregar" Prolog Dalam Sumber Daya Manusia, Kesempatan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi" FE UI Press, Jakarta, 1992.
- Edy putra The Aman, SH. " Kredit Perbankan suatu Tinjauan yuridis " Yogyakarta, Libery, 1989
- Mgs Edy putra The Aman, SH. " Kredit Perbankan suatu Tinjauan yuridis " Yogyakarta, Libery, 1989
- Gatot Supramono, SH. Perbankan dan Masalah Kredit " Jakarta " Jembatan 1997.
- Hakim Nusantara, SH" Identitas Hukum Ekonomi Indonesia dalam Prospektif sejajar, identitas Hukum nasional, UII Press Yogyakarta 1997.
- H.. M. A. Savelberg " de Ckredit Hippotiek " diss 1885.
- John D Calamari & Joseph M Perillo " The Law of contracts Third Ed. Hambook series st paul, Minnestoti : West Publishing co, 1987
- John Edward Muyyay, Ir Murray on contracts, ( A. Rewition of Grismore on contracts ) Indianapolis- New york : The Babbs- Mersill Company, hic 1974
- John Salinde " Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum" Sinar Grafika, Ujung Pandang Oktober 1991.
- John Salindeko " Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum" Sinar Grafika, Ujung Pandang Oktober 1991.

Jully. P. Tambuan "Pemberdayaan Usaha Ekonomi Rakyat, Business News No. 460/th XI/1999 tanggal 2 Februari 1999.

Koentjoroningrat Metode-metode penelitian masyarakat " Gramedia, Jakarta 1981 hal 115.

Levy " Rekening Courant 1873

Prof. Dr. mariam Darus Badruzaman, SH. " Perjanjian Kredit Bank Jakarta.

Prof. Dr. mariam Darus Badruzaman, SH. " Perjanjian Kredit Bank Jakarta.

Mahesh M. Kumar " Control of exclusion in England and india " kent England : Ravneseewood Publications 1985.

Mubyarto" Sistem dan Metode Ekonomi Indonesia LP3S Jakarta, 1994.

Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M "Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek" PT Citra Aditya Bakti Bandung, 1994

Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum Bandung FH UNPAD 1976

Mulyanto "Reformasi Sistem Ekonomi" Dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan (Kumpulan Makalah) Reformasi Haluan Negara dan Politik Ekonomi Baru, penerbit Aditya 1996.

Prof. DR. S. Nasution, MA. Prof. DR. M. Thomas Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Desertasi Makalah Bumi Aksara, Jakarta.

Robert N Corly & Peter J Shedd" Principles of Busines law " Engle wood clifbs, New Jersey : Prentire Hall 1998.

Ronny Hanitijo Soemitro, S.H., " Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri" Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Prof.DR. Syariffuddin Baharsyah.Kebijaksanaan Umum Kemitraan Usaha disektor Pertanian" Departemen Pertanian Jakarta, 1997.

Sentoso Sembiring, S.H.,M.H., Hukum Perbankan "CV Mandar Maju" Bandung 2000.

Soebirin Sumawiyata, ekonomi kerakyatan prisma No. 8/1995 Tahun XIV, jakarta 1985.

DR. Sutan Remy Syahdini, SH. Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia" seni Hukum Perbankan " Institut bankir Indonesia Jakarta, 1993.

DR. Sri Gambir Melati Hatta, SH " Pelangi Hukum Bisnis....Jakarta

Sriotua ARIEP " Teori dan Kebijakan Pembangunan CIDIES 1996

Sumiyati Sahala, S.H.,M.Hum. Penelitian Aspek Hukum Peningkatan Peranan Pengusaha Kecil dalam Ekonomi. BPHN, Jakarta 2000.

Siswanto Sutoyo "Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik, dan Kasus, PT Pustaka Binamar Presindo. Jakarta, 1997.

Todoro, Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid, I, terjemahan Ib Baharudin Abdullah dan haris Munandar" Erlangga, Jakarta, 1994. Todora, Michael " De Development Planing Model And Method" Oxford University Press, Nairabi, 1978.

Drs. Thomas Suyatno, Drs. H.A. Chalik Drs Made Surada, AKT, MA. Dra C. Trio Yuniati Ananda Dju Haepah T. Maraba, MBA " Dasar-dasar Perkreditan " Edisi keempat. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta 1999.

Politik Hukum GBHN 1976

Yeane Neltje, SH.MH. Usaha Kecil Peranan Modal Asing dalam Perspektif Perdagangan Internasional " BPHN jakarta, 2000 hai 14.

Zuldan Arif Fakrullah, SH.MH., H. Hadi Wuryan, SH.CN.MH. " Hukum Ekonomi" Surabaya, karya Abditama, 1977

## **II. Seminar/makalah/tulisan ilmiah**

Adi Kusnadi,SH.CN Karya Ilmiah" Prinsip Hukum Usaha Kecil dikaitkan dengan Ketentuan WTO dan GATT. BPHN, Jakarta, 2001.

Anwar Nasution, Pidato Pengantar tugas sebagai Deputy Gubernur Senior bank Indonesia, Jakarta Rabu 28 Juli 1999.

Apresiasi terhadap Skim KUPeDES dan SIMPeDES disampaikan dalam pertemuan Internasional seperti sidang-sidang Asia Pasipic Rural and Agricultural Credit Association ( APRACS)

Arifin Siregar" Prolog Dalam Sumber Daya Manusia, Kesempatan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi FE UI Press, jakarta 1992.

M. Jakile, Kata Pengantar majalah Bank Medan 1974

Paramita Pramaningtyas" Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia" makalah disampaikan pada seminar berjudul" kajian Peraturan Perundang-undangan tentang Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah" Jakarta, 26 Juli 2001.

Sri Adiningsih" Regulasi dalam Revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia" Seminar Pembangunan Hukum VIII di Bali, tanggal 14-18 Juli 2003.

Sri Edi Suwarsono Prospek dan Perkembangan perekonomian rakyat/UKM: antara Kedaulatan rakyat dan Kedaulatan Pasar" Seminar Nasional sehari mengenai prospek dan perkembangan UKM Fak Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, 25 Juni 2002

Sri Edi Swarsono" Reformatory Recovery. Menghindari marginalisasi terhadap usaha Kecil. Makalah sebagai bahan ceramah mengenai Small and Medium Scale Enterprises and Cooperatives" Diklat caraka madya Angkatan V Pusdiklat Deplu, Jakarta 30 Maret 2000.

Edi Swarsono, Ekonomi Rakyat dan peran kandidat antara retorika dan realita makalah dalam diskusi panel membangun modal pemberdayaan ekonomi Kerakyatan di Kota madya Bandung, 20 Nopember 1999.

Tawang Alun" Peranan usaha Kecil dalam Perekonomian Indonesia" seminar Perkreditan dan Persepatuan" Jakarta 18 Oktober 1987.

Yunus Husein, SH.LLM dan Garda T Paripurna,SH.LLM. penjaminan Kredit dan Upaya mendorong penyaluran kredit perbankan kepada Usaha Mikro dan Kecil. Disampaikan dalam dialog Nasional Hukum dan Non Hukum. Diselenggarakan oleh BPHN, tanggal 7-9 September 2004 di Jakarta.



### **III. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat pasal 33

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral

Undang-Undang No. 7 / 1972 jo Undang-Undang No. 10 /1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 9 / 1995 Tentang Usaha Kecil

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas

GBHN Tahun 1999 – 2004 ( TAP MPR No. 1V / 1999)

Peraturan Bank Indonesia No. 3/1 /PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang proyek Kredit Mikro.

Peraturan Bank Indonesia No. 3/8/PBI/2001 tanggal 25 April 2001 tentang Perubahan

Peraturan Bank Indonesia No. 3/1/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang Proyek Kredit Mikro.

Peraturan Bank Indonesia No. 3/16/PBI/2001 tanggal 3 Oktober 2001 tentang perubahan kedua atas peraturan Bank Indonesia No. 3/1/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang proyek Kredit Mikro.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/BKR/ tanggal 17 Mei 2001 tentang petunjuk Pelaksana Pemberian kredit Usaha Kecil.

Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1232/KMK/013/ 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi.

Surat Keputusan Menteri Perindustrian No 13/M/SK-1/3/1990 tentang penyempurnaan SK Menteri No. 286/M/ SK/10/1989.

Keputusan Bersama Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menteri  
Negara Penggerak Dana Industri/Ketua BKPM No. 01/SKB/M/VII/1995 dan  
No.11/SK/1995 tentang Kriteria Usaha Kecil.

Surat Utang Pemerintah ( SUP ) 005

Surat Edaran Nomor 3/9/BKR/ tanggal 17 Mei 2001 tentang petunjuk Pelaksana  
Pemberian kredit Usaha Kecil.

Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 40 /KMK/06/2003 tanggal 29 Januari 2003  
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan dana SUP 005.